

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI PACITAN

NOMOR 50 Tahun 2019

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PACITAN NOMOR 66 TAHUN 2017

TENTANG KODE REKENING ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2019

KODE REKENING PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE		PROGRAM DAN KEGIATAN
1		2
Urusan : - NON URUSAN		
01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01	01	Penyediaan jasa surat menyurat
01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
01	03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
01	04	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS
01	05	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan
01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor
01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
01	10	Penyediaan alat tulis kantor
01	11	Penyediaan barang cctakan dan penggandaan
01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
01	14	Penyediaan peralatan rumah tangga
01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
01	16	Penyediaan bahan logistik kantor
01	17	Penyediaan makanan dan minuman
01	18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
01	19	Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran
01	20	Pengelolaan Administrasi Kepegawaian
01	21	Pengelolaan Administrasi Aset
01	22	Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor
01	23	Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran Bagi UPT
01	24	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran/Jasa Teknis
01	25	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/Operasional
01	26	Penyediaan jasa administrasi keuangan.
01	27	Penyediaan Makanan dan Mnuman
01	28	Rapat-raapt Koordinasi dan konsultasi ke dalam Daerah.
01	29	Penyediaan jasa pendukung adminstrasi perkantoran /jasa teknis.
01	30	Penyusunan LPPD
01	31	Penyediaan Jasa Teknis Perkantoran
01	32	Penyusunan SOP SKPD/SKPKD
01	36	Penyediaan Jasa Administrasi Pengadaan Pekerjaan Unit (P3U)
01	37	Penyediaan Jasa Tenaga Ahli
01	38	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listik
01	39	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Ketahanan Pangan
01	40	Peningkatan Sumber Daya Aparatur
02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
02	01	Pembangunan rumah jabatan
02	02	Pembangunan rumah dinas
02	03	Pembangunan gedung kantor
02	04	Pengadaan mobil jabatan

Paraf Hierarki		Asisten	
Sekda	✓	PD Pemrakarsa	✓
Asisten Pembantu Sekda	✓	PD Terkait	✓
Kabag Hukum	✓		

KODE		PROGRAM DAN KEGIATAN
1		2
02	05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional
02	06	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas
02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor
02	08	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas
02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor
02	10	Pengadaan mebeleur
02	11	Pengadaan Sarana Prasarana Gedung Kantor
		s/d
02	19	dst.....
02	20	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan
02	21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
02	23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
02	25	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas
02	26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
02	27	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas
02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
02	29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
02	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Halaman/Taman Gedung Kantor
		s/d
02	39	dst.....
02	40	Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan
02	41	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas
02	42	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
02	43	Rehabilitasi sedang/berat mobil jabatan
02	44	Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional
02	45	Pembangunan Areal Parkir
02	46	Pembangunan Sarana Gedung Kantor
02	49	Pengadaan Alat Komunikasi
02	50	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional.
02	51	Pengadaan Meubeler
02	52	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas/jabatan
02	53	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor.
02	54	Pengadaan belanja jasa pereneanaan pembangunan gedung kantor
02	55	Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Makam Pahlawan
02	57	Pembangunan Gedung Kantor (DAK)
02	58	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor
03		Program peningkatan disiplin aparatur
03	01	Pengadaan mesin/kartu absensi
03	02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
03	03	Pengadaan pakaian kerja lapangan
03	04	Pengadaan pakaian KORPRI
03	05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
03	06	dst.....
04		Program fasilitas pindah/puma tugas PNS
04	01	Pemulangan pegawai yang pensiun
04	02	Pemulangan pegawai yang tewas dalam melaksanakan tugas
04	03	Pemindahan tugas PNS
04	04	dst.....
05		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
05	01	Pendidikan dan pelatihan formal
05	02	Sosialisasi peraturan perundang-undangan
05	03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
05	04	Menyusun SPM,SOP ANJAB dan Beban Kerja
05	05	Jambore dan Han Jadi Satpol PP

Paral Hiterarki			
Sekda	<input checked="" type="checkbox"/>	Asisten _____	h
Asisten Pemb & Kesra	<input type="checkbox"/>	PD Pemrakarsa	
Kabag Fluxum	<input type="checkbox"/>	PD Terkait	

KODE		PROGRAM DAN KEGIATAN
1		2
05	06	Peningkatan Kapasitas Aparatur
05	07	Pembinaan PPNS
05	08	Fasilitasi Upacara 17an Dan Upacara Hari Besar Nasional
05	09	analisis kebutuhan diklat
05	10	asistensi pengumpulan dan pelaporan LHKPN/LHKASN
05	12	Bimtek pengaplikasian Simpeg Banyuasin
05	13	pembekalan PNS menjelang memasuki masa pensiun
05	14	main power planning
05	15	asistensi tlm terpadu penilaian jabatan fungsional
05	16	workshop peningkatan kompetensi aparatur sipil negara (ASN)
05	17	Pendidikan dan Pelatihan Non Formal
05	18	Pemilihan Pegawai Teladan
05	19	Kegiatan Bimtek bagi Aparatur Pemerintah Desa dan Anggota BPD
05	20	Kegiatan Orientasi Pembekalan dan Kunjungan Kerja bagi Aparatur Pemerintah Desa dan Anggota BPD
05	60	Operasional pemilihan kepala desa
06		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
06	02	Penyusunan laporan keuangan semesteran
06	03	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
06	04	Penguatan Reformasi Birokrasi
06	05	pcnyusunananggaran RKA, DPA, DPPA
06	06	Penyusunan LAKIP SKPD
06	07	Fasilitasi Pelaksanaan Gelar Budaya Kerja
06	08	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
06	14	Penyusunan perencanaan dan laporan capaian kinerja Perangkat Daerah
06	17	Penyusunan IKU, Tapkin, Renja dan RKT
06	18	Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan dan Akhir Tahun
06	19	penyusunan analisis jabatan
06	20	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun
06	21	penyusunan sasaran kinerja pegawai SKPD
06	22	penyusunan Standar Opsional Prosedur
06	23	Indeks Kepuasan Masyarakat
06	24	Penyusunan Rencana Strategis SKPD
06	25	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan
Urusan : 1.01. - PENDIDIKAN		
15		Program Pendidikan Anak Usia Dini
15	01	Pembangunan gedung sekolah
15	02	Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah
15	03	Penambahan ruang kelas sekolah
15	04	Penambahan ruang guru sekolah
15	05	Pembangunan ruang locker siswa
15	06	Pembangunan sarana dan prasarana olahraga
15	07	Pembangunan sarana dan prasarana bermain
15	08	Pembangunan ruang scrba guna/aula
15	09	Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir
15	10	Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah
15	11	Pembangunan ruang ibadah
15	12	Pembangunan perpustakaan sekolah
15	13	Pembangunan jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya
15	14	Pembangunan sarana air bersih dan sanitary
15	15	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siwa
15	16	Pengadaan pakaian seragam sekolah
15	17	Pengadaan pakaian olahraga
15	18	Pengadaaan aiat praktik dan peraga siswa

Paraf Hierarki	
Sekda	6
Asisten Pen & Kesa	4
Kabag Hukum	9

Asisten	
PD Pemrakarsa	
PD Terkait	

KODE		PROGRAM DAN KEGIATAN
1		2
15	19	Pengadaan mebeluer sekolah
15	20	Pengadaan perlengkapan sekolah
15	21	Pengadaaan alat rumah tangga sekolah
15	22	Pengadaaan sarana mobilitas sekolah
15	23	Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah
15	24	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah
15	25	Pemeliharaan rutin/berkala ruang kelas sekolah
15	26	Pemeliharaan rutin/berkala ruang guru sekolah
15	27	Pemeliharaan rutin/berkala ruang locker siswa
15	28	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga
15	29	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana bermain
15	30	Pemeliharaan rutin/berkala ruang serba guna/aula
15	31	Pemeliharaan rutin/berkala taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir
15	32	Pemeliharaan rutin/berkala ruang unit kesehatan sekolah
15	33	Pemeliharaan rutin/berkala ruang ibadah
15	34	Pemeliharaan rutin/berkala perpustakaan sekolah
15	35	Pemeliharaan rutin/berkala jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya
15	36	Pemeliharaan rutin/berkala sarana air bersih dan sanitary
15	37	Pemeliharaan rutin/berkala alat peraktik dan peraga siswa
15	38	Pemeliharaan rutin/berkala meneluer sekolah
15	39	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan sekolah
15	40	Pemeliharaan rutin/berkala alat rumah tangga sekolah
15	41	Pemeliharaan rutin/berkala sarana mobilitas sekolah
15	42	Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah
15	43	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah
15	44	Rehabilitasi sedang/berat asrama siswa
15	45	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah
15	46	Rehabilitasi sedang/berat ruang guru sekolah
15	47	Rehabilitasi sedang/berat ruang locker siswa
15	48	Rehabilitasi sedang/berat sarana olahraga
15	49	Rehabilitasi sedang/berat sarana bermain
15	50	Rehabilitasi sedang/berat ruang serba guna/aula
15	51	Rehabilitasi sedang/berat taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir
15	52	Rehabilitasi sedang/berat ruang unit kesehatan sekolah
15	53	Rehabilitasi sedang/berat ruang ibadah
15	54	Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah
15	55	Rehabilitasi sedang/berat jaringan instalasi listrik dan perlengkapannya
15	56	Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan sanitary
15	57	Pelatihan kompetensi tenaga pendidik
15	58	Pengembangan pendidikan anak usia dini
15	59	Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini
15	60	Pengembangan data dan informasi pendidikan anak usia dini
15	61	Penyusunan kebijakan pendidikan anak usia dini
15	62	Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan ank usia dini
15	63	Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama pendidikan anak usia dini
15	64	Perencanaan dan penyusunan program anak usia dini
15	65	Publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini
15	66	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
15	67	Pembangunan talud dan pagar sekolah
15	68	Penyelenggaraan Akreditasi PAUD
15	69	Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD (DAK)
15	70	Penyediaan Sarana dan Prasarana PAUD

Pencatatan			
Sekda	✓	Asisten	h
Asisten Pem & Kesra	h	PD Pemrakarsa	h
Kabag Hukum	h	PD Terkait	h




KODE		PROGRAM DAN KEGIATAN
1		2
16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
16	01	Pembangunan gedung sekolah
16	02	Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah
16	03	Penambahan ruang kelas sekolah
16	04	Penambahan ruang guru sekolah
16	05	Pembangunan Laboratorium dan ruang praktikum sekolah
16	06	Pembangunan sarana dan prasarana olahraga
16	07	Pembangunan sarana dan prasarana bermain
16	08	Pembangunan ruang serba guna/aula
16	09	Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir
16	10	Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah
16	11	Pembangunan ruang ibadah
16	12	Pembangunan perpustakaan sekolah
16	13	Pembangunan jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya
16	14	Pembangunan sarana air bersih dan sanitary
16	15	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa
16	16	Pengadaan pakaian seragam sekolah
16	17	Pengadaan pakaian olahraga
16	18	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa
16	19	Pengadaan mebeluer sekolah
16	20	Pengadaan perlengkapan sekolah
16	21	Pengadaan alat rumah tangga sekolah
16	22	Pengadaan sarana mobilitas sekolah
16	23	Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah
16	24	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah
16	25	Pemeliharaan rutin/berkala ruang kelas sekolah
16	26	Pemeliharaan rutin/berkala ruang guru sekolah
16	27	Pemeliharaan rutin/berkala ruang locker siswa
16	28	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga
16	29	Pemeliharaan rutin/berkala ruang serba guna/aula
16	30	Pemeliharaan rutin/berkala taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir
16	31	Pemeliharaan rutin/berkala ruang unit kesehatan sekolah
16	32	Pemeliharaan rutin/berkala ruang ibadah
16	33	Pemeliharaan rutin/berkala perpustakaan sekolah
16	34	Pemeliharaan rutin/berkala jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya
16	35	Pemeliharaan rutin/berkala sarana air bersih dan sanitary
16	36	Pemeliharaan rutin/berkala alat praktik dan peraga siswa
16	37	Pemeliharaan rutin/berkala mebeluer sekolah
16	38	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan sekolah
16	39	Pemeliharaan rutin/berkala alat rumah tangga sekolah
16	40	Pemeliharaan rutin/berkala sarana mobilitas sekolah
16	41	Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah
16	42	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah
16	43	Rehabilitasi sedang/berat asrama siswa
16	44	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah
16	45	Rehabilitasi sedang/berat ruang guru sekolah
16	46	Rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan praktikum sekolah
16	47	Rehabilitasi sedang/berat sarana mobilitas sekolah
16	48	Rehabilitasi sedang/berat ruang locker siswa
16	49	Rehabilitasi sedang/berat sarana olahraga
16	50	Rehabilitasi sedang/berat ruang serba guna/aula
16	51	Rehabilitasi sedang/berat taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir
16	52	Rehabilitasi sedang/berat ruang unit kesehatan sekolah
16	53	Rehabilitasi sedang/berat ruang ibadah




Paraf Hierarki		Paraf Koordinasi	
Sekda		Asisten	
Asisten Pem. & Pesa		PD Pemrakarsa	
Kabag Hukum		PD Terkait	

KODE		PROGRAM DAN KEGIATAN
1		2
16	54	Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah
16	55	Rehabilitasi sedang/berat jaringan instalasi listrik dan perlengkapannya
16	56	Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan sanitary
16	57	Pelatihan kompetensi tenaga pendidik
16	58	Pelatihan kompetensi siswa berprestasi
16	59	Pelatihan penyusunan kurikulum
16	60	Pembinaan forum masyarakat peduli masyarakat
16	61	Pembinaan SMP terbuka
16	62	Penambahan ruang kelas baru SMP/MTS/SMPLB
16	63	Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan Non-Islam setara SD dan SMP
16	64	Penyediaan Biaya operasional madrasah
16	65	Penyediaan buku pelajaran untuk SD/MI/SDLB dan SMP/MTS
16	66	Penyediaan dana pengembangan sekolah untuk SD/MI dan SMP/MTS
16	67	Penyelenggraan paket A setara SD
16	68	Penyelenggraan paket B setara SMP
16	69	Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajemen sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) di satuan pendidikan dasar
16	70	Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa
16	71	Pengembangan comprehensive teaching and learning (CTL)
16	72	Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi
16	73	Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar
16	74	Penyediaan beasiswa retrieval untuk anak putus sekolah
16	75	Penyediaan beasiswa transisi
16	76	Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar
16	77	Penyelenggaraan Multi-Grade Teaching di daerah terpencil
16	78	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
16	79	Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Dan Festival/Lomba Seni Siswa Nasional (Fls2N) SD Dan SMP
16	80	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Madrasah Diniyah (BK)
16	81	Penyediaan Prasarana Pendidikan Dasar (DAK)
16	82	Olympiade MIPA SD/SMP
16	83	Pembinaan Gugus Sekolah Dasar
16	84	Pembangunan Pagar Talud SD/ SMP
16	85	Penyelenggaraan Ujian Nasional / Ujian Sekolah
16	86	Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah
16	87	Penerimaan Siswa Baru SD dan SMP
16	88	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pendidikan Dasar
16	89	Pembinaan Kelembagaan Pendidikan Dasar
16	90	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar
17		Program Pendidikan Menengah
17	01	Pembangunan gedung sekolah
17	02	Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah
17	03	Penambahan ruang kelas sekolah
17	04	Penambahan ruang guru sekolah
17	05	Pembangunan laboratorium dsan ruang praktikum sekolah (laboratorium bahasa, Komputer, IPA, IPS dan lain-lain)
17	06	Pembangunan ruang locker siswa
17	07	Pembangunan sarana dan prasarana olahraga
17	08	Pembangunan ruang serba guna/aula
17	09	Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir
17	10	Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah
17	11	Pembangunan ruang ibadah
17	12	Pembangunan perpustakaan sekolah

Para: H. Graiki	Paraf Koordinasi		
Sekda	Asisten		h
Asisten Per. & Kesra	PD Pemrakarsa		r
Kabag Hukum	PD Terkait		

KODE		PROGRAM DAN KEGIATAN
1		2
17	13	Pembangunan jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya
17	14	Pembangunan sarana air bersih dan sanitary
17	15	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa
17	16	Pengadaan pakaian seragam sekolah
17	17	Pengadaan pakaian olahraga
17	18	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa
17	19	Pengadaan mebeluer sekolah
17	20	Pengadaan perlengkapan sekolah
17	21	Pengadaan alat rumah tangga sekolah
17	22	Pengadaan sarana mobilitas sekolah
17	23	Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah
17	24	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah
17	25	Pemeliharaan rutin/berkala ruang kelas sekolah
17	26	Pemeliharaan rutin/berkala ruang guru sekolah
17	27	Pemeliharaan rutin/berkala ruang locker siswa
17	28	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga
17	29	Pemeliharaan rutin/berkala ruang serba guna/aula
17	30	Pemeliharaan rutin/berkala taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir
17	31	Pemeliharaan rutin/berkala ruang unit kesehatan sekolah
17	32	Pemeliharaan rutin/berkala ruang ibadah
17	33	Pemeliharaan rutin/berkala perpustakaan sekolah
17	34	Pemeliharaan rutin/berkala jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya
17	35	Pemeliharaan rutin/berkala sarana air bersih dan sanitary
17	36	Pemeliharaan rutin/berkala alat praktik dan peraga siswa
17	37	Pemeliharaan rutin/berkala mebeluer sekolah
17	38	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan sekolah
17	39	Pemeliharaan rutin/berkala alat rumah tangga sekolah
17	40	Pemeliharaan rutin/berkala sarana mobilitas sekolah
17	41	Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah
17	42	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah
17	43	Rehabilitasi sedang/berat asrama siswa
17	44	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah
17	45	Rehabilitasi sedang/berat ruang guru sekolah
17	46	Rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan praktikum sekolah
17	47	Rehabilitasi sedang/berat ruang locker siswa
17	48	Rehabilitasi sedang/berat sarana olahraga
17	49	Rehabilitasi sedang/berat ruang serba guna/aula
17	50	Rehabilitasi sedang/berat taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir
17	51	Rehabilitasi sedang/berat ruang unit kesehatan sekolah
17	52	Rehabilitasi sedang/berat ruang ibadah
17	53	Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah
17	54	Rehabilitasi sedang/berat jaringan instalasi listrik dan perlengkapannya
17	55	Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan sanitary
17	56	Rehabilitasi sedang/berat sarana mobilitas sekolah
17	57	Pelatihan kompetensi tenaga pendidik
17	58	Pelatihan penyusunan kurikulum
17	59	Pembinaan forum masyarakat peduli pendidikan
17	60	Pengembangan alternatif layanan pendidikan menengah untuk daerah-daerah pedesaan, terpencil dan kepulauan
17	61	Penyediaan bantuan operasional manajemen mutu (BOMM)
17	62	Penyediaan beasiswa bagi keluarga tidak mampu
17	63	Penyelenggaraan-paket C setara SMU

Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten Pm & Nsm	
Kabag Hukum	

Paraf Koordinator	
Asisten	
PD Pemrakarsa	
PD Terkait	

KODE		PROGRAM DAN KEGIATAN
1		2
17	64	Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajemen sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS)
17	65	Pengembangan materi belajar mengajar dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi
17	66	Peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dan industri
17	67	Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah
17	68	Penyelenggaraan akreditasi sekolah menengah
17	69	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
18		Program Pendidikan Non Formal
18	01	Pemberdayaan tenaga pendidik non formal
18	02	Pemberian bantuan operasional pendidikan non formal
18	03	Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan
18	04	Pengembangan pendidikan keaksaraan
18	05	Pengembangan pendidikan kecakapan hidup
18	06	Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal
18	07	Pengembangan data dan informasi pendidikan non formal
18	08	Pengembangan kebijakan pendidikan non formal
18	09	Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan non formal
18	10	Pengembangan sertifikasi pendidikan non formal
18	11	Perencanaan dan penyusunan pendidikan non formal
18	12	Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal
18	13	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
18	14	Pembinaan Peserta Hari Aksara Internasional (HAI)
18	15	Penyelenggaraan Peserta Hari Anak Nasional (HAN)
18	16	Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan
18	17	Pendamping Penyelenggaraan Ujian Nasional Paket A, B dan C
18	18	Penyelenggaraan Kejar Paket A, B, dan C
18	19	Jambore PTK PNF
18	20	Pembinaan Tenaga Pendidik Dan Kependidikan PNF
18	21	Pendidikan Kewirausahaan Masyarakat
18	22	Pembinaan Lembaga Pendidikan Non Formal
18	23	Pembinaan Dan Penguatan Lembaga Rumah Pintar Mini (RPM)
18	24	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Non Formal (DAK)
18	25	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (DAK)
19		Program Pendidikan Luar Biasa
19	01	Pembangunan gedung sekolah
19	02	Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah
19	03	Penambahan ruang kelas sekolah
19	04	Penambahan ruang guru sekolah
19	05	Pembangunan laboratorium dsan ruang praktikum sekolah (laboratorium bahasa, komputer, IPA, IPS dan lain-lain)
19	06	Pembangunan ruang locker siswa
19	07	Pembangunan sarana dan prasarana olahraga
19	08	Pembangunan ruang serba guna/aula
19	09	Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir
19	10	Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah
19	11	Pembangunan ruang ibadah
19	12	Pembangunan perpustakaan sekolah
19	13	Pembangunan jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya
19	14	Pembangunan sarana air bersih dan sanitary
19	15	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa
19	16	Pengadaan pakaian seragam sekolah dan kelengkapannya serta pakaian olahraga
19	17	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa
19	18	Pengadaan mebeluer sekolah
19	19	Pengadaan perlengkapan sekolah

Paraf Kepala	/		
Sekda	✓	Asisten _____	h
Asisten Pen. & Kesa	t	PD Pemrakarsa	f
Kabag Hukum	2	PD Terkait	

KODE		PROGRAM DAN KEGIATAN
1		2
17	64	Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajemen sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS)
17	65	Pengembangan materi belajar mengajar dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi
17	66	Peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dan industri
17	67	Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah
17	68	Penyelenggaraan akreditasi sekolah menengah
17	69	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
18		Program Pendidikan Non Formal
18	01	Pemberdayaan tenaga pendidik non formal
18	02	Pemberian bantuan operasional pendidikan non formal
18	03	Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan
18	04	Pengembangan pendidikan keaksaraan
18	05	Pengembangan pendidikan kecakapan hidup
18	06	Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal
18	07	Pengembangan data dan informasi pendidikan non formal
18	08	Pengembangan kebijakan pendidikan non formal
18	09	Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan non formal
18	10	Pengembangan sertifikasi pendidikan non formal
18	11	Perencanaan dan penyusunan pendidikan non formal
18	12	Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal
18	13	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
18	14	Pembinaan Peserta Hari Aksara Internasional (HAI)
18	15	Penyelenggaraan Peserta Hari Anak Nasional (HAN)
18	16	Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan
18	17	Pendamping Penyelenggaraan Ujian Nasional Paket A, B dan C
18	18	Penyelenggaraan Kejar Paket A, B, dan C
18	19	Jambore PTK PNF
18	20	Pembinaan Tenaga Pendidik Dan Kependidikan PNF
18	21	Pendidikan Kewirausahaan Masyarakat
18	22	Pembinaan Lembaga Pendidikan Non Formal
18	23	Pembinaan Dan Penguatan Lembaga Rumah Pintar Mini (RPM)
18	24	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Non Formal (DAK)
18	25	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (DAK)
19		Program Pendidikan Luar Biasa
19	01	Pembangunan gedung sekolah
19	02	Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah
19	03	Penambahan ruang kelas sekolah
19	04	Penambahan ruang guru sekolah
19	05	Pembangunan laboratorium dsan ruang praktikum sekolah (laboratorium bahasa, komputer, IPA, IPS dan lain-lain)
19	06	Pembangunan ruang locker siswa
19	07	Pembangunan sarana dan prasarana olahraga
19	08	Pembangunan ruang serba guna/aula
19	09	Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir
19	10	Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah
19	11	Pembangunan ruang ibadah
19	12	Pembangunan perpustakaan sekolah
19	13	Pembangunan jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya
19	14	Pembangunan sarana air bersih dan sanitary
19	15	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa
19	16	Pengadaan pakaian seragam sekolah dan kelengkapannya serta pakaian olahraga
19	17	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa
19	18	Pengadaan mebeluer sekolah
19	19	Pengadaan perlengkapan sekolah

Paraf Hierarki	
Sekda	7
Asisten Pem & Kesra	4
Kabag Hukum	2

Paraf Koordinasi	
Asisten _____	h
PD Pemrakarsa	f
PD Terkait	

KODE		PROGRAM DAN KEGIATAN
1		2
19	20	Pengadaan alat rumah tangga sekolah
19	21	Pengadaan sarana mobilitas sekolah
19	22	Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah
19	23	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah
19	24	Pemeliharaan rutin/berkala ruang kelas sekolah
19	25	Pemeliharaan rutin/berkala ruang guru sekolah
19	26	Pemeliharaan rutin/berkala ruang locker siswa
19	27	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga
19	28	Pemeliharaan rutin/berkala ruang serba guna/aula
19	29	Pemeliharaan rutin/berkala taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir
19	30	Pemeliharaan rutin/berkala ruang unit kesehatan sekolah
19	31	Pemeliharaan rutin/berkala ruang ibadah
19	32	Pemeliharaan rutin/berkala perpustakaan sekolah
19	33	Pemeliharaan rutin/berkala jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya
19	34	Pemeliharaan rutin/berkala sarana air bersih dan sanitary
19	35	Pemeliharaan rutin/berkala buku-buku ajar
19	36	Pemeliharaan rutin/berkala alat praktik dan peraga siswa
19	37	Pemeliharaan rutin/berkala meneluer sekolah
19	38	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan sekolah
19	39	Pemeliharaan rutin/berkala alat rumah tangga sekolah
19	40	Pemeliharaan rutin/berkala sarana mobilitas sekolah
19	41	Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah
19	42	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah
19	43	Rehabilitasi sedang/berat asrama siswa
19	44	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah
19	45	Rehabilitasi sedang/berat ruang guru sekolah
19	46	Rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan praktikum sekolah
19	47	Rehabilitasi sedang/berat ruang locker siswa
19	48	Rehabilitasi sedang/berat sarana olahraga
19	49	Rehabilitasi sedang/berat ruang serba guna/aula
19	50	Rehabilitasi sedang/berat taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir
19	51	Rehabilitasi sedang/berat ruang unit kesehatan sekolah
19	52	Rehabilitasi sedang/berat ruang ibadah
19	53	Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah
19	54	Rehabilitasi sedang/berat jaringan instalasi listrik dan perlengkapannya
19	55	Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan sanitary
19	56	Pelatihan kompetensi tenaga pendidik
19	57	Pelatihan penyusunan kurikulum
19	58	Pembinaan forum masyarakat peduli pendidikan
19	59	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
20		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
20	01	Pelaksanaan sertifikasi pendidik
20	02	Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan
20	03	Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi
20	04	Pembinaan kelompok kerja guru (KKG)
20	05	Pembinaan lembaga penjamin mutu pendidikan (LPMP)
20	06	Pembinaan pusat pendidikan dan pelatihan guru (PPPG)
20	07	Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi
20	08	Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan
20	09	Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan
20	10	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik




Paraf Hierarki	
Sekda	<i>[Signature]</i>
Asisten Pem. & Kasra	<i>[Signature]</i>
Kabag. Hukum	<i>[Signature]</i>




Paraf Koordinasi	
Asisten _____	<i>[Signature]</i>
PD Pemrakarsa	<i>[Signature]</i>
PD Terkait	<i>[Signature]</i>

KODE		PROGRAM DAN KEGIATAN
1		2
20	11	Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesipendidik dan tenaga kependidikan
20	12	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
20	13	Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan
20	14	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional
20	15	Seleksi Galon Kepala Sekolah
20	16	Penguatan Kepengawasan Sekolah
20	17	Olimpiade sains guru
20	18	Pengembangan SIM-Pendidik dan Tenaga Kependidikan
20	19	Penilaian Kinerja Guru
20	20	Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan menggunakan TIK
20	21	Workshop Publikasi Ilmiah
20	22	Seleksi Guru Berprestasi
20	26	Pelatihan Kompetensi tenaga pendidik PAUD
21		Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
21	01	Pemasyaraktan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar
21	02	Pengembangan minat dan budaya baca
21	03	Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat
21	04	Pelaksanaan Koordinasi pengembangan keputakaan
21	05	Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca di daerah
21	06	Penyelenggaraan kordinasi pengembangan budaya baca
21	07	Perencanaan dan penyusunan program budaya baca
21	08	Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca
21	09	Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah
21	10	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
22		Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
22	01	Pelaksanaan evaluasi basil kinerja bidang pendidikan
22	02	Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan
22	03	Pengendalian dan pengawasan penerapan azas efesiensi dan efektifitas penggunaan dana dekonsentrasi dan dana pembantuan
22	04	Sosialisasi dan advokasi berbagai peraturan pemerintah di bidang pendidikan
22	05	Pembinaan dewan pendidikan
22	06	Pembinaan komite sekolah
22	07	Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan
22	08	Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan lokakarya serta diskusi ilmiah tentang berbagai isu pendidikan
22	09	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
22	10	Sinkronisasi Perencanaan Pendidikan
22	11	Penyusunan Profil Pendidikan
22	12	Penunjang Operasional Bantuan Siswa Miskin (BSM)
22	13	Penyelenggaraan jejaring pendidikan Nasional (JARDIKNAS)
22	14	Pengembangan Program Adiwiyata
22	15	Peningkatan manajemen pendidikan (pengelolaan aset, keuangan dan kepegawaian dan kelembagaan)
22	16	Workshop Penguatan Peran Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah
22	18	Penunjang Program Grindulu Mapan
Urusan : 1.02. - KESEHATAN		
15		Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
15	01	Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan

Paraf Hierarki	Paraf Koordinasi
Sekda	Asisten _____
Asisten Pembantu	PD Pemrakarsa
Kabag Hukum	PD Terkait

KODE		PROGRAM DAN KEGIATAN
1		2
15	02	Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan
15	03	Peningkatan keterjangkauan harga obat dan perbekalan kesehatan terutama untuk penduduk miskin
15	04	Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit
15	05	Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan
15	06	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
15	07	Pengadaan Obat Penunjang Pelayanan Kesehatan
15	08	Pelayanan Obat dan Alat Kesehatan di Gudang Farmasi Kabupaten
15	09	Penyediaan Obat dan BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) di Kab/Kota
15	10	Pembangunan Baru/Rehabilitasi dan/atau Penyediaan Sarana Pendukung Instalasi Farmasi Kab/Kota
16		Program Upaya Kesehatan Masyarakat
16	01	Pelayanan kesehatan penduduk miskin dipuskesmas dan jaringannya
16	02	Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan
16	03	Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya
16	04	Penyelenggaraan peneegahan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah
16	05	Perbaikan gizi mayarakat
16	06	revitalisasi sitem kesehatan
16	07	Pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan
16	08	Pengadaan peralatan dan perbekalan kesehatan termasuk obat generik esensial
16	09	Peningkatan kesehatan masyarakat
16	11	Peningkatan pelayanan kesehatan bagi pengungsi korban beneana
16	12	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan
16	13	penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan
16	14	Penyelenggaraan penyehatan lingkungan
16	15	Pelayanan Kesehatan dasar Puskesmas
16	16	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
16	17	Pembinaan kesehatan anak, remaja dan usila
16	18	Peningkatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah
16	20	Penyelenggaraan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan masyarakat
16	21	Pelayanan Kesehatan Dasar Program JKN
16	22	Peningkatan Puskesmas Rawat Inap Menjadi Puskesmas Rawat Inap Standar dan Rawat Inap Plus (BK)
16	23	Perluasan fungsi Polindes Menjadi Poskesdes (BK)
16	24	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) (DAK)
16	25	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat
16	29	Pembayaran luran Jaminan Kesehatan bagi Penduduk yang Didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dan /atau Pembayaran luran Kesehatan bagi Pekerja yang Terkena PHK
17		Program Pengawasan Obat dan Makanan
17	01	Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan
17	02	Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya
17	03	Peningkatan kapasitas laboratorium pengawasan obat dan makanan
17	04	Peningkatan penyidikan dan penegakan hukum di bidang obat dan makanan
17	05	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
18		Program Pengembangan Obat Asli Indonesia
18	01	fsilitasi pengembangan dan penelitian teknologi produksi tanaman obat
18	02	Pengembanganstandarisasi tanaman obat bahan alam indonesia
18	03	Peningkatan promosi obat bahan alam indonesia di dalam dan di luar negeri
18	04	Pengembangan sistem dan layanan informasi terpadu
18	05	Peningkatan kerjasama antar lembaga penelitian dan industri terkait


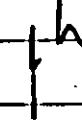


Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten Pem & Kesra	
Kabag Hukum	

Paraf Koordinasi	
Asisten _____	
PD Pemrakarsa	
PD Terkait	

KODE		PROGRAM DAN KEGIATAN
1		2
18	06	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
19		Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat
19	01	Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat
19	02	Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat
19	02	Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan
19	03	Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan
19	04	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
19	06	Peningkatan promosi dan pemberdayaan masyarakat
19	07	Pengembangan Desa Siaga
19	10	Pemilihan Posyandu Terbaik, Pemilihan Desa PHBS, Pemilihan Kader Remaja Sehat
19	11	Gerakan Promosi Sadar Hidup Sehat
19	12	Pelatihan UKS dan Dokter Kecil
19	13	Pengembangan Taman Posyandu
19	14	Pendampingan Poskestren
20		Program Perbaikan Gizi Masyarakat
20	01	Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi
20	02	Pemberian tambahan makanan dan vitamin
20	03	Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya
20	04	Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi
20	05	Peningkatan gizi lebih
20	06	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
20	07	Pengadaan MP-ASI dan Obat Penunjang Gizi
20	08	Penanganan Gizi Buruk pada Balita dan Ibu Hamil
20	09	Peningkatan Pemanfaatan ASI Eksklusif
20	10	Penurunan Stunting
21		Program Pengembangan Lingkungan Sehat
21	01	Pengkajian pengembangan lingkungan sehat
21	02	Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat
21	03	Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat
21	04	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
21	05	Penyelenggaraan Lingkungan Sehat
21	06	Pengembangan Kabupaten Sehat
21	07	Pengembangan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
21	08	Pengawasan dan Pengendalian Keamanan Pangan
21	13	Hygiene Sanitasi Air Bersih dan Air Minum
21	14	Pengembangan Rumah Sakit
22		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
22	01	Penyemprotan/fogging sarang nyamuk
22	02	Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging
22	03	Pengadaan vaksin penyakit menular
22	04	Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah
22	05	Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
22	06	Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik
22	07	Pemusnahan/karantina sumber penyebab penyakit menular
22	08	Peningkatan Imunisasi
22	09	Peningkatan surveillance epideminologi dan penanggulangan wabah
22	10	Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (kie) pencegahan dan pemberantasan penyakit
22	11	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
22	12	Pemberantasan Penyakit Menular
22	13	Pemberantasan Penyakit Kaki Gajah (Filariasis)
22	14	Pencegahan & Penanggulangan Penyakit Potensi KLB & Bencana
22	15	Pencegahan & Pemberantasan Diare-Ispa
22	16	Pencegahan & Pemberantasan HIV-AIDS/IMS

Paraf Hierarki		Paraf Kebutuhan	
Sekda	<input checked="" type="checkbox"/>	Asisten	<input checked="" type="checkbox"/>
Asisten Perencanaan & Kerja	<input checked="" type="checkbox"/>	PD Pemrakarsa	<input checked="" type="checkbox"/>
Kabag Hukum	<input checked="" type="checkbox"/>	PD Terkait	<input checked="" type="checkbox"/>

KODE		PROGRAM DAN KEGIATAN
1		2
22	17	Pencegahan dan Pemberantasan Rabies
22	18	Penanggulangan penyakit TBC Kusta
22	21	Pelayanan, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Malaria
22	22	Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular
22	23	Pelayanan Kesehatan Baik Kegiatan Promotif/Preventif maupun Kuratif/Rehabilitatif
22	24	Pengadaan Alat Kesehatan dan Bahan Habis Pakai Pengendalian Penyakit
23		Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
23	01	Penyusunan standar pelayanan kesehatan
23	02	Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan
23	03	Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan
23	04	Penyusunan naskah akademis standar pelayanan kesehatan
23	05	Penyusunan standar analisis belanja pelayanan kesehatan
23	06	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
23	07	Pengembangan Standarisasi Puskesmas
23	10	Peningkatan Puskesmas Rawat Inap Menjadi Puskesmas Rawat Inap Standar dan Rawat Inap Plus
23	11	Perluasan fungsi Polindes Menjadi Poskesdes
23	12	Peningkatan SDM Kesehatan
23	13	Peningkatan Sarana dan Regulasi Kesehatan
23	14	Akreditasi Puskesmas
23	15	Pelatihan Tenaga Kesehatan dan/atau Tenaga Administratif pada Fasilitas Kesehatan yang Bekerjasama dengan BPJS Kesehatan
24		Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
24	01	Pelayanan operasi katarak
24	02	Pelayanan kesehatan THT
24	03	Pelayanan operasi bibir sumbing
24	04	Pelayanan sunatan masal
24	05	Penanggulangan ISPA
24	06	Penanggulangan penyakit cacangan
24	07	Pelayanan kesehatan kulit dan kelamin
24	08	Pelayanan kesehatan akibat gizi buruk/busung lapar
24	09	Pelayanan kesehatan akibat lumpuh kayu
24	10	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
25		Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya
25	01	Pembangunan puskesmas
25	02	Pembangunan puskesmas pembantu
25	03	Pengadaan puskesmas perairan
25	04	Pengadaan puskesmas keliling
25	05	Pembangunan posyandu
25	06	Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas
25	07	Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas pembantu
25	08	Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas perairan
25	09	Pengadaan sarana dan Prasarana Puskesmas keliling
25	10	Pengadaan sarana dan prasarana posyandu
25	11	Pengadaan sarana dan prasarana keliling
25	12	Peningkatan puskesmas menjadi puskesmas rawat inap
25	13	Peningkatan puskesmas pembantu menjadi puskesmas
25	14	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas
25	15	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas pembantu
25	16	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas perairan
25	17	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas keliling
25	18	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana posyandu
25	19	Peningkatan puskesmas menjadi puskesmas rawat inap

Paraf Hierarki		Paraf Koordinasi	
Sekda		Asisten _____	
Asisten Pem & Kesra		PD Pemrakarsa	
Kabag Hukum		PD Terkait	

KODE		PROGRAM DAN KEGIATAN
1		2
25	20	Peningkatan puskesmas pembantu menjadi puskesmas
25	21	Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu
25	22	Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pclairan
25	23	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
25	25	Administrasi Pembangunan Puskesmas
25	26	Pengadaan peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas, Pustu dan Jaringannya
25	27	Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas, Pustu dan Jaringannya
25	28	Revitalisasi Alat Kesehatan Puskesmas
25	29	Puskesmas, Pustu dan Jaringannya
25	30	Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas (DAK)
25	31	Pembangunan Polindes/Poskesdes
25	32	Rehab Sedang/Berat Polindes/Poskesdes
25	33	Rehabilitasi Gedung Laboratorium Kesehatan Daerah
25	34	Pengadaan Peralatan Kesehatan (DAK)
25	35	Penyediaan/Pemeliharaan sarana pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang terkena penyakit akibat dampak konsumsi rokok dan penyakit lainnya
25	36	Rehabilitasi Instalasi Gudang Farmasi (DAK)
25	37	Pembangunan dan Rehabilitasi Bangunan Puskesmas Non Afirmasi dan Pendukungnya
25	38	Penyediaan Prasarana Puskesmas Non Afirmasi
25	39	Penyediaan Alat Kesehatan dan Peralatan serta Sistem Informasi Kesehatan Pendukung Puskesmas
25	40	Penyediaan/Peningkatan/Pemeliharaan Sarana/Prasarana Fasilitas Kesehatan yang Bekerja Sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
26		Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit pam-paru/rumah sakit mata
26	01	Pembangunan gedung kantor rumah sakit
26	02	Pembangunan ruang poliklinik rumah sakit
26	03	Pembangunan gudang obat/apotik
26	04	Penambahan ruang rawat inap rumah sakit (VVIP, VIP, Kelas I,II,III)
26	05	Pengembangan ruang gawat darurat
26	06	Pengembangan ruang ICU, ICCU, NICU
26	07	Pengembangan ruang operasi
26	08	Pengembangan ruang terapi
26	09	Pengembangan ruang isolasi
26	10	Pengembangan ruang bersalin
26	11	Pengembangan ruang inkubator
26	12	Pengembangan ruang bayi
26	13	Pengembangan ruang rontgen
26	14	Pengembangan ruang laboratorium rumah sakit
26	15	Pembangunan kamar jenazah
26	16	Pembangunan instalasi pengolahan limbah rumah sakit
26	17	Rehabilitasi bangunan rumah sakit
26	18	Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit
26	19	Pengadaan obat-obatan rumah sakit
26	20	Pengadaan ambulance/mobil jenazah
26	21	Pengadaan mebeleur rumah sakit
26	22	Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain)
26	23	Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit
26	24	Pengadaan pencetakan administrasi dan surat menyurat rumah sakit
26	25	Pengembangan tipe rumah sakit
26	26	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
26	27	Peningkatan Derajat Kesehatan dengan Penyediaan Fasilitas Perawatan

Paraf Hierarchy		Paraf Koordinator	
Sekda		Asisten _____	
Asisten Pem & Kesra		PD Pemrakarsa	
Kabag Hukum		PD Terkait	

KODE		PROGRAM DAN KEGIATAN
1		2
		Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok melalui Pengembangan Ruang Rawat Inap, pengadaan alat Kesehatan dan/atau pengadaan
26	29	Pelaksanaan Pengadaan Tanah
26	30	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK)
26	31	Pembangunan Gedung Sarana Penunjang
26	32	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Sakit Kab/Kota
26	33	Penyediaan Alat Kesehatan di Rumah Sakit Kab/Kota
26	38	Pembangunan Gedung Rawat Inap
26	39	Pengadaan Mekanikal Elektrikal Rumah Sakit
26	40	Pengadaan Alat Kesehatan
26	41	Penyediaan Peralatan Kesehatan di Fasilitas Kesehatan
26	42	Pengurukan dan Pematangan Lahan
26	43	Pembangunan Gedung Penunjang Rumah Sakit
26	44	Penyediaan Alat Kesehatan Rumah Sakit
27		Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa /rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
27	01	Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit
27	02	Pemeliharaan rutin/berkala ruang poliklinik rumah sakit
27	03	Pemeliharaan rutin/berkala gudang obat/apotik
27	04	Pemeliharaan rutin/berkala ruang rawat inap rumah sakit (VVIP, VIP, Kelas I,II,III)
27	05	Pemeliharaan rutin/berkala ruang gawat darurat
27	06	Pemeliharaan rutin/berkala ruang ICU, ICCU, NICU
27	07	Pemeliharaan rutin/berkala ruang operasi
27	08	Pemeliharaan rutin/berkala ruang terapi
27	09	Pemeliharaan rutin/berkala ruang isolasi
27	10	Pemeliharaan rutin/berkala ruang bersalin
27	11	Pemeliharaan rutin/berkala ruang inkubator
27	12	Pemeliharaan rutin/berkala ruang bayi
27	13	Pemeliharaan rutin/berkala ruang rontgen
27	14	Pemeliharaan rutin/berkala ruang laboratorium rumah sakit
27	15	Pemeliharaan rutin/berkala kamar jenazah
27	16	Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit
27	17	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit
27	18	Pemeliharaan rutin/berkala ambulance/mobil jenazah
27	19	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur rumah sakit
27	20	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah saldt
27	21	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
28		Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
28	01	kemitraan asuransi kesehatan masyarakat
28	02	kemitraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular
28	03	kemitraan pengolahan limbah rumah sakit
28	04	kemitraan alih teknologi kedokteran dan kesehatan
28	05	kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis
28	06	kemitraan pengobatan lanjutan bagi pasien rujukan
28	07	kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu
28	08	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
29		Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita
29	01	Penyuluhan kesehatan anak balita
29	02	Imunisasi bagi anak balita
29	03	Rekrutmen tenaga pelayanan kesehatan anak balita
29	04	Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita
29	05	Pembangunan sarana dan prasarana khusus pelayanan perawatan anak balita
29	06	Pembangunan panti asuhan anak terlantar balita
29	07	Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Paraf Hierarki		Paraf Koordinator	
Sekda	✓	Asisten	h
Asisten Pemda Kota	t	PD Pemrakarsa	t
Kabag Hukum	λ	PD Terkait	t

KODE		PROGRAM DAN KEGIATAN
1		2
29	08	Peningkatan Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak
30		Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia
30	01	Pelayanan pemeliharaan kesehatan
30	02	rekrutmen tenaga perawat kesehatan
30	03	Pendidikan dan pelatihan perawatan kesehatan
30	04	Pembangunan pusat-pusat pelayanan kesehatan
30	05	Pembangunan panti asuhan
30	06	Pelayanan kesehatan
30	07	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
30	08	Pengembangan dan Pemilihan Posyandu Lansia
30	09	Pelayanan Kesehatan Lansia
31		Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan
31	01	Pengawasan keamanan dan kesehatan makanan hasil industri
31	02	Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga
31	03	Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan restaurant
31	04	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
32		Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
32	01	Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu
32	02	Perawatan berkala bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu
32	03	Pertolongan persalinan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu
32	04	Jaminan Persalinan (Jampersal) DAK
32	05	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak
32	06	Pembinaan kesehatan anak dan remaja
32	08	Jaminan Persalinan (JAMPERSAL)
38		Program peningkatan mutu Pelayanan BLUD
38	01	Pelayanan dan pendukung pelayanan kesehatan
38	02	Pengadaan sarana dan prasarana rumah sakit
39		Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Kesehatan
39	01	Penyediaan/ Pemeliharaan Sarana Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat yang Terkena Penyakit Akibat Dampak Konsumsi Rokok dan Penyakit
39	02	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat Dengan Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok
39	03	Penyediaan/ Peningkatan/ Pemeliharaan Sarana/ Prasarana Fasilitas Kesehatan yang Bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
Urusan : 1.03. - PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
15		Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
15	01	Perencanaan pembangunan jalan
15	02	Survei kontur jalan dan jembatan
15	03	Pembangunan jalan
15	04	Perencanaan pembangunan jembatan
15	05	Pembangunan jembatan
15	06	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
15	07	Pembebasan Lahan untuk Pembangunan Jalan dan Jembatan
16		Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
16	01	Perencanaan Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
16	02	Survei kontur saluran drainase/gorong-gorong
16	03	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
16	04	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
16	05	Pemeliharaan Rutin Saluran Drainase Kota
16	06	Normalisasi saluran drainase
16	07	Operasional penyediaan sarana prasarana sanitasi
16	08	Perbaikan saluran Tutup (trotoar) Kota
17		Program Pembangunan turap/talud/brojong

Paraf Hierarki	
Sekda	<i>[Signature]</i>
Asisten Pem & Kesra	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>

Paraf Kelembagaan	
Asisten	<i>[Signature]</i>
PD Pemrakarsa	<i>[Signature]</i>
PD Terkait	<i>[Signature]</i>

KODE		PROGRAM DAN KEGIATAN
1		2
17	01	Perencanaan turap/talud/bronjong
17	02	Survei kemiringan lereng turap/talud/bronjong
17	03	Pembangunan turap/talud/bronjong
17	04	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
18		Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan
18	01	Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan
18	02	Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jembatan
18	03	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan
18	04	Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan
18	05	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
18	06	Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan
18	07	Inspeksi Kondisi Jalan
18	08	Inspeksi Kondisi Jembatan
18	09	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (DAK)
18	10	Peningkatan Jalan (DAK)
19		Program reabilitasi/pemelibaraan talud/bronjong
19	01	Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong
19	02	Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong
19	03	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
20		Program inspeksi kondisi Jalan dan Jembatan
20	01	Inspeksi kondisi Jalan
20	02	Inspeksi kondisi Jembatan
20	03	Evaluasi dan pelaporan
21		Program tanggap darurat Jalan dan Jembatan
21	01	Rehabilitasi jalan dalam kondisi tanggap darurat
21	02	Rehabilitasi jembatan dalam kondisi tanggap darurat
21	03	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
22		Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan
22	01	Penyusunan sistem informasi/data base jalan
22	02	Penyusunan sistem informasi/data base jembatan
22	03	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
23		Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
23	01	Pembangunan gedung balai latihan kebinamargaan
23	02	Pembangunan gedung workshop
23	03	Pembangunan laboratorium kebinamargaan
23	04	Pengadaan alat-alat berat
23	05	Pengadaan peralatan dan perlengkapan bengkel alat-alat berat
23	06	Pengadaan alat-alat ukur dan bahan labolatorium kebinamargaan
23	07	Rehabilitasi/pemeliharaan gedung balai latihan kebinamargaan
23	08	Rehabilitasi/pemeliharaan gedung workshop
23	09	Rehabilitasi/pemeliharaan laboratorium kebinamargaan
23	10	Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat bera
23	11	Rehabilitasi/pemeliharaan peralatan dan perlengkapan bengkel alat-alat berat
23	12	Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat ukur dan bahan labolatorium kebinamargaan
23	13	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
24		Program pengembangan dan pengelolaan jaringan Irigasi, rawa dan jaringan pengaliran lainnya
24	01	Perencanaan pembangunan jaringan irigasi
24	02	Perencanaan pembangunan jaringan air bersih/air minum
24	03	Perencanaan pembangunan reservoir
24	04	Perencanaan pembangunan pintu air
24	05	Perencanaan normalisasi saluran sungai
24	06	Pembangunan jaringan air bersih/air minum
24	07	Pembangunan reservoir

Paraf Hierarki		Paraf Koordinasi	
Sekda	6	Asisten _____	h
Asisten Pemb. Kasra	t	PD Pemrakarsa	f
Kabag Hukum	2	PD Terkait	

KODE		PROGRAM DAN KEGIATAN
1		2
24	08	Pembangunan pintu air
24	09	Pelaksanaan normalisasi saluran sungai
24	10	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan Irigasi
24	11	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan air bersih/air minum
24	12	Rehabilitasi/pemeliharaan reservoir
24	13	Rehabilitasi/pemeliharaan pintu air
24	14	Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai
24	15	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi yang telah dibangun
24	16	Rehabilitasi/pemeliharaan petani pemakai air
24	17	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
24	18	Peningkatan Jaringan Pengairan
24	20	Pemeliharaan Tata Guna Air
24	21	Program Kali Bersih
24	22	Rehabilitasi/Peningkatan Jaringan Irigasi
24	23	Rehabilitasi/Peningkatan Jaringan Irigasi (DAK)
24	24	Pembangunan Jaringan Irigasi
24	25	Perencanaan Aset Irigasi (PAI)
24	26	Pembangunan Jaringan Irigasi (DAK)
24	27	Peningkatan/Pembangunan Jaringan Irigasi dan Rawa (DAK)
24	28	Rehabilitasi Jaringan Irigasi dan Rawa (DAK)
25		Program penyediaan dan pengolahan air balm
25	01	Pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa
25	02	Rehabilitasi prasarana pengambilan dan saluran pembawa
25	03	Pemeliharaan prasarana pengambilan dan saluran pembawa
25	04	Pembangunan sumur-sumur air tanah
25	05	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air
25	06	Peningkatan distribusi penyediaan air baku
25	07	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
26		Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya
26	01	Pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya
26	02	Pemeliharaan dan rehabilitasi embung dan bangunan penampung air lainnya
26	03	Rehabilitasi kawasan kritis daerah tangkapan sungai dan danau
26	04	Rehabilitasi kawasan lindung daerah tangkapan sungai dan danau
26	05	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai, danau dan sumber daya air lainnya
26	06	Peningkatan konversi air tanah
26	07	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
26	08	Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai
26	09	Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai
27		Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
27	01	Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah
27	02	Penyediaan prasarana dan sarana air limbah
27	03	Pengembangan teknologi pengolahan air minum dan air limbah
27	04	Fasilitasi pembinaan teknik pengolahan air limbah
27	05	Fasilitasi pembinaan teknik pengolahan air minum
27	06	Pengembangan distribusi air minum
27	07	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air minum
27	08	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah
27	09	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
27	10	Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan
27	11	Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan (DAK)
27	12	Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih

Paraf Hierarki	<input checked="" type="checkbox"/>	Paraf Koordinasi	
Sckda	<input checked="" type="checkbox"/>	Asisten _____	<input checked="" type="checkbox"/>
Asisten Pem. & Kasra	<input checked="" type="checkbox"/>	PD Pemrakarsa	<input checked="" type="checkbox"/>
Kabag Hukum	<input checked="" type="checkbox"/>	PD Terkait	<input checked="" type="checkbox"/>

KODE		PROGRAM DAN KEGIATAN
1		2
28		Program pengendalian banjir
28	01	Pembangunan reservoir pengendali banjir
28	02	Rehabilitasi/pemeliharaan reservoir pengendali banjir
28	03	Rehabilitasi/pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai
28	04	Pengembangan pengelolaan daerah rawa dalam rangka pengendali banjir
28	05	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan banjir
28	06	Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai
28	07	Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali
28	08	Peningkatan pembangunan pusat-pusat pengendali banjir
28	09	Pembangunan prasarana pengaman pantai
28	10	Pembangunan tanggul pemecah ombak
28	11	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
29		Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
29	01	Perencanaan pengembangan infrastruktur
29	02	Pembangunan/peningkatan infrastruktur
29	03	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
29	04	Pembangunan Tugu Batas
29	05	Pembangunan/peningkatan infrastruktur KSCT (DAK)
29	06	Pemeliharaan rutin taman kota dan jalur hijau
30		Program pembangunan infrastruktur perdesaaan
30	01	Penataan lingkungan pemukiman penduduk perdesaaan
30	02	Pembangunan jalan dan jembatan perdesaaan
30	03	Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaaan
30	04	Pembangunan pasar perdesaaan
30	05	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaaan
30	06	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih perdesaaan
30	07	Rehabilitasi/pemeliharaan pasar perdesaaan
30	08	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
30	09	Monitoring dan Evaluasi Jalan dan Jembatan Perdesaaan
35		Program Perencanaan Tata Ruang
35	01	Penyusunan Kebijakan Tentang Penyusunan Tata Ruang
35	02	Penetapan Kebijakan Tentang RDTR, RTRK, Dan RTBL
35	03	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Tentang Rencana Tata Ruang
35	04	Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah
35	05	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan
35	06	Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan
35	07	Penyusunan Rencana Tata Bangunan Dan Lingkungan
35	08	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rtrw
35	09	Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Perencanaan Tata Ruang
35	10	Rapat Koordinasi Tentang Rencana Tata Ruang
35	11	Revisi Rencana Tata Ruang
35	12	Pelatihan Aparat Dalam Perencanaan Tata Ruang
35	13	Survey Dan Pemetaan
35	14	Koordinasi Dan Fasilitasi Penyusunan Rencana Tata Ruang Lintas Kabupaten/kota
35	15	Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Rencana Tata Ruang
35	16	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang RDTR
36		Program Pemanfaatan Ruang
36	01	Penyusunan Kebijakan Perizinan Pemanfaatan Ruang
36	02	Penyusunan Norma, Standar, Dan Kriteria Pemanfaatan Ruang
36	03	Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
36	04	Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pemanfaatan Ruang
36	05	Survey Dan Pemetaan
36	06	Pelatihan Aparat-Dalam Pemanfaatan Ruang

Paraf Hierarki		Paraf Koordinasi	
Sekda	✓	Asisten _____	h
Asisten Pem & Kas	t	PD Pemrakarsa	f
Kabag Hukum	l	PD Terkait	

KODE		PROGRAM DAN KEGIATAN
1		2
36	07	Sosialisasi Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur Dan Manual Pemanfaatan Ruang
36	08	Koordinasi Dan Fasilitasi Penyusunan Pemanfaatan Ruang Lintas Kabupaten/kota
36	09	Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pemanfaatan Tata Ruang
36	10	Fasilitasi Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH)
37		Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
37	01	Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
37	02	Penyusunan Prosedur Dan Manual Pengendalian Pemanfaatan Ruang
37	03	Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang
37	04	Pelatihan Aparat Dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang
37	05	Pengawasan Pemanfaatan Ruang
37	06	Koordinasi Dan Fasilitasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Lintas Kabupaten/kota
37	07	Sosialisasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
37	08	Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan
37	09	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang
Urusan : 1.04. - PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
15		Program Pengembangan Perumahan
15	01	Penetapan kebijakan, strategu dan program perumahan
15	02	Penyusunan norma, standar, pedoman, dan manual (NSPM)
15	03	Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan
15	04	Sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang perumahan
15	05	Koordinasi pembangunan perumahan dengan lembaga/badan usaha
15	06	Fasilitasi dan simulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu
15	07	Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat
15	08	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
16		Program Lingkungan Sehat Perumahan
16	01	Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan tentang pembangunan perumahan
16	02	Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin
16	03	Penyuluhan dan pengawasan kualitas lingkungan sehat perumahan
16	04	Pengendalian dampak resiko pencemaran lingkungan
16	05	Penetapan kebijakan dan strategi penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang
16	06	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
16	07	Operasional program peningkatan kualitas pemukiman (P2KP)
16	08	Fasilitasi dan stimulasi perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH)
16	09	Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman (DAK)
17		Program Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman
17	01	Fasilitasi pemberian kredit mikro untuk pembangunan dan perbaikan perumahan
17	02	Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar permukiman berbasis masyarakat
17	03	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan perumahan
17	04	Peningkatan sistem pemberian kredit pemilikan rumah
17	05	Sosialisasi dan fasilitasi jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum
17	06	Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan
17	07	Pembangunan Jalan Lingkungan

Paraf Hierarki	
Sekda	✓
Asisten Sekda	+
Kabag Hukum	8

Paraf Koordinasi	
Asisten	h
PD Pemrakarsa	f
PD Teknis	

KODE		PROGRAM DAN KEGIATAN
1		2
17	08	Pengadaan Bahan Infrastruktur Perdesaan
17	09	Peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum
17	10	Monitoring, evaluasi & pelaporan
17	11	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bantuan Keuangan Desa
17	12	Operasional Program Kotaku
18		Program Pembinaan Lingkungan Sosial bidang Sarana Prasarana Permukiman
18	01	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan, Saluran Air Limbah, Sanitasi dan Air Bersih
18	02	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan/atau Jembatan, Pasar, Sarana/ Prasarana Pendukung Pariwisata
1.05. - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		
15		Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan
15	01	Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan
15	02	Pembangunan Pos Jaga/ Ronda
15	03	Pelatihan Pengendalian Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan
15	04	Pengendalian Kebisingan Dan Gangguan Dari Kegiatan Masyarakat
15	05	Pengendalian Keamanan Lingkungan
15	06	Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan
15	07	Fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)
15	08	Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)
15	09	Monitoring Orang Asing
15	21	Dukungan Kegiatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)
15	22	Dukungan Kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)
15	25	Penertiban hewan ternak kaki 4 (empat)
15	27	Penertiban anak jalanan, gelandangan dan pengemis
15	28	Penertiban perizinan
15	29	Penertiban pedagang kaki lima (PKL)
15	30	Pengamanan hari-hari besar keagamaan
15	31	Pengamanan dan pengawalan pejabat
15	34	Patroli lingkungan
15	35	Pengawasan dan Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban
15	36	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban
16		Program Pemeliharaan Ketentraman, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Kriminal
16	01	Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban
16	02	Penyelidikan dan Penyidikan Pelanggaran Perda
16	03	Peningkatan Penanganan Pelanggaran Perda
16	04	Pembinaan, Penyuluhan dan Pengawasan Pelaksanaan Perda
19		Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban Dan Keamanan
19	01	Pembentukan Satuan Keamanan Lingkungan Di Masyarakat
19	02	Pembentukan satuan keamanan lingkungan dalam memonitoring keberadaan Linmas
19	03	Pembinaan aparatur Linmas dalam memberdayakan masyarakat untuk pemeliharaan trantibum
19	04	Pembinaan Satuan Linmas Kabupaten Pacitan dalam pengamanan situasi lingkungan darurat dan siaga bencana
19	15	Pengamanan Daerah
19	16	Operasional dan Pembinaan LINMAS
19	17	Operasional dan Pembinaan SAR LINMAS
22		Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
22	01	Pemantauan Dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam
22	02	Pengadaan Tempat Penampungan Sementara Dan Evakuasi Penduduk Dari Ancaman/ Korban Bencana Alam
22	03	Pengadaan Sarana Dan Prasarana Evakuasi Penduduk Dari Ancaman/

Paraf Hierarki	
Sekda	✓
Asisten Pem & Desa	+
Kabag Hukum	g

Paraf Koordinasi	
Asisten _____	h
PD Pemrakarsa	f
PD Terkait	

KODE		PROGRAM DAN KEGIATAN
1		2
		Korban Bencana Alam
22	04	Pengadaan Logistik Dan Obat-obatan Bagi Penduduk Di Tempat Penampungan Sementara
22	05	Sosialisasi Edukasi Penanggulangan Bencana
22	06	Pusdalops
22	07	Bantuan tanggap darurat bencana
22	08	Tim pengkajian dan analisa bantuan pasca bencana
22	09	Pelatihan relawan desa tangguh bencana
22	10	Pelatihan rescue satgas bencana (SAR)
22	11	Pengadaan seragam TRC (Tim Reaksi Cepat)
22	12	Rapat koordinasi penanggulangan bencana
22	13	Penanganan darurat bencana daerah
22	14	Bantuan rekonstruksi pasca bencana
22	15	Inventarisasi potensi rehabilitasi wirausaha bagi korban bencana
22	16	Koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pasca bencana
22	17	Bimbingan teknis keterampilan industri rumah tangga untuk mendukung ekonomi keluarga bagi korban bencana
22	18	Bimbingan teknis pengurangan dampak psikologis dan pembekalan dasar bencana bagi korban bencana
22	19	Inventarisasi dan verifikasi rekonstruksi pasca bencana
22	20	Bimbingan teknis DALA pasca bencana
22	21	Pelatihan dan simulasi penggunaan sarana dan prasarana bencana bidang kedaruratan
22	22	Pembuatan masterpiece becana
22	23	Peralatan Perlengkapan Penanggulangan Bencana
22	24	Fasilitasi relawan penanggulangan bencana
22	25	Peningkatan Kapasitas Desa Tangguh Bencana
22	26	Fasilitasi Posko Penanggulangan Bencana
22	27	Penyusunan Rencana Kontijensi Penanggulangan Bencana
22	28	Fasilitasi Forum PRB
22	29	Peningkatan SDM dan Operasional Tim Reaksi Cepat (TRC)
22	30	Pelatihan Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA)
22	31	Pendataan, Verifikasi dan Penyaluran Bantuan Pasca Bencana
22	32	Penanganan Masalah Bencana Alam
22	33	Fasilitasi Tim Reaksi Cepat (TRC)
27		Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
27	01	Posko Siaga Asap
27	02	Bimbingan Teknis Peningkatan Kemampuan PBK
27	03	Peningkatan Kemampuan PBK
27	05	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kehakaran (PMK)
27	06	Pendidikan Kehakaran dan Pelatihan Pertolongan dan Pencegahan Kehakaran
27	15	Penyuluhan Pencegahan Bahaya Kehakaran
27	16	Operasional Pelaksanaan Kegiatan Pemadam Kehakaran (PMK)
Urusan : 1.06. - SOSIAL		
15		Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
15	01	Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) Petugas dan Pedamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin
15	02	Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi Keluarga Miskin
15	03	Fasilitas Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin
15	04	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha Bagi Keluarga Miskin




Paraf Hierarki	
Sekda	✓
Asisten Pem. & Kesra	✓
Kabag Hukum	✓

Paraf Koordinasi	
Asisten	h
PD Pemrakarsa	f
PD Terkait	f

KODE		PROGRAM DAN KEGIATAN
1		2
15	05	Pelatihan Keterampilan Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
15	06	Bantuan Gizi Bagi Lansia Non Produktif dan Produktif
15	07	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
15	08	Monitoring KUBE Usaha Ekonomi Produksi dan Bantuan Langsung Bahan Bangunan Rumah (BBR)
15	09	Bimbingan Teknis Pengurus KUBE
15	10	Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan Jaminan Sosial Usia (JSU)
15	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Bedah Kampung
15	12	Pendataan dan Pembinaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)
15	13	Pengadaan Sarana dan Prasarana Bedah Rumah
15	14	Lomba KUBE Berprestasi
15	15	Verifikasi dan Validasi Data Rumah Tidak Layak Huni
15	16	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Mandiri
15	17	Pembinaan KUBE Pedesaan dan Perkotaan
15	18	Monitoring Raskin
15	19	Pembangunan Pemberdayaan Daerah Terpencil dan Tertinggal P2DT2
15	20	Pengembangan Bakat dan Ketrampilan Anak Berkebutuhan Khusus
15	21	Verifikasi dan Validasi Data Penerima Bantuan Sosial
15	22	Peningkatan Koordinasi dan Pengendalian Bantuan Pangan Masyarakat Miskin
15	23	Penanganan dan Pemberdayaan Fakir Miskin
15	24	Peningkatan Koordinasi dan Pengendalian Bantuan bagi Masyarakat Miskin
15	25	Pelestarian Nilai-nilai Kepahlawanan dan Kejuangan
15	26	Pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial
16		Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
16	01	Pengembangan Kebijakan Tentang Akses Sarana Dan Prasarana Publik Bagi Penyandang Cacat Dan Lansia
16	02	Pelayanan Dan Perlindungan Sosial, Hukum Bagi Korban Eksploitasi, Perdagangan Perempuan Dan Anak
16	03	Pelaksanaan Kie Konseling Dan Kampanye Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (pmks)
16	04	Pelatihan Keterampilan Dan Praktek Belajar Kerja Bagi Anak Terlantar Termasuk Anak Jalanan, Anak Cacat, Anak Nakal
16	05	Pelayanan Psikososial Bagi Pmks Di Trauma Centre Termasuk Bagi Korban Bencana
16	06	Pembentukan Pusat Informasi Penyandang Cacat Dan Trauma Center
16	07	Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana Dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS
16	08	Penyusunan Kebijakan Pelayanandan Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
16	09	Koordinasi Perumusan Kebijakan Dan Sikronisasi Pelaksanaan Upaya-upaya Penanggulangan Kemiskinan Dan Penurunan Kesenjangan
16	10	Penanganan Masalah-masalah Strategis Yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat Dan Kejadian Luar Biasa
16	11	Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan
16	12	Pembinaan Panti Sosial
16	13	Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Raskin
16	14	Pemutahiran Data Penyandang Cacat
16	15	Pelaksanaan Sosialisasi Penyandang Cacat Berat Bagi Perangkat Desa di Kabupaten Pacitan
16	16	Pengembangan Kualitas Aparatur Kesejahteraan Sosial
16	17	Pengendalian Pelaksanaan Program Keserasian Sosial
16	18	Sosialisasi Pembentukan Lembaga Perlindungan Anak (LPA)
16	19	Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Penerima Program Penyandang Cacat Berat

Paraf Hierarki		Paraf Koordinasi	
Sekda	✓	Asisten	h
Asisten Pen & Kesra	t	PD Pemrakarsa	h
Kebag Hukum	h	PD Terkait	




KODE		PROGRAM DAN KEGIATAN
1		2
16	20	Pelayanan Psikologis Bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
16	21	Penanganan Orang Terganggu Mental, Gepeng dan WTS
16	22	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Panti Sosial
16	23	Rehabilitasi Taman Makam Pahlawan Nasional
16	24	Pelaksanaan KIE Penyuluhan HIV/AIDS
16	25	Bantuan Sembako Bagi Penyandang Cacat Berat
16	26	Keserasian Sosial
16	27	Pemulangan Orang Terlantar dan Pemakaman
16	28	Pemberdayaan Ekonomi Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran
16	29	monitoring Monitoring Dalam Rangka Penyediaan Asuransi Kesejahteraan Sosial
16	30	Penanganan Orang Terganggu Mental dan Gepeng
16	31	Pengadaan Alat-alat Kesehatan Bagi Penyandang Cacat
16	32	Lembaga Perlindungan Anak (LPA)
16	33	Monitoring dan Evaluasi Disabilitas Orang Dengan Kecacatan (ODK) Berat
16	34	Monitoring dan Evaluasi Disabilitas Lanjut Usia
16	35	Pelaksanaan Penyaluran Beras Raskin Untuk Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM)
16	36	Monitoring dan Evaluasi Dalam Rangka Penyediaan Asuransi Kesejahteraan Sosial
16	37	Pelaksanaan Kegiatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Mandiri
16	38	Pengendalian Verifikasi Sosial Masyarakat
16	39	Pembinaan dan Bimbingan Teknis Petugas Sosial Kecamatan
16	40	Sosialisasi Penanganan Kekerasan Terhadap Anak Dalam Wilayah Kabupaten Pacitan
16	41	Praktek Belajar Kerja Untuk Orang Dengan Lanjut Usia Dalam Wilayah Kabupaten Pacitan
16	42	Pembinaan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia
16	43	Fasilitasi dan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas
16	44	Fasilitasi dan Rehabilitasi Sosial Anak
16	45	Pelayanan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Terlantar
16	46	Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial dan Penyandang Tuna Sosial
16	47	Penanggulangan Bencana Alam Berbasis Masyarakat
16	48	Penanggulangan dan Penanganan Bencana Sosial
16	49	Penyelenggaraan Perlindungan dan Jaminan Sosial
16	50	Penguatan Program Keluarga Harapan
20		Program Pembinaan eks-Penyandang Penyakit Sosial (eks-Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)
20	01	Pendidikan Dan Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial
20	02	Pembangunan Pusat Bimbingan/ Konseling Bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial
20	03	Pemantauan Kemajuan Perubaban Sikap Mental Eks Penyandang Penyakit Sosial
20	04	Pemberdayaan Eks Penyandang Penyakit Sosial
20	05	Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan
20	06	Perlindungan Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum
21		Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
21	01	Peningkatan Peran Aktif Masyarakat Dan Dunia Usaha
21	02	Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku-pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat
21	03	Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat
21	04	Pengembangan Model Kelembagaan Perlindungan Sosial
21	05	Pembinaan Nilai-nilai Kepahlawanan dan Kejuangan




Paraf Hierarki	Paraf Koordinasi	
Sekda	Asisten _____	  
Asisten Pem & Kesra	PD Pemrakarsa	
Kabag Hukum	PD Terkait	

KODE		PROGRAM DAN KEGIATAN
1		2
21	06	Pemberdayaan Peran Aktif Karang Taruna Dalam Dunia Usaha
21	07	Monitoring Administrasi Karang Taruna di 12 Kecamatan
21	08	Kerjasama Pelaku Usaha Kesejahteraan Masyarakat
21	09	Pengendalian Pelaksanaan Program Keluarga Harapan
21	10	Pembinaan dan Pengumpulan Uang/Barang (PUB)
21	11	Pengembangan Kapasitas Kelompok Usaha Bersama
21	12	Pembinaan Karang Taruna dan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)
21	13	Pelaksanaan Seleksi Karang Taruna dan PSM
21	14	Pelaksanaan Seleksi Organisasi Sosial
21	15	Kajian Kebijakan tentang Kemitraan Pemkab. Pacitan dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial
21	16	Pengembangan Jaringan Kerja Lintas Pelaksana Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
21	17	Revitalisasi Website
21	18	Publikasi Kegiatan di Dinas Sosial Kab. Pacitan
21	19	Pengembangan Kapasitas Anak Putus Sekolah
21	20	Pendataan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
21	21	Pembentukan Desa Siaga Bencana
21	22	Pemutakhiran Data PMKS
21	23	Operasional Program Keluarga Harapan (PKH)
21	24	Pengembangan Pelayanan Kesos
21	25	Pemberdayaan Kelembagaan Kesos
21	26	Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku-pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat
21	27	Pengembangan Publikasi dan Penyuluhan Sosial
21	28	Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial
21	29	Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial
Urusan : 1.09. - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI		
Urusan : 2.01. - TENAGA KERJA		
15		Program Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja
15	01	Penyusunan Data Base Tenaga Kerja Daerah
15	02	Pembangunan Balai Latihan Kerja
15	03	Pengadaan Peralatan Pendidikan Dan Keterampilan Bagi Pencari Kerja
15	04	Peningkatan Profesionalisme Tenaga Keahlian Dan Instruktur Blk
15	05	Pengadaan Bahan Dan Materi Pendidikan Dan Keterampilan Kerja
15	06	Pendidikan Dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja
15	07	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Dan Prasarana BLK
15	08	Rehabilitasi Sedang/ Herat Sarana Dan Prasarana BLK
15	09	Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan
15	10	Dukungan operasional Balai Latihan Kerja (BLK)
15	11	Pelatihan berbasis kompetensi
15	12	Pelatihan berbasis masyarakat
15	13	Penguatan Sarana Dan Prasarana Kelembagaan Pelatihan Bagi Tenaga Kerja Industri Hasil Tembakau Di Balai latihan Kerja
15	14	Pelatihan masyarakat untuk peningkatan SDM
15	15	Fasilitas Penempatan Tenaga Kerja Melalui Mekanisme AKL, AKAD dan AKAN
15	16	Penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dalam rangka pementasan kemiskinan, mengurangi pengangguran dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, dilaksanakan antara lain melalui
15	17	Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan
15	18	Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakkan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja
15	19	Penetapan Upah Minimum Kabupaten
16		Program Pembinaan Lingkungan Sosial Ketenagakerjaan

Paraf Hierarki		Paraf Koordinator	
Sekda	7	Asisten	
Asisten Pam. & Kesra	t	PD Pemrakarsa	
Kabag Hukum	2	PD Terkait	

KODE		PROGRAM DAN KEGIATAN
1		2
16	01	Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat, Penguatan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Pelatihan, serta Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerj
16	02	Penguatan Ekonomi Masyarakat Melalui Kegiatan Padat Karya yang Dapat Mengentaskan Kemiskinan, Mengurangi Pengangguran, dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah
16	03	Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat
16	04	Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja bagi Pencari Kerja
Urusan : 2.02. - PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
16		Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak
16	01	Advokasi Dan Fasilitasi Pug Bagi Perempuan
16	02	Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2)
16	03	Pemetaan Potensi Organisasi Dan Lembaga Masyarakat Yang Berperan Dalam Pemberdayaan Perempuan Dan Anak
16	04	Pengembangan Materi Dan Pelaksanaan Kie Tentang Kesetaraan Dan Keadilan Gender (kkg)
16	05	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak
16	06	Peningkatan Kapasitas Dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan Dan Anak
16	07	Evaluasi Pelaksanaan Pug
16	08	Pengembangan Sistem Informasi Gender Dan Anak
16	09	Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan
16	10	Peningkatan Peranan Perempuan Dalam Pembangunan
16	11	Workshop Peningkatan Peran Perempuan Dan Pengambilan Keputusan
16	12	Sosialisasi Kabupaten Layak Anak
16	13	Pengadaan Sarana dan Prasarana P2TP2A
16	14	Peningkatan Kapasitas Keanggotaan Pokja PUG
16	15	Sosialisasi P2TP2A
16	16	Fasilitasi Forum Anak Kabupaten dan Kecamatan
16	17	Peningkatan SDM Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak
16	18	Peningkatan SDM Forum Anak Kabupaten dan Kecamatan
16	19	Peningkatan Ketrampilan dan Pemenuhan Hak Anak
16	20	Pendataan Siswa Rawan Bermasalah
16	21	Evaluasi Anugrah Parahita Ekapraya (APE)
17		Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan
17	01	Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan Di Daerah
17	02	Pelatihan Bagi Pelatih (tot) Sdm Pelayanan Dan Pendampingan Korban Kdr
17	03	Penyusunan Sistem Perlindungan Bagi Perempuan
17	04	Sosialisasi Dan Advokasi Kebijakan Penghapusan Buta Aksara Perempuan (pbap)
17	05	Sosialisasi Dan Advokasi Kebijakan Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan
17	06	Sosialisasi Sistem Pencatatan Dan Pelaporan Kdr
17	07	Penyusunan Profil Perlindungan Perempuan Lansia Dan Cacat
17	08	Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan
17	09	Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan
17	10	Fasilitasi dan advokasi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak
17	11	Peningkatan SDM Pelaksanaan P2TP2A
17	12	Peningkatan SDM Tim Pokja PPTPPO (Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang)
17	13	Evaluasi, Monitoring dan Tindak Lanjut Kasus Perempuan dan Anak

Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten Pen & Kesra	
Kabag Hukum	

Paraf Koordinasi	
Asisten	
PD Pemrakarsa	
PD Terkait	

KODE		PROGRAM DAN KEGIATAN
1		2
17	14	Pendampingan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak
18		Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan
18	01	Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan
18	02	Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender
18	03	Kegiatan Penyuluhan Bagi Ibu Rumah Tangga Dalam Membangun Keluarga Sejahtera
18	04	Kegiatan Bimbingan Manajemen Usaha Bagi Perempuan Dalam Mengelola Usaha
18	05	Kegiatan Pameran Hasil Karya Perempuan Di Bidang Pembangunan
18	06	Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan
18	07	Fasilitasi Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS)
18	08	Pembinaan Organisasi Perempuan
18	09	Bimbingan Ketrampilan dan Manajemen Usaha Bagi Perempuan
18	10	Sosialisasi Kekerasan Terhadap Anak
18	11	Sosialisasi Kesehatan Reproduksi
Urusan : 2.03. - PANGAN		
15		Program Peningkatan Ketahanan Pangan
15	01	Penanganan Daerah Rawan Pangan
15	02	Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan Daerah
15	03	Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan
15	04	Pengembangan Cadangan Pangan Daerah
15	05	Fasilitasi Pengembangan Lumbung Pangan Desa
15	06	Fasilitasi Dewan Ketahanan Pangan
15	07	Peningkatan Mutu Pangan
15	08	Peningkatan Keamanan Pangan
15	09	Pemantauan dan Analisis Akses Pangan Pokok
15	10	Pemantauan dan Analisis Rantai Pasokan dan Pemasaran Pangan
15	11	Analisis dan Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)
15	12	Peningkatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan
15	13	Penyusunan dan Analisis Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi
15	14	Penyusunan Data Base Potensi Produk Pangan
15	15	Pengembangan Model Distribusi Pangan yang Efisien
15	16	Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif
15	17	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Ketahanan Pangan
15	18	Analisis Ketahanan Pangan Daerah
15	19	Optimalisasi Lahan Pekarangan
15	20	Analisis Distribusi Pangan
15	21	Pengembangan Sumber Pangan Alternatif
15	22	Penyuluhan Pangan
Urusan : 2.04. - PERTANAHAN		
16		Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
16	01	Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah
16	02	Penyuluhan Hukum Pertanahan
16	03	Penyusunan Data Base Pertanahan
16	04	Penyelesaian Sengketa Pertanahan
16	05	Pensertifikatan Tanah Aset Pemerintah Daerah
16	06	Sosialisasi dan Fasilitasi Pensertifikatan Tanah
Urusan : 2.05. - LINGKUNGAN HIDUP		
15		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Paraf Hierarki	Paraf Koordinasi
Sekda	Asisten _____
Asisten Pem. & Kesra	PD Pemrakarsa
Kabag Hukum	PD Terkait

KODE		PROGRAM DAN KEGIATAN
1		2
15	01	Penyusunan Kebijakan Manajemen Pengelolaan Sampah
15	02	Penyediaan Prasarana Dan Sarana Pengelolaan Persampahan
15	03	Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan
15	04	Peningkatan Operasi Dan Pemeliharaan Prasarana Dan Sarana Persampahan
15	05	Pengembangan Teknologi Pengolahan Persampahan
15	06	Bimbingan Teknis Persampahan
15	07	Peningkatan Kemampuan Aparat Pengelolaan Persampahan
15	08	Kerjasama Pengelolaan Persampahan
15	09	Kerjasama Pengelolaan Sampah Antar Daerah
15	10	Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan
15	11	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan
15	12	Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan
15	13	Pengolahan Sampah (DAK)
15	14	Alat Pengumpul dan Pengangkut Sampah (DAK)
16		Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup
16	01	Koordinasi Penilaian Kota Sehat/adipura
16	02	Koordinasi Penilaian Langit Biru
16	03	Pemantauan Kualitas Lingkungan
16	04	Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup
16	05	Koordinasi Penertiban Kegiatan Pertambangan Tanpa Izin (peti)
16	06	Pengelolaan B3 Dan Limbah B3
16	07	Pengkajian Dampak Lingkungan
16	08	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Pertambangan
16	09	Peningkatan Peringkat Kinerja Pemsahaan (proper)
16	10	Koordinasi Pengelolaan Prokasih/superkasih
16	11	Pengembangan Produksi Ramah Lingkungan
16	12	Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup
16	13	Koordinasi Penyusunan Amdal
16	14	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup
16	15	Pengkajian Pengembangan Sistem Insentif Dan Disinsentif
16	16	Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan
16	17	Penyediaan Sarana dan Prasarana Teknis
16	18	Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan (Adiwiyata)
16	19	Percepatan Sanitasi Pemukiman
16	20	Pengembangan Teknologi Energi Alternatif
16	21	Peningkatan Kapasitas Laboratorium Lingkungan
16	22	Koordinasi Penilaian/Pemilihan Kalpataru
16	23	Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Lingkungan Hidup
16	24	Standar Pelayanan Minimum Emisi Sumber Tidak Bergerak dan Air Limbah Industri
16	25	Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Sektor Persampahan
16	26	Jasa Akreditasi Laboratorium Lingkungan
16	27	Kaji Daya Dukung dan Daya Tampung
16	28	Koordinasi Penilaian Adiwiyata di Kabupaten Pacitan
16	29	Pengujian Emisi Kendaraan Bermotor
16	30	Pengujian Emisi Udara Akibat Aktifitas Industri
16	31	Pengujian Kadar Polusi Limbah Padat dan Limbah Cair
16	32	Pembangunan Tempat Pembuangan Benda Padat/Cair yang Menimbulkan Polusi
16	33	Penyuluhan dan Pengendalian Polusi dan Pencemaran
16	34	IPAL Usaha Skala Kecil (DAK)
17		Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Alam
17	01	Konservasi Sumber Daya Air Dan Pengendalian Kerusakan Sumber-sumber Air

Paraf Hierarki		Paraf Koordinator	
Sekda	7	Asisten _____	h
Asisten Per. & Kesra	4	PD Pemrakarsa	f
Kabag Hukum	2	PD Terkait	







KODE		PROGRAM DAN KEGIATAN
1		2
17	02	Pantai Dan Laut Lestari
17	03	Pengembangan Dan Pemantapan Kawasan Konservasi Laut, Suaka Perikanan, Dan Keanekaragaman Hayati Laut
17	04	Pengembangan Ekowisata Dan Jasa Lingkungan
17	05	Pengendalian Dampak Perubaban Iklim
17	06	Pengendalian Kerusakan Hutan Dan Lahan
17	07	Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air Dan Sumber-sumber Air
17	08	Pengendalian Dan Pengawasan Pemanfaatan Sda
17	09	Koordinasi Pengelolaan Konservasi Sda
17	10	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Dan Ekosistem
17	11	Pengembangan Dan Pengelolaan Kawasan World Heritage Laut
17	12	Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut Regional
17	13	Koordinasi Pengendalian Kebakaran Hutan
17	14	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan Dan Konservasi Sda
17	15	Koordinasi Peningkatan Pengelolaan Kawasan Konservasi
17	16	Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan
17	17	Penetapan Status Kerusakan Lahan Untuk Produksi Biomassa
17	18	Peralatan Laboratorium (DAK)
24		Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
24	01	Penyusunan Kebijakan, Norma, standard Prosedur Dan Manual Pengelolaan Rth
24	02	Sosialisasi Kebijakan, Norma, Standard, Prosedur Dan Manual Pengelolaan Rth
24	03	Penyusunan Dan Analisis Data/informasi Pengelolaan Rth
24	04	Penyusunan Program Pengembangan Rth
24	05	Penataan Rth
24	06	Pemeliharaan Rth
24	07	Pengembangan Taman Rekreasi
24	08	Pengawasan Dan Pengendalian Rth
24	09	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Rth
24	10	Monitoring Dan Evaluasi
24	11	Pengelolaan Taman Kehati
24	12	Peningkatan Sarana dan Prasarana Hutan Kota (DAK)
25		Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Lingkungan Hidup
25	01	Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan Hidup Bagi Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau dan/atau Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Tembakau
25	02	Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan Hidup bagi Masyarakat di Lingkungan Industri (DHBCHT)
Urusan : 2.06. - ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
15		Program Penataan Administrasi Kependudukan
15	01	Pembangunan Dan Pengoperasian Siak Secara Terpadu
15	02	Pelatihan Tenaga Pengelola Siak
15	03	Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, Updating, Dan Pemeliharaan)
15	04	Pembentukan Dan Penataan Sistem Koneksi (inter-phase Tahap Awal) Nik
15	05	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan
15	06	Pengolahan Dalam Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan
15	07	Penyediaan Informasi Yang Dapat Diakses Masyarakat
15	08	Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan
15	09	Pengembangan Data Base Kependudukan
15	10	Penyusunan Kebijakan Kependudukan
15	11	Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan Dan Catatan Sipil

Paraf Hierarki		Paraf Koordinasi	
Sekda	✓	Asisten _____	h
Asisten Pen & Kesa	t	PD Pemrakarsa	f
Kabag Hukum	2	PD Terkait	

KODE		PROGRAM DAN KEGIATAN
1		2
15	12	Sosialisasi Kebijakan Kependudukan
15	13	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kependudukan
15	14	Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan
15	15	Menyetor laporan bulanan penduduk
15	16	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk
15	17	Sosialisasi Administrasi Kependudukan
15	18	Laporan Cakupan Pelayanan Pencatatan Sipil
15	19	Pengembangan Wawasan Administrasi Kependudukan
15	20	Pendataan Warga Negara Asing
15	22	Penyusunan Profil Kependudukan
15	23	Bimbingan Teknis Perbaikan Data NIK pada DPT Kab. Banyuasin
15	25	Pelayanan dan Perekaman KTP Elektronik Keliling
15	28	Sosialisasi Pencatatan Kawin Massal Agama Non Muslim
15	29	Percepatan Penerapan E-KTP
15	30	Penyusunan dan Pengembangan Indikator Kependudukan
15	31	Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan
15	32	Razia Tertib Administrasi Kependudukan
15	33	Peningkatan Pelayanan Akta Catatan Sipil
15	34	Sosialisasi dan Pelaksanaan Kartu Identitas Anak (KIA)
15	35	Penataan dan Pengelolaan Arsip
15	36	Pengadaan Perangkat Cetak KIA
15	37	Pengadaan Perlengkapan Cetak KTP-el dan Blangko Kependudukan
15	38	Pelayanan Proaktif Kepada Masyarakat
15	39	Advokasi dan Pendampingan Kepengurusan Akte Kelahiran yang Terlambat (SILADES)
15	40	Pelayanan dan Perekaman KTP-el di Dcsa/Kelurahan
15	41	Penyusunan Laporan Adminduk
15	42	Sosialisasi Pelayanan dan Laporan Pencatatan Sipil
15	43	Operasional Tim Pelayanan Dokumen Kependudukan
15	44	Pengelolaan Pemanfaatan Data Kependudukan
15	45	Pengolahan dan Pengoperasional SIAK Secara Terpadu
15	46	Penataan dan Pengelolaan Dokumen Kependudukan
15	47	Sosialisasi Kebijakan Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi Masyarakat (DAK)
15	48	Penerbitan Dokumen Kependudukan (DAK)
15	49	Penerbitan Dokumen Kependudukan (DAK)
15	50	Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) (DAK)
15	51	Konsolidasi Data Kependudukan dan Peralatan SIAK
15	52	Penataan dan Pengelolaan Arsip Kependudukan

Urusan : 2.07. - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

15		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
15	01	Pemberdayaan Lembaga Dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
15	02	Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Tenaga Teknis Dan Masyarakat
15	03	Penyelenggaraan Diseminasi Informasi Bagi Masyarakat Desa
15	04	Penilaian Desa, Kinerja Pengurus LPM, KPM Berprestasi
15	05	Penyusunan Data Profil Desa/Kelurahan
15	07	Pembinaan/ Penataan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan
15	13	Pembinaan Kelompok Masyarakat Membangun Desa
15	14	Bimtek Fungsi dan Peran LPMD
15	15	Peningkatan Peran Kader Pemberdayaan Masyarakat
15	16	Expo Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan
15	20	Penyusunan Data Desa Tertinggal

Paraf Hierarki	Paraf Koordinasi
Sekda 	Asisten 
Asisten Pem & Kesra 	PD Pemrakarsa 
Kabag Hukum 	PD Terkait 

KODE		PROGRAM DAN KEGIATAN
1		2
15	21	Pembinaan / Penataan Desa / Kclurahan Swakarya
15	22	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemberdayaan Masyarakat
15	23	Program Jalin Matra Provinsi Jawa Timur
15	24	Penguatan Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPM/LPMD)
16		Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
16	01	Pelatihan Ketrampilan Usaha Budidaya Tanaman
16	02	Pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa
16	03	Pelatihan Ketrampilan Usaha Industri Kerajinan
16	04	Pelatihan Ketrampilan Usaha Pertanian Dan Perternakan
16	05	Fasilitasi Permodalan Bagi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Perdesaan
16	06	Fasilitasi Kemitraan Swasta Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Pedesaan
16	07	Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan
16	08	Sosialisasi dan Orientasi Penggunaan UED-SP
16	09	Sosialisasi Dan Pelatihan Pola Pengelolaan Limbah Industri Dalam Menjaga Kelestarian Kawasan Usaha Mikro Kecil
16	10	Gelar Teknologi Tepat Guna
16	11	Gelar Teknologi Tepat Guna Provinsi
16	15	Pembinaan/Penataan Posyantekdes dan Wartekdes
16	17	Sosialisasi Pemanfaatan TTG
16	18	Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG) Perdesaan dan Gelar TTG
16	19	Pembinaan, Penataan dan Penilaian Pasar Desa/Penataan dan Penilaian Pasar Desa
16	20	Pembinaan Usaha Ekonomi Masyarakat/Penataan dan Peningkatan Usaha Ekonomi Masyarakat
16	21	Pembinaan Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan (P2B)
16	22	Peningkatan Usaha Ekonomi Masyarakat (PUEM)
16	23	Pemberdayaan KRTP dalam Usaha Ekonomi Produktif
17		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
17	01	Pembinaan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa
17	02	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa
17	03	Pemberian Stimulan Pembangunan Desa
17	04	Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan
17	05	Pembinaan Kelompok Masyarakat dalam Pembangunan Desa
17	06	Penilaian Paud dan UP2K
17	07	Pelatihan Kader PKBN, Pola Asuh dan Kadarkum
17	08	Pelatihan Bina Keluarga Balita (BKB)
17	09	Seminar Tentang Peran Pcrempuan dalam Pembangunan
17	10	Lomba Cipta Menu Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA)
17	11	Lomba Masak Serba Ikan
17	14	Monitoring dan Evaluasi Program PKK
17	15	Pelatihan Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K)
17	16	Jambore Kader Posyandu
17	17	PMT Ibu Hamil, Bayi atau Balita Gizi Kurang atau Buruk dan Penderita TB Paru
17	18	Pertemuan Revitalisasi Pencatatan dan Pelaporan bagi Kelompok Dasawisma
17	19	Pelatihan Bordir
17	20	Pemanfaatan Perkarangan
17	21	Sosialisasi Keamanan Pangan
17	22	Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)
18		Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
18	01	Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan
18	02	Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Pengelolaan

Paraf Hierarki		Paraf Koordinasi	
Sekda	7	Asisten	h
Asisten Pembantu	6	PD Pemrakarsa	f
Kabag	2	PD Turkuat	

KODE		PROGRAM DAN KEGIATAN
1		2
		Keuangan Desa
18	03	Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa
18	04	Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan
18	05	Pembinaan, Penataan, Penilaian Administrasi Keuangan Serta Kekayaan/Aset Desa
18	05	Monitoring Evaluasi Pembangunan dan Rehab Kantor Desa
18	07	Perumusan, Penyusunan dan Penelitian Kebijakan Pemerintah Desa
18	08	Fasilitasi dan Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa/Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
18	09	Fasilitasi dan Pembinaan Badan Permusyawaratan Desa/Peningkatan Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa
18	10	Peningkatan Kapasitas Aparatur dalam Penataan dan Administrasi Desa
18	11	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa
18	12	Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa
18	13	Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
19		Program Peningkatan Peran Perempuan Di Perdesaan
19	01	Pelatihan Perempuan Di Perdesaan Dalam Bidang Usaha Ekonomi Produktif
19	02	Peningkatan Kesejahteraan Keluarga
Urusan : 2.08. - PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
15		Program Keluarga Berencana
15	01	Penyediaan Pelayanan Kb Dan Alat Kontrasepsi Bagi Keluarga Miskin
15	02	Pelayanan Kie
15	03	Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu
15	04	Promosi Pelayanan Khiba
15	05	Pembinaan Keluarga Berencana
15	06	Pengadaan Sarana Mobilitas Tim Kb Keliling
15	07	Pengadaan Sarana Prasarana Pengelolaan Program KB (DAK)
15	08	Peningkatan Partisipasi Pria dalam KB dan Kesehatan Reproduksi (KR)
15	09	Penunjang Kegiatan Hari Keluarga Nasional (HARGANAS)
15	10	Peningkatan Kapasitas Kader Tribina
15	11	Bantuan Operasional KB (DAK)
15	12	Fasilitasi Kelompok Paguyuban KB Pria
15	13	Fasilitasi Kampung KB
15	14	Pembinaan KB Perusahaan
15	15	Penyediaan Pelayanan Alat, Obat dan Kontrasepsi (ALOKON)
16		Program Kesehatan Reproduksi Remaja
16	01	Advokasi Dan Kie Tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (krr)
16	02	Memperkuat Dukungan Dan Partisipasi Masyarakat
17		Program Pelayanan Kontrasepsi
17	01	Pelayanan Konseling Kb
17	02	Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi Kb
17	03	Pengadaan Alat Kontrasepsi
17	04	Pelayanan Kb Medis Operasi
17	05	Pengadaan Peralatan Medis KB
18		Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri
18	01	Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli Kb
18	02	Operasional Kelompok Masyarakat Peduli KB
18	03	Koordinasi Pengelola Program
18	04	Pemberdayaan Ekonomi Keluarga
18	05	Pengelolaan data dan Informasi KB
18	06	Perlindungan Asuransi Jiwa

Paraf Hierarki		Paraf Koordinasi	
Sekda	✓	Asisten _____	h
Asist. Pem & Kesra	h	PD Pemrakarsa	t
Kabag Hukum	h	PD Terkait	

KODE		PROGRAM DAK KEGIATAN
1		2
18	07	Study Banding
18	08	Lomba Keluarga Harmonis, IMP, dan PKB Teladan
18	09	Pemutakhiran Data Keluarga
18	10	Sosialisasi Pencatatan dan Pelaporan
18	11	Penyebarluasan Data dan Informasi KB
18	12	Sosialisasi Peningkatan Kualitas Lingkungan Keluarga (PKLK)
18	13	Sosialisasi Kelompok UPPKS
18	14	Fasilitasi Kelompok UPPKS
18	15	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Kelompok BKB, BKR, BKL, dan UPPKS (Pos Daya)
20		Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi Dan Konselling KRR
20	01	Pendirian Pusat Pelayanan Informasi Dan Konseling Kkr
20	02	Fasilitasi Forum Pelayanan Kkr Bagi Kelompok Remaja Dan Kelompok Sebaya Diluar Sekolah
20	03	Pembinaan PIK KRR
23		Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga
23	01	Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga Di Kecamatan
23	02	Pelatihan kader dan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan
24		Program Pengembangan Model Operasional BKB Posyandu Paud
24	01	Pengkajian Pengembangan Model Operasional BKB posyandu-padu

Urusan : 2.09. - PERHUBUNGAN

15		Program Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan
15	01	Perencanaan Pembangunan Prasaranan Dan Fasilitas Perhubungan
15	02	Penyusunan Norma, Kebijakan, Standar Dan Prosedur Bidang Perhubungan
15	03	Koordinasi Dalam Pembangunan Prasaranan Dan Fasilitas Perhubungan
15	04	Sosialisasi Kebijakan Di Bidang Perhubungan
15	05	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Jembatan Timbang
15	06	Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Sungai, Danau Dan Penyebrangan
15	07	Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat
15	08	Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan
15	10	Review Perencanaan Pembangunan Dermaga Sebalik
15	11	Intensifikasl PAD Bidang Perhubungan
15	12	Fasilitasi Pelayanan Bidang Perhubungan
16		Program Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Prasarana Dan Fasilitas LLAJ
16	01	Rehabilitasi/pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor
16	02	Rehabilitasi/pemeliharaan Prasarana Balai Pengujian Kendaraan Bermotor
16	03	Rehabilitasi/pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Jembatan Timbang
16	04	Rehabilitasi/pemeliharaan Terminal/pelabuhan
16	05	Pemeliharaan Traffic Light (APILL)
17		Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
17	01	Kegiatan Penyuluhan Bagi Para Sopir/juru Mudi Untuk Peningkatan Keselamtan Penumpang
17	02	Kegiatan Peningkatan Disiplin Masyarakat Menggunakan Angkutan
17	03	Kegiatan Temu Wicara Pengelola Angkutan Umum Guna Meningkatkan Keselamatan Penumpang
17	04	Kegiatan Uji Kelayakan Saran Transportasi Guna Keselamtan Penumpang
17	05	Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum Di Jalan Raya
17	06	Kegiatan Penciptaan Keamanan Dan Kenyamanan Penumpang Dilingkungan-Treminal

Paraf hierarki	
Sekda	<i>[Signature]</i>
Asisten Pem & Kesra	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>

Paraf Koordinasi	
Asisten	<i>[Signature]</i>
PD Pemrakarsa	<i>[Signature]</i>
PD Terkait	<i>[Signature]</i>

KODE		PROGRAM DAN KEGIATAN
1		2
17	07	Kegiatan Pengawasan Peralatan Keamanan Dalam Keadaan Darurat Dan Perlengkapan Pertolongan Pertama
17	08	Kegiatan Penataan Tempat-tempat Pemberhentian Angkutan Umum
17	09	Kegiatan Penciptaan Disiplin Dan Pemeliharaan Kebersihan Di Lingkungan Terminal
17	10	Kegiatan Penciptaan Layanan Cepat, Tepat, Murah Dan Mudah
17	11	Pengumpulan Dan Analisis Data Base Pelayanan Jasa Angkutan
17	12	Pengembangan Sarana Dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan
17	13	Fasilitasi Perijinan Di Bidang Perhubungan
17	14	Sosialisasi/penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas Dan Angkutan
17	15	Kegiatan Pemilihan Dan Pemberian Penghargaan Sopir/juru Mudik/awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan
17	16	Koordinasi Dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan
17	17	Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan
17	18	Pengumpulan data base Bidang Perhubungan
18		Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Perhubungan
18	01	Pembangunan Gedung Terminal
18	02	Pembangunan Halte Bus, Taxi Gedung Terminal
18	03	Pembangunan Jembatan penyebrangan Gedung Terminal
18	04	Pengembangan pelayanan perhubungan laut
19		Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
19	01	Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas
19	02	Pengadaan Marka Jalan
19	03	Pengadaan Pagar Pengaman Jalan
19	04	Pembangunan Sarana Pengendali dan Pengaman Lalu Lintas (DAK)
19	05	Pengendalian dan Penanggulangan Kecelakaan Lalu Lintas
19	06	Pemeliharaan Rutin Penerangan Jalan Umum (PJU)
19	07	Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU)
19	08	Pembangunan Sarana Pengendali dan Pengaman Lalu Lintas
Urusan : 2.10. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
20		Program Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan berbasis Teknologi Informatika
20	01	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi
20	02	Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi
20	03	Peningkatan Layanan Akses Teknologi Informatika
20	04	Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa Melalui Implementasi E-Procurement
20	05	Pengembangan e-gov
20	06	Fasilitasi Pelayanan Bidang Komunikasi dan Informatika
21		Program Penyebarluasan Informasi Publik dan kerjasama media massa
21	01	Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi
21	02	Penyebarluasan Informasi yang Bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat
21	03	Penyebarluasan Informasi Melalui media cetak dan elektronik
21	04	Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi
Urusan : 2.11. - KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH		
15		Program Penciptaan Iklim Usaha Mikro yang Kondusif
15	01	Penyusunan Kebijakan Tentang Usaha Kecil Menengah
15	02	Sosialisasi Kebijakan Tentang Usaha Kecil Menengah
15	03	Fasilitasi Kemudahan Formalisasi Badan Usaha Kecil Menengah
15	04	Pendirian Unit Penanganan Pengaduan
15	05	Pengkajian Dampak Regulasi/ Kebijakan Nasional
15	06	Perencanaan, Koordinasi Dan Pengembangan Usaha Kecil Menengah
15	07	Pengembangan Jaringan Infrastruktur Usaha Kecil Menengah
15	08	Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah

Peraf Hierarki		Paraf Koordinasi	
Sekda	✓	Asisten _____	h
Asisten Per & Kasra	✓	PD Pemrakarsa	f
Kabag Hukum	✓	PD Terkait	

KODE		PROGRAM DAN KEGIATAN
1		2
15	09	Fasilitasi Permasalahan Proses Produksi Usaha Kecil Menengah
15	10	Pemberian Fasilitas Pengamanan Kawasan Usaha Kecil Menengah
15	11	Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan
15	12	Fasilitasi Pengembangan Usaha Mikro
16		Program Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro
16	01	Fasilitasi Pengembangan Inkubator Teknologi Dan Bisnis
16	02	Memfasilitasi Peningkatan Kemitraan Investasi Usaha Kecil Menengah Dengan Perusahaan Asing
16	03	Memfasilitasi Peningkatan Kemitraan Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
16	04	Peningkatan Kerjasama Di Bidang Hakl
16	05	Fasilitasi Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi
16	06	Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan
16	07	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ Kud
16	08	Sosialisasi Hakl Kepada Usaha Mikro Kecil Menengah
16	09	Sosialisasi Dan Pelatihan Pola Pengelolaan Limbah Industri Dalam Menjaga Kelestarian Kawasan Usaha Mikro Kecil Menengah
16	10	Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan
16	11	Pameran Produk Unggulan
16	12	Pemanfaatan Fasilitas Pemerintah untuk UMKM dan Koperasi sebagai Penunjang Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT)
17		Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
17	01	Sosialisasi Dukungan Informasi Penyediaan Permodalan
17	02	Pengembangan Klaster Bisnis
17	03	Koordinasi Pemanfaatan Fasilitas Pemerintah Untuk Usaha Kecil Menengah Dan Koperasi
17	04	Koordinasi Penggunaan Dana Pemerintahan Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
17	05	Pemantauan Pengelolaan Penggunaan Dana Pemerintahan Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
17	06	Pengembangan Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil Menengah
17	07	Peningkatan Jaringan Kerjasama Antar Lembaga
17	08	Penyelenggaraan Pembinaan Industri Rumah Tangg, Industri Kecil Dan Industri Menengah
17	09	Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah
17	10	Pengembangan Kebijakan Dan Program Peningkatan Ekonomi Lokal
17	11	Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan
17	12	Fasilitasi Dana Bergulir
17	13	Pemanfaatan fasilitas pemerintah untuk UMKM dan Koperasi sebagai penunjang Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT)
17	14	Validasi Database UMKM
17	15	Fasilitasi Permodalan
17	16	Perluasan Akses Permodalan
17	17	Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UMKM
18		Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
18	01	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Dan Program Pembangunan Koperasi
18	02	Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pendidikan Dan Pelatihan Perkoperasian
18	03	Pembangunan Sistem Informasi Perencanaan Pengembangan Perkoperasian
18	04	Sosialisasi Prinsip-prinsip Pemahaman Perkoperasian
18	05	Permbinaan, Pengawasan Dan Penghargaan Koperasi Berprestasi
18	06	Peningkatan Dan Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha Koperasi
18	07	Penyebaran Model-model Pola Pengembangan Koperasi
18	08	Rintisan Penerapan Teknologi Sederhana/ Manajemen Modern Pada

Paraf Hierarki	
Sekda	<i>[Signature]</i>
Asisten Sekda	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>

Paraf Koordinasi	
Asisten	<i>[Signature]</i>
PD Pemrakarsa	<i>[Signature]</i>
PD Terkait	<i>[Signature]</i>

KODE		PROGRAM DAN KEGIATAN
1		2
		Jenis-jenis Usaha Koperasi
18	09	Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan
18	10	Pembinaan kelembagaan koperasi
18	11	Diklat Teknis Perkoperasian
18	12	Penilaian Kesehatan KSP/USP
Urusan : 2.12. - PENANAMAN MODAL		
15		Program Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi
15	01	Peningkatan Fasilitas Terwujudnya Kerjasama Strategis Antar Usaha Besar Dan Usaha Kecil Menengah
15	02	Pengembangan Potensi Unggulan Daerah
15	03	Fasilitasi Dan Koordinasi Percepatan Pembangunan Kawasan Produksi Daerah Tertinggal (p2kpdt)
15	04	Koordinasi Antar Lembaga Dalam Pengendalian Pelaksanaan Investasi Pmdn/ Pma
15	06	Peningkatan Koordinasi Dan Kerjasama Di Bidang Penanaman Modal Dengan Instansi Pemerintah Dan Dunia Usaha
15	07	Pengawasan Dan Evaluasi Kinerja Dan Aparatur Badan Penanaman Modal Daerah
15	08	Peningkatan Kegiatan Pemananaan, Pembinaan Dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
15	09	Peningkatan Kualitas Sdm Gima Peningkatan Pelayanan Investasi
15	10	Penyelenggaraan pameran Investasi
15	11	Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan
16		Program Peningkatan Ilmu Investasi Dan Realisasi Investasi
16	01	Penyusunan Kebijakan Investasi Bagi Pembangunan Fasilitas Infrastruktur
16	02	Memfasilitasi Dan Koordinasi Kerjasama Di Bidang Investasi
16	03	Penyusunan Cetak Biru (master Plan) Pengembangan Penanaman Modal
16	04	Pengembangan System Informasi Penanaman Modal
16	05	Penyusunan Sistem Informasi Penanaman Modal Di Daerah
16	06	Penyederhanaan Prosedur Perijinan Dan Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal
16	07	Kajian Kebijakan Penanaman Modal
16	08	Pemberian Insentif Investasi Di Wilayah Tertinggal
16	09	Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan
16	10	Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal
16	11	Penatalaksanaan Penyelenggaraan PTSP
16	12	Peningkatan Pelayanan Publik di Bidang Perijinan
16	13	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi
16	14	Peningkatan Manajemen Investasi Daerah Kab. Pacitan
Urusan : 2.13. - KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
16		Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
16	01	Pembinaan Organisasi Kepemudaan
16	02	Pendidikan Dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan
16	03	Fasilitasi Aksi Bhakti Sosial Kepemudaan
16	04	Fasilitasi Pekan Temu Wicara Organisasi Pemuda
16	05	Penyuluhan Pencegahan Penggunaan Narkoba Dikalangan Generasi Muda
16	06	Lomba Kreasi Dan Kaya Tulis Ilmiah Dikalangan Pemuda
16	07	Pembinaan Pemuda Pelopor Keamanan Lingkungan
16	08	Pameran Prestasi Hasil Karya Pemuda
16	09	Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan

Paraf Hierarki	
Sekda	✓
Asisten Sekda	✓
Kabag Hukum	✓




Paraf Koordinasi	
Asisten	h
PD Pemrakarsa	f
PD Terkait	



KODE		PROGRAM DAN KEGIATAN
1		2
16	10	Pembinaan dan Pengiriman PASKIBRAKA
16	11	Pembinaan Kepemudaan
20		Program Pembinaan Dan Pemasyarakatan Olahraga
20	01	Pelaksanaan Identifikasi Bakat Dan Potensi Pelajar Dalam Olahraga
20	02	Pelaksanaan Identifikasi Dan Pengembangan Olahraga Unggulan Daerah
20	03	Pembibitan Dan Pembinaan Olahragawan Berbakat
20	04	Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi Di Tingkat Daerah
20	05	Peningkatan Kesegaran Jasmani Dan Rekreasi
20	06	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga
20	07	Pemassalan Olahraga Bagi Pelajar, Mahasiswa Dan Masyarakat
20	08	Pemberian Penghargaan Bagi Insan Olahraga Yang Berdedikasi Dan Berprestasi
20	09	Pengembangan Dan Pemanfaatan Iptek Olahraga Sebagai Pendorong Peningkatan Pretasi Olahraga
20	10	Pengembangan Olahraga Lanjut Usia Termasuk Penyandang Cacat
20	11	Pengembangan Olahraga Rekreasi
20	12	Peningkatan Jaminan Kesejahteraan Bagi Masa Depan Atlet, Pelatih Dan Teknisi Olahraga
20	13	Peningkatan Jumlah Kualitas Serta Kompetensi Pelatih, Peneliti, Praktisi Dan Teknisi Olahraga
20	14	Pembinaan Olahraga Yang Berkembang Di Masyarakat
20	15	Peningkatan Manajemen Organisasi Olahraga Tingkat Perkumpulan Dan Tingkat Daerah
20	16	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dan Dunia Usaha Dalam Pendanaan Dan Pembinaan Olahraga
20	17	Kerjasama Peningkatan Olahragawan Berbakat Dan Berprestasi Dengan Lembaga/ Instansi Lainnya
20	18	Pemeliharaan rutin dan berkala sarana dan prasarana olah raga
20	19	Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
Urusan : 2.14. - STATISTIK		
15		Program Pengembangan Data/informasi/statistik Daerah
15	01	Penyusunan Dan Pengumpulan Data Dan Statistik Daerah
15	02	Pengolahan, Updiating Dan Analisis Data Dan Statistik Daerah
15	03	Penyusunan Dan Pengumpulan Data PDRB
15	04	Pengolahan, updating dan analisis data PDRB
15	05	Penyusunan Data Statistik Sektoral
Urusan : 2.15. - PERSANDIAN		
15		Program Penyelenggaraan Persandian Daerah
15	01	Pengadaan, Pemeliharaan Peralatan Persandian dan Peningkatan Kapasitas Personil Persandian
Urusan : 2.16. - KEBUDAYAAN		
15		Program Pengembangan Nilai Budaya
15	01	Pelestarian Dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah
15	02	Penatagunaan Naskah Kuno Nusantara
15	03	Penyusunan Kebijakan Tentang Budaya Lokal Daerah
15	04	Pemanataan Dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Nilai Budaya
15	05	Pemberian Dukungan, Penghargaan Dan Kerjasama Di Bidang Budaya
16		Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
16	01	Fasilitas Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya
16	02	Pelestarian Fisik Dan Kandungan Bahan Pustaka Termasuk Naskah Kuno

Paraf Hierarki	
Sekda	✓
Asisten Pem & Kesra	✓
Kabag Hukum	✓

Paraf Koordinasi	
Asisten _____	h
PD Pemrakarsa	f
PD Terkait	

KODE		PROGRAM DAN KEGIATAN
1		2
16	03	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Kekayaan Budaya Lokal Daerah
16	04	Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Budaya Lokal Daerah
16	05	Pengelolaan Dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum Dan Peninggalan Bawah Air
16	06	Pengembangan Kebudayaan Dan Pariwisata
16	07	Pengembangan Nilai Dan Geografi Sejarah
16	08	Perekaman Dan Digitalisasi Bahan Pustaka
16	09	Perumusan Kebijakan Sejarah Dan Purbakala
16	10	Pengawasan, Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pelaksanaan Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
16	11	Pendukung Pengelolaan Museum Dan Taman Budaya Di Daerah
16	12	Pengelolaan Karya Cetak Dan Karya Rekam
16	13	Pengembangan Data Base Sistem Informasi Sejarah Purbakala
17		Program Pengelolaan Keragaman Budaya
17	01	Pengembangan Kesenian Dan Kebudayaan Daerah
17	02	Penyusunan Sistem Informasi Data Base Bidang Kebudayaan
17	03	Penyelenggaraan Dialog Kebudayaan
17	04	Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya Daerah
17	05	Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah
17	06	Seminar Dalam Rangka Revitalisasi Dan Reaktualisasi Budaya Lokal
17	07	Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pelaksanaan Pengembangan Keanekaragaman Budaya
Urusan : 2.17. - PERPUSTAKAAN		
15		Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
15	10	Monitoring, evaluasi dan pelaporan perpustakaan
15	11	Pengelolaan dan pendistribusian bahan pustaka
15	12	Pemeliharaan rutin/ berkala bahan pustaka
15	13	Pengembangan data base
15	14	Pengembangan sarana dan prasarana perpustakaan
15	15	Pelayanan perpustakaan
15	16	Rehabilitas sedang/ berat bangunan rumah kaca
15	17	Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar
15	18	Pelaksanaan koordinasi pengembangan perpustakaan
15	19	Penyelenggaraan koordinasi pengembangan budaya baca
15	20	Pelayanan Perpustakaan Keliling
15	21	Pembinaan Perpustakaan
15	22	Pengembangan Minat Budaya Baca
15	23	Pengadaan Perangkat Pelayanan Perpustakaan
15	24	Pengembangan Koleksi Perpustakaan
Urusan : 2.18. - KEARSIPAN		
15		Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
15	01	Pembangunan Data Base Informasi Kearsipan
15	02	Pengumpulan Data
15	03	Pengklasifikasikan Data
15	04	Penyusunan Sistem Katalog Data
15	05	Pengadaan Sarana Penyimpanan
15	06	Kajian Sistem Administrasi Kearsipan
15	07	Pemeliharaan Peralatan Jaringan Informasi Kearsipan
15	08	Pembinaan Arsip Desa
15	09	Bimbingan Teknis Kearsipan Perangkat Daerah
16		Program Penyelamatan Dan Pelestarian Dokumen/arsip Daerah
16	01	Pengadaan Sarana Pengolahan Dan Penyimpanan Arsip
16	02	Pendataan Dan Penataan Dokumen/arsip Daerah

Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten Pem & Kasra	
Kabag Hukum	

Paraf Koordinasi	
Asisten _____	
PD Pemrakarsa	
PD Terkait	

KODE		PROGRAM DAN KEGIATAN
1		2
16	03	Penduplikatan Dokumen/arsip Daerah Dalam Bentuk Informatika
16	04	Pembangunan Sistem Keamanan Penyimpanan Data
16	05	Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah
17		Program Pemeliharaan Rutin/berkala Sarana Dan Prasarana Kerasipan
17	01	Pemeliharaan Rutin/berkala Sarana Pengolahan Dan Penyimpanan Arsip
17	03	Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Kondisi Situasi Data
Urusan : 3.01. - KELAUTAN DAN PERIKANAN		
20		Program Pengembangan Budidaya Perikanan
20	01	Pengembangan Bibit Ikan Unggul
20	02	Pendampingan Pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan
20	03	Pembinaan Dan Pengembangan Perikanan
20	04	Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Budidaya
20	05	Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya.
20	06	Pengembangan Sarana dan Prasarana Balai Benih Ikan (BBI)
20	07	Pengembangan Balai Benih Ikan (BBI)
20	08	Pengembangan Keramba Jaring Apung yang Berwawasan Lingkungan
20	09	Peningkatan Kapasitas Kelompok Penerima Bantuan Sosial
20	10	Pengembangan Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan Budidaya
20	11	Peningkatan Produksi Budidaya Perikanan Air Payau dan Ikan Hias Air Tawar
20	12	Pengembangan Pos Pelayanan Ikan Terpadu
20	13	Pembinaan Kelompok Penerima Bantuan Sosial
20	14	Pembangunan Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan (DAK)
20	15	Anty Poverty Program (APP) Bidang Perikanan
20	16	Pengembangan Unit Pembenihan Rakyat (UPR)
20	17	Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar
20	18	Optimalisasi Unit Pembenihan Rakyat (UPR)
20	19	Pengembangan Budidaya Ikan Air Tawar
20	20	Pengembangan Budidaya Ikan Minapadi
20	21	Pengembangan Budidaya Ikan Air Payau
20	22	Pengembangan Budidaya Ikan Air Laut
20	23	Optimalisasi Sarana dan Prasarana Tambak
20	24	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan (UPTD Kabupaten/Kota)
20	25	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Skala Kecil Masyarakat Pembudidaya Ikan
20	26	Optimalisasi pelayanan kesehatan ikan dan lingkungan
20	27	Pengembangan Unit Pembenihan Rakyat (UPR)
21		Program Pengembangan Perikanan Tangkap
21	01	Pendampingan Pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap
21	02	Pembangunan Tempat Pelelangan Ikan
21	03	Pemeliharaan Rutin/berkala Tempat Pelelangan Ikan
21	04	Rehabilitasi Sedang/berat Tempat Pelelangan Ikan
21	05	Pengembangan Lembaga Usaha Perdagangan Perikanan Tangkap
21	06	Operasional Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
21	07	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendaratan Ikan (DAK)
21	08	Pengembangan Sarana dan Prasarana TPI
21	09	Peningkatan Kapasitas Kelompok Penerima Bantuan Sosial
21	10	Pengadaan Sarana dan Alat Bantu Penangkapan Ikan
21	11	Pengembangan Prasarana Perikanan Tangkap
21	12	Pelatihan Pengembangan Perikanan Tangkap
21	13	Restocking Ikan dan Pembinaan Kelompok di Pcirairan Umum
21	14	Pengembangan Sarana Penangkapan Ikan (DAK)
21	15	Peningkatan Kapasitas KUB dan POKMASWAS



Paraf Hierarki	
Sekda	6
Asisten Pem & Kesra	4
Kabag Hukum	1




Paraf Koordinasi	
Asisten	
PD Pemrakarsa	
PD Terkait	

KODE		PROGRAM DAN KEGIATAN
1		2
21	16	Pemberdayaan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan
21	17	Pembangunan Pos Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan
21	18	Pendataan Sarana Perikanan Tangkap
21	19	Penataan Lingkungan Desa Pesisir
21	20	Pemberdayaan Nelayan Melalui Peningkatan Identitas dan Kelembagaan Nelayan
21	21	Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Pengawas Pcirairan Umum
21	22	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
21	23	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Skala Kecil Masyarakat Nelayan
21	24	Optimalisasi Pendataan Perikanan Tangkap
21	25	Restocking Ikan dan Pembmaan Pokmaswas
23		Program Optimalisasi Pengelolaan Produksi Perikanan
23	01	Kajian Optimalisasi Pengelolaan Dan Pemasaran Produksi Perikanan
23	02	Pembinaan Kelompok Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
23	03	Kegiatan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN)
23	04	Pengadaan Sarana Pengolahan, Peningkatan Mutu dan Pemasaran Hasil Perikanan
23	05	Sosialisasi Bahaya Penggunaan Bahan-bahan Kimia pada Pengolahan Produk Perikanan
23	06	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengolahan dan Pemasaran
23	07	Pelatihan Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Produk Hasil Perikanan
23	08	Sosialisasi Forikan (Forum Peningkatan Konsumsi Ikan).
23	09	Pengadaan Bahan Informasi, Produk Olahan Perikanan
23	10	Peningkatan Kapasitas Kelompok Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.
23	11	Bimbingan Teknis Pelaku Utama Perikanan
23	12	Optimalisasi Kelembagaan Pelaku Usaha
23	13	Peningkatan Mutu Hasil Perikanan
23	14	Promosi Produk Perikanan
23	15	Pengawasan Mutu Produk Perikanan
23	16	Pelatihan Pengolahan Ikan
23	17	Bimbingan Teknis Peningkatan SDM Pengelola Tempat Pelelangan Ikan
23	18	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Skala Kecil Masyarakat KP Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan
23	19	Inventarisasi dan identifikasi pengolahan hasil perikanan
27		Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Perikanan
27	01	Sosialisasi dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan Regulasi Bidang Kelautan dan Perikanan
27	02	Fasilitasi Bidang Kelautan dan Perikanan
27	03	Penyusunan Sistem Informasi Perikanan
27	04	Pendampingan Program Sertifikasi Hak Atas Tanah Masyarakat Perikanan
27	05	Pembinaan Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir
27	06	Pendampingan Program Nasional Minapolitan dan PNPM M-KP
27	07	Kegiatan Penataan Lingkungan Desa Pesisir
27	08	Penyusunan Profil Desa Pesisir Kabupaten Pacitan
27	09	Penyusunan Studi Kelayakan Pengembangan PPI
27	10	Penyusunan profil desa pesisir dan kelembagaan KUB dan Pokmaswas
27	11	Pemberdayaan nelayan melalui peningkatan kapasitas dan kelembagaan KUB
27	12	Bimbingan teknis peningkatan SDM pengelola tempat pelelangan ikan
27	13	Pemberdayaan pengelolaan tempat pelelangan ikan
Urusan : 3.02. - PARIWISATA		
15		Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Paraf Hierarki		Paraf Koordinasi	
Sekda	✓	Asisten	h
Asisten Pemb & Kece	h	PD Pemrakarsa	f
Kabag	h	PD Terkait	

KODE		PROGRAM DAN KEGIATAN
1		2
15	01	Analisa Pasar Untuk Promosi Dan Pemasaran Objek Pariwisata
15	02	Penin gkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Pemasaran Pariwisata
15	03	Pengembangan Jaringan Kerja Sama Promosi Pariwisata
15	04	Koordinasi Dengan Sektor Pendukung Pariwisata
15	05	Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara Di Dalam Dan Di Luar Negeri
15	06	Pemantauan Dan Evaluas Pelaksanaan Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
15	07	Pengembangan Statistik Kepariwisataan
15	08	Pelatihan Pemandu Wisata Terpadu
15	09	Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri
15	10	Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Pemasaran Pariwisata
16		Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
16	01	Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan
16	02	Peningkatan Pembangunan Sarana Dan Perasarana Pariwisata (DAK)
16	03	Pengembangan Jenis Dan Paket Wisata Unggulan
16	04	Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Objek Pariwisata Dengan Lembaga/dunia Usaha
16	05	Pemantauan Dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Destinasi Pemasaran Pariwisata
16	06	Pengembangan Daerah Tujuan Wisata
16	07	Pengembangan, Sosialisasi, Dan Penerapan Serta Pengawasan Standardisasi
16	08	Pemeliharaan sarana prasarana pariwisata
16	09	Pengembangan SDM dan Profesionalisme Bidang Pariwisata
16	10	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata
16	11	Pembahasan perda tentang jasa Pariwisata
16	12	Fasilitasi Pengembangan Kelembagaan Ekowisata Daerah
16	13	Pengembangan Ekonomi Kreatif
16	14	Penataan Daya Tarik Wisata (DAK)
16	15	Pengembangan Destinasi Pariwisata
16	16	Pengelolaan Destinasi Pariwisata
16	17	Pengembangan Industri Pariwisata
16	18	Peningkatan Kelembagaan Pariwisata
16	19	Peningkatan kualitas tata kelola destinasi pariwisata dan kapasitas masyarakat pelaku usaha kepariwisataan (DAK)
Urusan : 3.03. - PERTANIAN		
18		Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/perkebunan
18	01	Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Pertanian/perkebunan Tepat Guna
18	02	Pengadaan Sarana Dan Prasarana Teknologi Pertanian/perkebunan Tepat Guna (DAK)
18	03	Pemeliharaan Rutin/berkala Sarana Dan Prasarana Teknologi Pertanian/perkebunan Tepat Guna
18	04	Kegiatan Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian/perkebunan Tepat Guna
18	05	Pelatihan Dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Pertanian/perkebunan Tepat Guna
18	06	Pelatihan Penerapan Teknologipertanian/perkebunan Modern Bercocok Tanam
18	07	Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan
18	08	Peningkatan Pengelolaan Unit Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA)
18	09	Pelatihan Mekanisasi Pertanian Bagi Pengelola UPJA
18	10	Pelatihan Pengelolaan Lahan dan Air
18	11	Bimbingan Teknis Pengendali OPT
18	12	Sekolah Lapangan Ildim




Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten Pen & Kers	
Kabag Hukum	




Paraf Koordinasi	
Asisten _____	
PD Pemrakarsa	
PD Terkait	

KODE		PROGRAM DAN KEGIATAN
1		2
18	13	Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu
18	14	Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Pertanian/Perkebunan
18	15	Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan
18	16	Rehabilitasi Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan
18	17	Pendampingan dan Pengembangan Prasarana, Sarana Pertanian (PPSP)
18	18	Pembangunan Sumber-sumber Air Meliputi Irigasi Air Tanah (Dangkal/Dalam) / Embung / Dam Parit / Pintu Air / Long Storage
18	19	Pembangunan/ Perbaikan Jalan Pertanian (Jalan Usaha Tani dan Jalan Produksi)
18	20	Pembangunan/ Perbaikan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di Kecamatan dan Penyediaan Sarana Pendukung Penyuluhan
18	21	Penyediaan Sarana Pendukung Penyuluhan
18	22	Pembangunan Balai/Instalasi Pembibitan dan Hijauan Pakan Ternak, Rumah Potong Hewan (RPH), Puskesmas dan Penyediaan Sarana Pendukungnya
18	23	Pembangunan/Perbaikan Sumber Sumber Air
19		Program Peningkatan Produksi Pertanian/perkebunan
19	01	Penyuluhan Peningkatan Produksi Pertanian/perkebunan
19	02	Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/perkebunan
19	03	Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/perkebunan
19	04	Sertifikasi Bibit Unggul Pertanian/perkebunan
19	05	Penyusunan Kebijakan Pencegahan Alih Fungsi Lahan Pertanian
19	06	Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan
19	08	Pendampingan Pusat Pertumbuhan Padi dan Jagung
19	09	Pengolahan Data Statistik Pertanian
19	10	Refresing Metodologi Pengolahan Data Statistik Pertanian
19	11	Penyusunan Angka Produksi Pertanian 5 Tahunan dan Proksi Mantap
19	12	Pengolahan Lahan dan Air
19	13	Pembuatan Survey Investigasi Design (SID)
19	14	Pengadaan Benih Padi Untuk Bencana Alam dan Pergiliran Varietas
19	15	Perluasan Areal Tanaman Pangan
19	16	Perluasan Areal Tanaman Hortikultura
19	17	Peningkatan Mutu Intensifikasi Tanaman Pangan
19	18	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Kelompok Penangkar Bibit/Benih
19	19	Pengembangan Tanaman Hortikultura
19	20	Penanganan Pasca Panen Hasil Pertanian
19	21	Pemetaan Potensi Kawasan Peningkatan Produksi dan Komoditas
19	22	Apresiasi Bagi Petani, Petugas dan Pelaku Pembangunan Pertanian
19	25	Fasilitasi Kemitraan Permodalan
19	26	Sosialisasi Lahan Sawah Abadi
19	27	Peningkatan Mekanisasi Pra Panen, Panen dan Pasca Panen
19	28	Penyediaan Stok Pestisida
19	29	Pendampingan SLPTT Tanaman Pangan dan Hortikultura
19	30	Penyediaan Bahan/Alat Pengendalian OPT Tepat Guna
19	31	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Tanaman Pangan
19	32	Pengembangan POS Pusat Agen Hayati (PAH)
19	33	Penguatan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida
19	34	Pembangunan Database Pertanian dan Peternakan
19	35	Penumbuhan Unit Pengolahan Pupuk Organik
19	36	Pengembangan Benih/Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan
19	37	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan
19	38	Anty Poverty Program (APP) Bidang Pertanian
19	39	Anty Poverty Program (APP) Bidang Perkebunan
19	40	Peningkatan Produktivitas dan Mutu Produksi Pertanian serta Pengembangan Kawasan

Paraf Hierarki		Paraf Koordinasi	
Sekda		Asisten _____	
Asisten Pem. & Persa		PD Pemrakarsa	
Kabag. Hukum		PD Terkait	




KODE		PROGRAM DAN KEGIATAN
1		2
19	41	Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah
19	42	Pengembangan Pupuk Organik
19	43	Bimbingan Teknis Pengamatan, Identifikasi dan Pengendalian OPT Tanaman Pangan dan Holtikultura
19	44	Pengembangan Tanaman Perkebunan Pendukung Kawasan Agropolitan
19	45	Pembangunan Jalan Produksi
19	46	Peremajaan dan Intensifikasi dan Rehabilitasi Tanaman Perkebunan
19	47	Optimalisasi Sumber Daya dan Sarana Prasarana Pengendalian OPT Perkebunan
21		Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Ternak
21	01	Pendataan Masalah Peternakan
21	02	Pemeliharaan Kesehatan Dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak
21	03	Pemusnahan Ternak Yang Terjangkit Penyakit Endemik
21	04	Pengawasan Perdagangan Ternak Antar Daerah
21	05	Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan
21	06	Penyediaan Obat dan Vaksin
21	07	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
21	08	Pengendalian Penyakit Zoonosis
22		Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
22	01	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pembibitan Ternak
22	02	Pembibitan Dan Perawatan Ternak
22	03	Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat
22	04	Penyuluhan Pengelolaan Bibit Ternak Yang Didistribusikan Kepada Masyarakat
22	05	Penelitian Dan Pengolahan Gizi Dan Pakan Ternak
22	06	Pembelian Dan Pendistribusian Vaksin Dan Pakan Ternak
22	07	Penyuluhan Kualitas Gizi Dan Pakan Ternak
22	08	Pengembangan Agribisnis Pertenakan
22	09	Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan
22	10	Pembuatan Kebun Hijauan Makanan Ternak
22	11	Pengembangan Industri Pakan Olahan
22	12	Pengembangan dan Optimalisasi Ternak
22	13	Sosialisasi Peningkatan Pengembangan Peternakan
22	14	Pengembangan Inseminasi Buatan
22	15	Peningkatan Pengawasan Bahan Asal Hewan (BAH) Yang ASUH
24		Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan
24	01	Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Peternakan Tepat Guna
24	02	Pengadaan Sarana Dan Prasarana Teknologi Peternakan Tepat Guna
24	03	Pemeliharaan Rutin/berkala Sarana Dan Prasarana Teknologi Peternakan Tepat Guna
24	04	Kegiatan Penyuluhan Penerapan Teknologi Peternakan Tepat Guna
24	05	Pelatihan Dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Peternakan Tepat Guna
24	06	Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan
24	07	Sosialisasi Peningkatan Mutu Pakan Ternak
24	08	Pengembangan Unit Pengolahan Limbah Organik
24	09	Sosialisasi Pengolahan Daging Yang ASUH
24	10	Bimbingan Teknis Penyakit Ternak
29		Program Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha Perkebunan
29	01	Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis
29	02	Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani
29	03	Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan
29	04	Penyuluh dan Pendampingan bagi Pertanian/Perkebunan
30		Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku
30	01	Standarisasi Kualitas Bahan Baku

Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten Pem & Kota	
Kabag Hukum	

Paraf Koordinasi	
Asisten _____	
PD Pemrakarsa	
PD Terkait	

KODE		PROGRAM DAN KEGIATAN
1		2
30	02	Penanganan Panen dan Pasca Panen Bahan Baku
30	03	Penanganan Panen dan Pasca Panen
30	04	Penumbuhan dan Penguatan Kelembagaan Petani
30	05	Penerapan Pembudidayaan sesuai dengan Good Agricultural Practices (GAP) Tembakau melalui Pemberian Pupuk ZK pada Tanaman Tembakau
30	06	Dukungan Sarana dan Prasarana Usaha Tani Tembakau
Urusan : 3.04. - ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL		
18		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemanfaatan Energi dan Sumber Daya Mineral
18	01	Fasilitasi Ijin ESDM
Urusan : 3.05. - PERDAGANGAN		
15		Program Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan Perdagangan
15	01	Koordinasi Peningkatan Hubungan Kerja Dengan Lembaga Perlindungan Konsumen
15	02	Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan-permasalahan Pengaduan Konsumen
15	03	Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang Dan Jasa
15	04	Operasionalisasi Dan Pengembangan Upt Kemetrolgian Daerah
15	05	Peningkatan Layanan Sidang Tera dan Tera Ulang UTP
15	06	Pengumpulan informasi hasil tembakau yang dilekati / tidak dilekati Pita Cukai di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran
15	07	Sosialisasi Perlindungan Konsumen
15	08	Pengembangan Sarana dan Prasarana Metrologi Legal
18		Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri
18	01	Penyempurnaan Perangkat Peraturan, Kebijakan Dan Pelaksanaan Operasional
18	02	Fasilitasi Kemudahan Perijinan Pengembangan Usaha
18	03	Pengembangan Pasar Dan Distribusi Barang / Produk
18	04	Pengembangan Kelembagaan Kerjasama Kemitraan
18	05	Pengembangan Pasar Lelang Daerah
18	06	Peningkatan Sistem Dan Jaringan Informasi Perdagangan
18	07	Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negri
18	08	Revitalisasi pasar Daerah
18	09	Pemeliharaan Pasar Daerah
18	10	Penyempurnaan Pasar Daerah
18	11	Pembinaan dan Evaluasi UPTD Pasar Daerah
18	12	Pembangunan dan Peningkatan Pasar Daerah
18	13	Pembangunan UPTD Metrologi Legal
19		Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima Dan Asongan
19	01	Kegiatan Pembinaan Organisasi Pedagang Kakilima Dan Asongan
19	02	Kegiatan Penyuluhan Peningkatan Disiplin Pedagang Kakilima Dan Asongan
19	03	Kegiatan Penataan Tempat Bernsaha Bagi Pedagang Kakilima Dan Asongan
19	04	Kegiatan Fasilitasi Modal Usaha Bagi Pedagang Kakilima Dan Asongan
19	05	Kegiatan Pengawasan Mutu Dagangan Pedagang Kakilima Dan Asongan
19	06	Kegiatan Pembangunan Gudang Penyimpanan Barang Pedagang Kakilima Dan Asongan
23		Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perdagangan dan Jasa
23	01	Revitalisasi pasar Daerah (DAK)
23	02	Rehabilitasi/Pemeliharaan Pasar Daerah
23	03	Pembinaan dan Evaluasi Pasar Daerah
24		Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Perdagangan
24	01	Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang Dilekati/ Tidak Dilekati

Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten Perencanaan & Kearsifan	
Kabag Hukum	

Paraf Koordinasi	
Asisten	
PD Pemrakarsa	
PD Terkait	

KODE		PROGRAM DAN KEGIATAN
1		2
		Pita Cukai di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran
24	02	Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang Dilekati /Tidak Dilekati Pita Cukai atau Dilekati Pita Bekas/ Pita Palsu di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran
Urusan : 3.06. - PERINDUSTRIAN		
16		Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah
16	01	Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya
16	02	Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri
16	03	Penyusunan kebijakan industri terkait dan industri penunjang industri kecil dan menengah
16	04	Pemberian kemudahan izin usaha industri kecil dan menengah
16	05	Pemberian fasilitas kemudahan akses perbankan bagi industri kecil dan menengah
16	06	Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta
16	07	Pendataan Industri Kecil Menengah Kabupaten Pacitan
16	08	Pembinaan Industri Kecil Menengah
16	09	Fasilitasi Pokmas industri
16	10	Pengembangan Produk Unggulan
16	11	Pemetaan Industri Hasil Tembakau
16	12	Fasilitasi Kepemilikan Hak Atas Kekayaan Intelektual Bagi Industri Kecil dan Menengah
16	13	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia pada Industri Hasil Tembakau Skala Kecil
19		Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial
19	01	Pembangunan Akses Transportasi Sentra-sentra Industri Potensial
19	02	Penyediaan Sarana Informasi Yang Dapat Diakses Masyarakat
20		Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Perindustrian
20	01	Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau dan/atau Daerah Pengasil Tembakau melalui Peningkatan SDM bagi Pelaku IKM
20	02	Bantuan Sarana Produksi Bagi Masyarakat/ Kelompok Masyarakat
20	03	Fasilitasi Promosi Bagi Usaha Mandiri Masyarakat
20	04	Bantuan Sarana Produksi Bagi Masyarakat/ Kelompok Masyarakat
Urusan : 3.07. - TRANSMIGRASI		
18		Program fasilitasi transmigrasi
18	01	Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM
Urusan : 3.08. - KEHUTANAN		
Urusan : 4.01. - PERENCANAAN		
18		Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh
18	01	Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh
18	02	Koordinasi Penetapan Rencana Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh
18	03	Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh
18	04	Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan
18	05	Fasilitasi Perencanaan Fisik dan Prasarana di KSCT

Paraf Hierarki	Paraf Koordinasi	
Sekda	Asisten _____	h
Asisten Perencanaan & Kerja	PD Pemrakarsa	f
Ketabag Hukum	PD Terkait	f




KODE		PROGRAM DAN KEGIATAN
1		2
21		Program Perencanaan Pembangunan Daerah
21	01	Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan Program Dan Kebijakan Layanan Publik
21	02	Penyusunan Rancangan RPJPD
21	03	Penyelenggaraan Musrenbang RPJPD
21	04	Penetapan Rpjpd
21	05	Penyusunan Rancangan Rpjmd
21	06	Penyelenggaraan Musrenbang Rpjmd
21	07	Penetapan Rpjmd
21	08	Penyusunan Rancangan RKPD
21	09	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
21	10	Penetapan RKPD
21	11	Kordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
21	12	Kordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (Ikpj)
21	13	Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
21	14	Pengumpulan dan analisis data perencanaan pembangunan daerah
21	15	Penyusunan strategi, pengendalian, analisis kewilayahan dan konektivitas perencanaan pembangunan daerah
21	16	Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah
21	17	Fasilitasi, Sinkronisasi dan Harmonisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah
21	18	Koordinasi Perencanaan Dan Penyusunan Laporan Kinerja Pembangunan Daerah
21	19	Peningkatan Pengelolaan Perencanaan Pembangunan Daerah
21	20	Pengelolaan Informasi Pembangunan dan Profil Daerah
21	21	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
21	22	Koordinasi perumusan program dan pemecahan masalah-masalah pembangunan daerah
21	23	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah
21	24	Review Dokumen RPJMD 2016-2021
21	25	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Berbasis Kewilayahan
22		Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi
22	01	Penyusunan Masterplan Pembangunan Ekonomi Daerah
22	02	Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah
22	03	Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
22	04	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi
22	05	Penyusunan Tabel Input Output Daerah
22	06	Penyusunan Masterplan Penanggulangan Kemiskinan
22	07	Penyusunan Indikator Dan Pemetaan Daerah Rawan Pangan
22	08	Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan
22	09	Fasilitasi dan pembinaan teknis perencanaan pembangunan bidang ekonomi
22	10	Monitoring, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan bidang ekonomi
22	11	Penyusunan analisis, strategi dan kerangka regulasi pembangunan bidang ekonomi
22	12	Penyusunan Data Base Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi
22	13	Fasilitasi Pengembangan Kawasan Agropolitan Dan Program Anti Proverty (APP)
22	14	Penyusunan Data Base Infrastruktur Perekonomian Daerah
22	15	Penyusunan Masterplan Pembangunan Ekononi Daerah
22	16	Fasilitasi Perencanaan Bidang Ekonomi
23		Program Perencanaan Sosial dan Budaya
23	01	Koordinasi Penyusunan Masterplan Pendidikan




Paraf Hierarki		Paraf Koordinasi	
Sekda	✓	Asisten	h
Asisten Pem & Kesra	+	PD Pemrakarsa	f
Kabag Hukum	h	PD Terkait	

KODE		PROGRAM DAN KEGIATAN
1		2
23	02	Koordinasi Penyusunan Masterplan Kesehatan
23	03	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Dan Budaya
23	04	Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan
23	05	Fasilitasi dan pembinaan teknis perencanaan pembangunan bidang sosial budaya
23	06	Monitoring, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan bidang sosial budaya
23	07	Penyusunan analisis, strategi dan kerangka regulasi pembangunan bidang sosial budaya
23	08	Penyusunan Data Base Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya
23	09	Monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Sosial Budaya
23	10	Fasilitasi Bidang Sosial Budaya
23	11	Koordinasi, Fasilitasi dan Penyusunan Kerangka Regulasi Penanggulangan Kemiskinan
23	12	Penyusunan indikator daerah di bidang sosial budaya
23	13	Updating Data Base Bidang Sosial Budaya
23	14	Penyusunan dokumen perencanaan bidang Sosbud
24		Program Perencanaan Wilayah Dan Sumber Daya Alam
24	01	Koordinasi Penyusunan Masterplan Prasarana Perhubungan Daerah
24	02	Koordinasi Penyusunan Masterplan Pengendalian Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup
24	03	Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan
24	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Infrastruktur, Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
24	05	Fasilitasi dan pembinaan teknis perencanaan pembangunan Infrastruktur, Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
24	06	Monitoring, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan Infrastruktur, Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
24	07	Penyusunan analisis, strategi dan kerangka regulasi pembangunan Infrastruktur, Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
24	08	Penyusunan Data Base Perencanaan Pembangunan Infrastruktur, Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
24	09	Fasilitasi Perencanaan Prasarana Wilayah
24	10	Fasilitasi Perencanaan Prasarana Pemukiman Dan Lingkungan Hidup
24	11	Fasilitasi Perencanaan Prasarana Perhubungan, Pengairan Dan Sumber Daya Alam
24	12	Fasilitasi, koordinasi dan analisis perencanaan tata ruang daerah
Urusan : 4.02. - KEUANGAN		
17		Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
17	01	Penyusunan Analisa Standar Belanja
17	02	Penyusunan Standar Satuan Harga
17	03	Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
17	04	Penyusunan Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
17	05	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi
17	06	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Apbd
17	07	Penyusunan Rancangan Peraturan Kdh Tentang Penjabaran Apbd
17	08	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubaban Apbd
17	09	Penyusunan Rancangan Peraturan Kdh Tentang Penjabaran Perubaban Apbd
17	10	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Apbd

Paraf Hierarki		Paraf Koordinasi	
Sekda	h	Asisten	h
Asisten Pem & Yasa	h	PD Pemrakarsa	f
Kabag	h	PD Terkait	

KODE		PROGRAM DAN KEGIATAN
1		2
17	11	Penyusunan Rancangan Peraturan Kdh Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Apbd
17	12	Penyusunan Sistem Informasi Keuangan Daerah
17	13	Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
17	14	Sosialisasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
17	15	Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
17	16	Peningkatan Manajemen Aset/ Barang Daerah
17	18	Revaluasi/ Appraisal Aset/ Barang Daerah
17	19	Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Pembukuan Pembiayaan
17	20	Peningkatan Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah
17	21	Peningkatan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
17	22	Evaluasi Pengelolaan SPJ Fungsional SKPD
17	23	Sosialisasi Raperda APBD dan Raperda Perubaban APBD
17	24	Fasilitasi Penyusunan RKA, DPA dan SPD SKPD
17	25	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah
17	26	Inventarisasi Aset Daerah
17	27	Penertiban Pengelolaan Aset Daerah
17	28	Pengamanan Aset Daerah
17	29	Fasilitasi Evaluasi dan Rekonsiliasi Data Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah
17	30	Pengelolaan dan Pengembangan Aplikasi SIPKD
17	31	Penyusunan Rencana Pemeliharaan Barang Milik Daerah
17	32	Analisa Standar Biaya
17	33	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah
17	34	Peningkatan Pelayanan Kasda
17	35	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus
17	36	Pengelolaan Administrasi Gaji PNSD
17	37	Fasilitasi Pelaksanaan Dana BK, Hibah dan Bansos
17	38	Sistem Penganggaran Terintegrasi
17	39	Penyelesaian Permasalahan Pengelolaan Keuangan Daerah
17	40	Fasilitasi dan Rekonsiliasi Data Pajak dan IWP
17	41	Penyusunan Profil Aset Daerah
17	42	Penyusunan Raperda tentang APBD dan Raperbup tentang Penjabaran APBD
17	43	Penyusunan Raperda tentang Perubaban APBD dan Raperbup tentang Penjabaran Perubaban APBD
17	44	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus
17	45	Penataan Sistem dan Pengelolaan Kas Daerah
17	46	Penyelenggaraan Tertib Administrasi dan Evaluasi SPJ Fungsional
17	47	Pemantapan dan Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)
17	48	Penyelenggaraan Tertib Administrasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah
17	49	Penyusunan Sistem dan Prosedur Penatausahaan Keuangan Daerah
17	50	Penyusunan Perumusan Kebijakan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
17	51	Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Pengelolaan Keuangan Daerah
17	52	Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia di Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah
17	53	Penyelenggaraan Tata Kelola Aset/ Barang Daerah
17	54	Pendayagunaan Aset Daerah
17	55	Sertifikasi Aset Daerah
34		Program Peningkatan Pendapatan Daerah
34	01	Penyelesaian Keberatan dan Restitusi Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Daerah
34	02	Peningkatan Pengelolaan Benda-benda berharga / Karcis Daerah

Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten Pam & Kesra	
Kabag Hukum	

Paraf Koordinasi	
Asisten	
PD Pemrakarsa	
PD Terkait	

KODE		PROGRAM DAN KEGIATAN
1		2
34	03	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
34	04	Operasional Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah
34	05	Evaluasi dan Rekonsiliasi Pendapatan Asli Daerah
34	06	Penunjang Pelaksanaan Penertiban Bagi Hasil Pajak Daerah
34	07	Optimalisasi Penerimaan PBB P2
34	08	Pengembangan Sistem Informasi PBB P2
34	09	Pemutakhiran Data dan Pendampingan PBB P2
34	10	Pemutakhiran Data Piutang Pajak dan Retribusi Daerah
34	11	Penyusunan Pengelolaan Administrasi Pembukuan Pendapatan Daerah
34	12	Pengembangan Teknologi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pajak Daerah
34	13	Peningkatan Pelayanan dan Penetapan Pajak Daerah
34	14	Pengelolaan Data dan Penilaian Pajak Daerah
34	15	Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah
34	16	Pengadaan Kareis Daerah
34	17	Operasional Penagihan Pajak Daerah dan Pemutakhiran Data Piutang Pajak Daerah
34	18	Pembukuan dan Penyusunan Laporan Realisasi Pendapatan Daerah

Urusan : 4.03. - KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

29		Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
29	01	Pendidikan Dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon Pns Daerah
29	02	Pendidikan Dan Pelatihan Struktural Bagi Pns Daerah
29	03	Pendidikan Dan Pelatihan Teknis Tugas Dasn Fungsi Bagi Pns Daerah
29	04	Pendidikan Dan Pelatihan Fungsional Bagi Pns Daerah
29	05	Pendidikan dan Pelatihan Pengawas Sekolah
29	06	Pengukuran Kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN)
30		Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur
30	01	Penyusunan Reneana Pembinaan Karir Pns
30	02	Seleksi Penerimaan Calon PNS
30	03	Penempatan PNS
30	04	Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis Pns
30	05	Pembangunan/pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah
30	06	Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan Pns
30	07	Seleksi Dan Penetapan Pns Untuk Tugas Belajar
30	08	Pemberian Penghargaan Bagi Pns Yang Berprestasi
30	09	Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin Pns
30	10	Kajian Sistem Dan Kualitas Materi Diklat Pns
30	11	Pemberian Bantuan Tugas Belajar Dan Ikatan Dinas
30	12	Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Praja Ipdn
30	13	Penyelenggaraan Diklat Teknis, Fungsional Dan Kepemimpinan
30	14	Pengembangan Diklat (analisis Kebutuhan Diklat, Penyusunan Silabi, Penyusunan Modul, Penyusunan Pedoman Diklat)
30	15	Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan
30	16	Koordinasi Penyelenggaraan Diklat
30	17	standar kompetensi pembinaan dan pengembangan sumberdaya aparatur
30	18	pembangunan program aplikasi pelayanan administrasi kepegawaian dilingkungan Pemkab Banyuasin
30	19	updating penyusunan data dan pemetaan jabatan fungsional
30	20	anjungan pelayanan informasi kepegawaian
30	21	Peresmian PNS
30	22	Pemerataan SIMPEC Pemkab Banyuasin
30	23	pengueapan sumpah janji PNS
30	24	penataan jabatan fungsional aparatur sipil negara (ASN)
30	25	kajian dan analisa peraturan kepegawaian

Paraf H... Sekda	✓	Asisten _____	h
Asisten Pem... Kesa	✓	PD Pemrakarsa	f
Kabag Hukum	✓	PD Terkait	f

KODE		PROGRAM DAN KEGIATAN
1		2
30	26	analisis /penelitian study kasus masalah kepegawaian dalam menuju good govermance
30	27	seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi /open recruitmen sesuai amanat UU ASN
30	28	penyusunan formasi pegawai
30	29	penyelesaian administrasi kepegawaian PNS
30	30	pembekalan PNS Memasuki masa usia pensiun
30	31	Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG)
30	32	Pembinaan PNS dan Non PNS
30	33	Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin
30	34	Bimbingan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan
30	35	Administrasi Pensiun
30	36	Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah
30	37	Administrasi Kepegawaian
30	38	Pemeliharaan Arsip Pegawai
30	39	Evaluasi Sasaran Kerja Pegawai (SKP)
30	40	Administrasi Kepangkatan
30	41	Administrasi Penyusunan Pengembangan Pola Karir PNS
Urusan : 4.04. - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		
34		Program Kelitbangan/Inovasi Daerah
34	01	Pengembangan dan Penguatan Inovasi dan Teknologi
34	02	Iptek Bagi Wilayah
34	03	Pengkajian Aktual Bidang Sosial dan Pemerintahan
34	04	Pengkajian Aktual Bidang Ekonomi dan Pembangunan
34	05	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kelitbangan
34	06	Fasilitasi Dewan Riset Daerah Kabupaten Pacitan
34	07	Penelitian Bidang Sosial dan Pemerintahan
34	08	Penelitian Bidang Ekonomi dan Pembangunan
34	09	Penelitian Bidang Inovasi dan Teknologi
34	10	Pengembangan Bidang Sosial dan Pemerintahan
34	11	Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
34	12	Penerapan Bidang Sosial dan Pemerintahan
34	13	Penerapan Bidang Inovasi dan Teknologi
34	14	Fasilitasi Tim Koordinasi Penguatan SIDA
34	15	Penjurnalan Hasil Kelitbangan
Urusan : 4.05. - PEMERINTAHAN UMUM		
15		Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
15	01	Rapat-rapat Paripurna
15	02	Kegiatan Reses
15	03	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah dan Luar Daerah
15	04	Peningkatan Kapasitas Pimpinan Dan Anggota DPRD
15	05	Sosialisasi Perturan Perundang-undangan
15	06	Peningkatan Sumber Daya Pimpinan dan Anggota DPRD
15	07	Pendamping Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD
15	08	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
15	09	Publikasi Kegiatan DPRD
15	10	Penyediaan Administrasi,Pimpinan DPRD,Komisi, BK dan Fraksi-Fraksi
15	11	Pengelolaan Jaringan Sistem Informasi
15	12	Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan
15	16	Hearing/ Dialog Dan Koordinasi Dengan Pejabat Pemerintah Daerah Dan Tokoh Masyarakat/ Tokoh Agama
15	17	Penyusunan Buku Selayang Pandang

Paraf Hierarki	
Sekda	<i>[Signature]</i>
Asisten Para & Yasa	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>

Paraf Koordinasi	
Asisten _____	<i>[Signature]</i>
PD Pemrakarsa	<i>[Signature]</i>
PD Terkait	<i>[Signature]</i>

KODE		PROGRAM DAN KEGIATAN
1		2
15	18	Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Anggota DPRD Priode 2014-2019
15	21	Pengadaan Pakaian Anggota dan Pimpinan DPRD
15	22	Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD
15	23	Penyusunan Raperda Inisiatif
16		Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah
16	01	Dialog/ Audiensi Dengan Tokoh-tokoh Masyarakat, Pimpinan/ Anggota Organisasi Sosial Dan Masyarakat
16	02	Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/ Departemen/ Lembaga Pemerintah Non Departemen/ Luar Negeri
16	03	Rapat Koordinasi Unsur Muspida
16	04	Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah
16	05	Kunjungan Kerja/ Inspeksi Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah
16	06	Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Lainnya
16	07	Operasional Rumah Tangga Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah
16	08	Pelayanan Keprotokolan
16	09	Pelayanan Kehumasan
16	10	Fasilitasi Peringatan Hari Jadi Propinsi Jawa Timur
20		Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
20	01	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala
20	02	Penanganan Kasus Pengaduan Di Lingkungan Pemerintah Daerah
20	03	Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Kdh
20	04	Penanganan Kasus Pada Wilayah Pemerintahan Dibawahnya
20	05	Inventarisasi Temuan Pengawasan
20	06	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan
20	07	Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif
20	08	Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan
20	09	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
20	10	Penyusunan EKPPD
20	11	Penyusunan LKPJ
20	12	Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
20	13	Review Dokumen Reneana dan Pembangunan Anggaran Tahunan Daerah
20	14	Pengawasan Pemerintahan Desa dan Tujuan Tertentu
20	15	Review SAKIP dan Evaluasi LKJIP PD
20	16	Pengawasan Reformasi Birokrasi
20	17	Penanganan Izin Pereeraian bagi PNS
20	18	Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah
20	19	Pemeriksaan Reguler Perangkat Daerah
20	20	Pemutakhiran TLHP
20	21	Monitoring dan Evaluasi TLHP
20	22	Pemeriksaan Desa
20	23	Reviu LKj.IP Pemerintah Daerah dan Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah
20	24	Pengawasan Reformasi Birokrasi dan Penegakan Integritas
20	25	Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah
21		Program Peningkatan Profesionalism Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan
21	01	Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan
21	02	Pelatihan Teknis Pengawasan Dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja
21	03	Peningkatan Kualitas Pengawasan
21	04	Peningkatan SDM Aparatur Bidang Pengawasan
22		Program Penataan Dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem Dan Prosedur Pengawasan
22	01	Penyusunan Naskah Akademik Kebijakan Sistem Dan Prosedur

Paraf Hierarki	Paraf Koordinator	
Sekda	Asisten _____	h
Asisten Pem & Kasra	PD Pemrakarsa	f
Kabag Hukum	PD Terkait	

KODE		PROGRAM DAN KEGIATAN
1		2
		Pengawasan
22	02	Penyusunan Kebijakan Sistem Dan Prosedur Pengawasan
24		Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat
24	01	Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat
24	02	Fasilitasi penanganan konflik sosial masyarakat
24	03	Unit Pengaduan Masyarakat dan Penanganan Kasus Pengaduan
24	04	Operasionalisasi Saber Pungli
25		Program Peningkatan Kerjasama Daerah
25	01	Fasilitasi/pembentukan Kerjasama Antar Daerah Dalam Penyediaan Pelayanan Publik
25	02	Fasilitasi/pembentukan Perkuatan Kerjasama Antar Daerah Pada Bidang Ekonomi
25	03	Fasilitasi/pembentukan Kerjasama Antar Daerah Di Bidang Hukum
25	04	Fasilitasi/pembentukan Kerjasama Antar Daerah Dalam Penyediaan Sarana Dan Prasarana Publik
25	05	Peningkatan Kerjasama dengan Dunia Usaha/ Lembaga
25	06	Peningkatan Koordinasi Kerjasama Antar Daerah
26		Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
26	01	Koordinasi, Konsultasi Harmonisasi dan Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-undangan
26	02	Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-undangan
26	03	Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan
26	04	Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
26	05	Publikasi Peraturan Perundang-undangan
26	06	Kajian Peraturan Perundang-undangan Daerah Terhadap Peraturan Perundang-undangan Yang Baru, Lebih Tinggi Dari Keserasian Antar Peraturan Perundang-undangan Daerah
26	07	Bantuan Hukum Advokasi Permasalahan Hukum
26	08	Pendamping Penyusun Renja Peraturan Perundang-undangan (PERDA INISIATIF)
26	09	Penyusunan Program Legislasi Daerah (Prolegda)
26	10	Penyusunan Produk Hukum Daerah
26	11	Pertimbangan Hukum, Bantuan Hukum dan Penyelesaian Perkara Hukum
26	12	Peningkatan Sistem Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (SJDIH)
26	13	Penyusunan Produk Hukum Peraturan
26	14	Penyusunan Produk Hukum Ketetapan
27		Program Penataan Daerah Otonomi Baru
27	01	Fasilitasi Penyiapan Data Dan Informasi Pendukung Proses Pemekaran Daerah
27	02	Fasilitasi Percepatan Penyerahan P3d Dari Daerah Induk Ke Daerah Pemekaran
27	03	Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar Daerah
27	04	Fasilitasi Pemantapan Sotk Pemerintah Daerah Otonom Baru
34		Program Penataan Ketatalaksanaan Dan Pelayanan Publik
34	01	Peningkatan pelayanan publik
34	02	Penyusunan Laporan Survey Kepuasan Masyarakat
34	03	Monitoring dan Evaluasi Penerapan SOP
34	04	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan SPM
35		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah
35	01	Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Negara
35	02	Monitoring, Evaluasi dan Analisis Kelembagaan Pemerintah Daerah
35	03	Pengembangan Kapasitas dan Kapabilitas Unit Kerja Kelembagaan
36		Program Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Bidang Pemerintahan Umum
36	01	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan

Paraf Hierarki	
Sekda	6
Asisten Pembantu Kepala	1
Kabag Hukum	1

Paraf Koordinasi	
Asisten	
PD Pemrakarsa	
PD Terkait	

KODE		PROGRAM DAN KEGIATAN
1		2
36	02	Pembinaan dan Evaluasi Kinerja Kecamatan
37		Program Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring Dan Evaluasi Bidang Pembangunan
37	01	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pembangunan
37	02	Peningkatan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan
37	03	Monitoring dan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan
37	04	Pelaksanaan Pemilihan Barang dan Jasa Melalui Unit Layanan Pengadaan Barang Jasa (ULP)
37	05	Sinkronisasi dan penyebarluasan strategi pengadaan barang dan jasa
37	06	Pelaksanaan pemilihan penyedia barang dan jasa melalui implementasi e-procurement
37	07	Penguatan kelembagaan dan SDM pengadaan barang dan jasa
37	08	Penyusunan Standar Satuan Harga dan Analisis Biaya
38		Program Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Monitoring Bidang Perekonomian
38	01	Koordinasi Penyusunan Kebijakan Bidang Perekonomian
38	02	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Bidang Pangan, Pertanian dan Perikanan
38	03	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Industri, Perdagangan
38	04	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Bidang Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Penanaman Modal, BUMD dan Perbankan
38	05	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
39		Program Koordinasi, Fasilitasi, Dan Monitoring Bidang Kesejahteraan Rakyat
39	01	Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pembangunan bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
39	02	Koordinasi Pembinaan UKS/M
39	03	Peningkatan Pemberdayaan Lansia
39	04	Penanggulangan NAPZA dan PMS
39	05	Pembinaan Drumband
39	06	Fasilitasi Lembaga Sosial Masyarakat
39	07	Fasilitasi Seni Budaya dan Peringatan Hari Besar Nasional
39	08	Peningkatan koordinasi dan fasilitasi organisasi wanita
39	09	Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pembangunan bidang Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
39	10	Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pembangunan bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
39	11	Peningkatan Koordinasi dan fasilitasi Organisasi Pemuda
39	12	Peningkatan koord. dan fasilitasi pengembangan olahraga
40		Program Peningkatan Kerukunan Umat Beragama
40	01	Pembinaan Mental Spiritual
40	02	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Masyarakat
40	03	Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Mental Spiritual
40	04	Fasilitasi Mental Spiritual dan Keagamaan
41		Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
41	01	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
41	02	Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat
41	03	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
41	04	Sosialisasi HAM
41	05	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan bagi tokoh Pemuda, Ormas dan Tomas
41	06	Forum Kerukunan Umat Beragama
41	07	Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat Kabupaten Pacitan
41	08	Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat

Paraf Hierarki		Paraf Koordinasi	
Sekda	✓	Asisten _____	h
Asisten Pem & Yasa	✓	PD Pemrakarsa	f
Kabag Hukum	✓	PD Terkait	

KODE		PROGRAM DAN KEGIATAN
1		2
41	09	Sosialisasi Pembauran Kebangsaan
41	10	Pemantauan dan Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing
41	11	Sosialisasi Bahaya radikalisme dan Terorisme di kalangan Pemuda, Pelajar, Mahasiswa dan Tokoh masyarakat
41	12	Operasional Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri
41	13	Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Narkoba
41	14	Kelompok Kerja Pusat Penyelenggaraan Pendidikan Wawasan Kebangsaan
41	15	Komunitas Intelejcn Daerah (KOMINDA)
41	16	Pelatihan Kader Bela Negara
41	17	Pemantapan Pelaksanaan HAM
41	18	Pemantapan Nilai-nilai Wawasan Kebangsaan
41	19	Pembinaan Kerukunan Umat Beragama
41	20	Pembinaan Pembauran Kebangsaan
41	21	Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial
41	22	Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Narkoba
41	23	Pelatihan Kader Bela Negara
41	24	Satgas Revolusi Mental
41	25	Kewaspadaan Dini di Daerah
41	26	Pemantauan dan Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing (NGO)
41	27	Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM)
42		Program Pendidikan Politik Masyarakat
42	01	Penyuluhan kepada masyarakat
42	02	Fasilitasi penyelesaian perselisihan partai politik
42	03	Koordinasi forum-forum diskusi politik
42	04	Penyusunan data base partai politik
42	05	Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan
42	06	Fasilitasi Administrasi Bantuan Keuangan Kepada Parpol
42	07	Pelatihan pengelolaan keuangan kepada partai politik
42	08	Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan
42	09	Forum Lintas Partai Politik
42	10	Peningkatan Pendidikan Politik Masyarakat
42	11	Fasilitasi Tim Koordinasi Pelaksanaan Pemilihan Umum
42	12	Pembinaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
42	13	Dukungan Kelancaran Pemilu
43		Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan
43	01	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan
43	02	Fasilitasi Pelestarian dan Aktualisasi Kebudayaan Daerah, Pemuda dan Olahraga
43	03	Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pembinaan PKK
43	04	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan dan Monitoring Musrenbang Desa
43	05	Fasilitasi Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan
43	06	Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
43	07	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
43	08	Fasilitasi Pemungutan Pajak Daerah
43	09	Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat
43	10	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pacitan
43	11	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pucangsewu
43	12	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Baleharjo

Paraf Hierarki	
Sekda	6
Asisten Per. & Kea	4
Kabag Hukum	1

Paraf	
Asisten	h
PD Pemrakarsa	f
PD Terkait	

KODE		PROGRAM DAN KEGIATAN
1		2
43	13	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Ploso
43	14	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sidoharjo
43	15	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pacitan
43	16	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pucangsewu
43	17	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Belaharjo
43	18	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Ploso
43	19	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sidoharjo
44		Program Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Pemerintahan
44	01	Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Bidang Administrasi Pemerintahan
44	02	Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
44	03	Penyusunan Kebijakan Bidang Pemerintahan Desa
45		Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai
45	01	Penyampaian Informasi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Cukai Kepada Masyarakat dan/atau Pemangku Kepentingan, serta Pemantauan dan Evaluasi Atas Pelaksanaan Ketentuan Peraturan Perunda
45	02	Penyampaian Informasi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Cukai Kepada Masyarakat dan/atau Pemangku Kepentingan

‡ **BUPATI PACITAN**



‡ **INDARTATO**

KODE		PROGRAM DAN KEGIATAN
1		2
43	13	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Ploso
43	14	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sidoharjo
43	15	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pacitan
43	16	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pucangsewu
43	17	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Belaharjo
43	18	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Ploso
43	19	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sidoharjo
44		Program Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Pemerintahan
44	01	Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Bidang Administrasi Pemerintahan
44	02	Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
44	03	Penyusunan Kebijakan Bidang Pemerintahan Desa
45		Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai
45	01	Penyampaian Informasi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Cukai Kepada Masyarakat dan/atau Pemangku Kepentingan, serta Pemantauan dan Evaluasi Atas Pelaksanaan Ketentuan Peraturan Perunda
45	02	Penyampaian Informasi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Cukai Kepada Masyarakat dan/atau Pemangku Kepentingan

BUPATI PACITAN



INDARTATO

LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI PACITAN

NOMOR 50 Tahun 2019







PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PACITAN NOMOR 66 TAHUN 2017

TENTANG KODE REKENING ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2019

KODE REKENING PENDAPATAN

KODE	URAIAN	KETERANGAN
1	2	3
4.	PENDAPATAN DAERAH	
4.1.	Pendapatan Asli Daerah	
4.1.1.	Hasil Pajak Daerah	
4.1.1.01.	Pajak Hotel	
4.1.1.01.01.	Hotel Bintang Lima Berlian	Untuk menganggarkan pendapatan pajak hotel yang diperoleh dari Hotel Bintang Lima Berlian
4.1.1.01.02.	Hotel Bintang Lima	Untuk menganggarkan pendapatan pajak hotel yang diperoleh dari Hotel Bintang Lima
4.1.1.01.03.	Hotel Bintang Empat	Untuk menganggarkan pendapatan pajak hotel yang diperoleh dari Hotel Bintang Empat
4.1.1.01.04.	Hotel Bintang Tiga	Untuk menganggarkan pendapatan pajak hotel yang diperoleh dari Hotel Bintang Tiga
4.1.1.01.05.	Hotel Bintang Dua	Untuk menganggarkan pendapatan pajak hotel yang diperoleh dari Hotel Bintang Dua
4.1.1.01.06.	Hotel Bintang Satu	Untuk menganggarkan pendapatan pajak hotel yang diperoleh dari Hotel Bintang Satu
4.1.1.01.07.	Hotel Melati Tiga	Untuk menganggarkan pendapatan pajak hotel yang diperoleh dari Hotel Melati Tiga
4.1.1.01.08.	Hotel Melati Dua	Untuk menganggarkan pendapatan pajak hotel yang diperoleh dari Hotel Melati Dua
4.1.1.01.09.	Hotel Melati Satu	Untuk menganggarkan pendapatan pajak hotel yang diperoleh dari Hotel Melati Satu
4.1.1.01.10.	Motel	Untuk menganggarkan pendapatan pajak yang diperoleh dari Motel
4.1.1.01.11.	Cottage	Untuk menganggarkan pendapatan pajak yang diperoleh dari Cottage
4.1.1.01.12.	Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggraha/Hostel/Rumah Kos	Untuk menganggarkan pendapatan pajak yang diperoleh dari Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggraha/Hostel/Rumah Kos
4.1.1.01.13.	Wisma Pariwisata	Untuk menganggarkan pendapatan pajak yang diperoleh dari Wisma Pariwisata
4.1.1.01.14.	Gubuk Pariwisata	Untuk menganggarkan pendapatan pajak yang diperoleh dari Gubuk Pariwisata

Paraf Hierarki		Paraf Koordinasi	
Sekda		Asisten	
Kabag. Perencanaan & Keuangan		PD Pemrakarsa	
Kabag. Hukum		PD Terkait	




KODE	URAIAN	KETERANGAN
1	2	3
4.1.1.02.	Pajak Restoran	
4.1.1.02.01.	Restoran	untuk menganggarkan pendapatan pajak restoran yang diperoleh dari restoran
4.1.1.02.02.	Rumah Makan	untuk menganggarkan pendapatan pajak restoran yang diperoleh dari rumah makan
4.1.1.02.03.	Café	untuk menganggarkan pendapatan pajak restoran yang diperoleh dari cafe
4.1.1.02.04.	Kantin	untuk menganggarkan pendapatan pajak restoran yang diperoleh dari kantin
4.1.1.02.05.	Katering	untuk menganggarkan pendapatan pajak restoran yang diperoleh dari katering
4.1.1.02.06.	Warung	untuk menganggarkan pendapatan pajak restoran yang diperoleh dari warung
4.1.1.02.07.	Bar	untuk menganggarkan pendapatan pajak restoran yang diperoleh dari bar
4.1.1.02.08.	Jasa Boga	untuk menganggarkan pendapatan pajak restoran yang diperoleh dari jasa boga
4.1.1.03.	Pajak Hiburan	
4.1.1.03.01.	Tontonan Film/Bioskop	untuk menganggarkan pendapatan pajak hiburan yang diperoleh dari tontonan film/bioskop
4.1.1.03.02.	Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	untuk menganggarkan pendapatan pajak hiburan yang diperoleh dari Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana
4.1.1.03.03.	Kontes Kecantikan	untuk menganggarkan pendapatan pajak hiburan yang diperoleh dari Kontes Kecantikan
4.1.1.03.04.	Kontes Binaraga	untuk menganggarkan pendapatan pajak hiburan yang diperoleh dari Kontes Bina Marga
4.1.1.03.05.	Pameran	untuk menganggarkan pendapatan pajak hiburan yang diperoleh dari Pameran
4.1.1.03.06.	Diskotik	untuk menganggarkan pendapatan pajak hiburan yang diperoleh dari Diskotik
4.1.1.03.07.	Karaoke	untuk menganggarkan pendapatan pajak hiburan yang diperoleh dari Karaoke
4.1.1.03.08.	Klub Malam	untuk menganggarkan pendapatan pajak hiburan yang diperoleh dari Klub Malam
4.1.1.03.09.	Sirkus/Akrobat/Sulap	untuk menganggarkan pendapatan pajak hiburan yang diperoleh dari Sirkus/Akrobat/Sulap
4.1.1.03.10.	Permainan Biliar	untuk menganggarkan pendapatan pajak hiburan yang diperoleh dari Permainan biliar
4.1.1.03.12.	Permainan Bowling	untuk menganggarkan pendapatan pajak hiburan yang diperoleh dari Permainan Bowling
4.1.1.03.13.	Pacuan Kuda	untuk menganggarkan pendapatan pajak hiburan yang diperoleh dari Pacuan Kuda
4.1.1.03.14.	Balap Kendaraan Bermotor	untuk menganggarkan pendapatan pajak hiburan yang diperoleh dari Balap Kendaraan Bermotor



Paraf Hierarki		Paraf Koordinasi	
Sekda	<input checked="" type="checkbox"/>	Asisten	<input checked="" type="checkbox"/>
Kep. Pemb. Sekda	<input checked="" type="checkbox"/>	PD Pemrakarsa	<input checked="" type="checkbox"/>
Kabag. Hukum	<input checked="" type="checkbox"/>	PD Terkait	<input checked="" type="checkbox"/>

KODE	URAIAN	KETERANGAN
1	2	3
4.1.1.03.15.	Permainan Ketangkasan	untuk menganggarkan pendapatan pajak hiburan yang diperoleh dari Permainan Ketangkasan termasuk game online dan warnet
4.1.1.03.16.	Panti Pijat/Refleksi	untuk menganggarkan pendapatan pajak hiburan yang diperoleh dari Panti Pijat/Refleksi
4.1.1.03.17.	Mandi Uap/Spa	untuk menganggarkan pendapatan pajak hiburan yang diperoleh dari Mandi Uap/Spa
4.1.1.03.18.	Pusat Kebugaran	untuk menganggarkan pendapatan pajak hiburan yang diperoleh dari Pusat Kebugaran
4.1.1.03.19.	Pertandingan Olahraga	untuk menganggarkan pendapatan pajak hiburan yang diperoleh dari Pertandingan Olahraga
4.1.1.04.	Pajak Reklame	
4.1.1.04.01.	Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	untuk menganggarkan pendapatan pajak reklame yang diperoleh dari reklame papan/bill board/videotron/megatron
4.1.1.04.02.	Reklame Kain	untuk menganggarkan pendapatan pajak reklame yang diperoleh dari Reklame Kain
4.1.1.04.03.	Reklame Melekat/Stiker	untuk menganggarkan pendapatan pajak reklame yang diperoleh dari Reklame Melekat/Stiker
4.1.1.04.04.	Reklame Selebaran	untuk menganggarkan pendapatan pajak reklame yang diperoleh dari Reklame Selebaran
4.1.1.04.05.	Reklame Berjalan	untuk menganggarkan pendapatan pajak reklame yang diperoleh dari Reklame Berjalan
4.1.1.04.06.	Reklame Udara	untuk menganggarkan pendapatan pajak reklame yang diperoleh dari reklame udara
4.1.1.04.07.	Reklame Apung	untuk menganggarkan pendapatan pajak reklame yang diperoleh dari reklame Apung
4.1.1.04.08.	Reklame Suara	untuk menganggarkan pendapatan pajak reklame yang diperoleh dari reklame Suara
4.1.1.04.09.	Reklame Film/Slide	untuk menganggarkan pendapatan pajak reklame yang diperoleh dari reklame film/slide
4.1.1.04.10.	Reklame Peragaan	untuk menganggarkan pendapatan pajak reklame yang diperoleh dari reklame peragaan
4.1.1.05.	Pajak Penerangan Jalan	
4.1.1.05.01.	Pajak Penerangan Jalan PLN	untuk menganggarkan pendapatan pajak penerangan jalan yang diperoleh dari PLN
4.1.1.07.	Pajak Parkir	
4.1.1.07.01.	Pajak Parkir	untuk menganggarkan pendapatan pajak parkir yang diperoleh dari Parkir
4.1.1.08.	Pajak Air Tanah	
4.1.1.08.01.	Pajak Air Tanah.	untuk menganggarkan pendapatan pajak yang diperoleh dari air tanah

Paraf Hierarki		Paraf Koordinasi	
Sekda	<input checked="" type="checkbox"/>	Asisten	<input checked="" type="checkbox"/>
Asisten Pab & Kes	<input checked="" type="checkbox"/>	PD Pemrakarsa	<input checked="" type="checkbox"/>
Kabag Hukum	<input checked="" type="checkbox"/>	PD Terkait	<input checked="" type="checkbox"/>

KODE	URAIAN	KETERANGAN
1	2	3
4.1.1.09.	Pajak Sarang Burung Walet	
4.1.1.09.01.	Pajak Sarang Burung Walet	untuk menganggarkan pendapatan pajak yang diperoleh dari sarang burung walet
4.1.1.11.	Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan	
4.1.1.11.01.	Asbes	untuk menganggarkan pendapatan pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan yang diperoleh dari Asbes
4.1.1.11.02.	Batu Tulis	untuk menganggarkan pendapatan pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan yang diperoleh dari Batu tulis
4.1.1.11.03.	Batu Setengah Permata	untuk menganggarkan pendapatan pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan yang diperoleh dari Batu setengah permata
4.1.1.11.04.	Batu Kapur	untuk menganggarkan pendapatan pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan yang diperoleh dari Batu kapur
4.1.1.11.05.	Batu Apung	untuk menganggarkan pendapatan pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan yang diperoleh dari Batu apung
4.1.1.11.05.	Lain Lain Mineral Bukan Logam dan Batuan	untuk menganggarkan pendapatan pajak lain lain Mineral Bukan Logam Dan Batuan yang diperoleh dari mineral bukan logam dan batuan
4.1.1.11.07.	Pajak Batuan (non sirtu)	untuk menganggarkan pendapatan pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan yang diperoleh dari batuan non sirtu
4.1.1.11.08.	Pajak Batuan (sirtu)	untuk menganggarkan pendapatan pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan yang diperoleh dari batuan sirtu
4.1.1.12.	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	
4.1.1.12.01.	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan	untuk menganggarkan pendapatan pajak yang diperoleh dari Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan
4.1.1.13.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	
4.1.1.13.01.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	untuk menganggarkan pendapatan pajak yang diperoleh dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	
4.1.2.01.	Retribusi Jasa Umum	
4.1.2.01.01.	Retribusi Pelayanan Kesehatan	untuk menganggarkan pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan yang meliputi pendapatan dari pengobatan, ambulance, persalinan, askes, laboratorium kesehatan, pemeriksaan haji dan perizinan di bidang kesehatan.
4.1.2.01.02.	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	untuk menganggarkan pendapatan Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan yang meliputi kebersihan lingkungan masyarakat
4.1.2.01.03.	Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil	untuk menganggarkan pendapatan Retribusi Penggantian Biaya KTP dan

Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten Pen & Yasa	
Kabag Hukum	

Paraf Koordinasi	
Asisten	
PD Pemrakarsa	
PD Terkait	

KODE	URAIAN	KETERANGAN
1	2	3
		Akte Catatan Sipil
4.1.2.01.04.	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	untuk menganggarkan pendapatan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat yang meliputi : makam Kristen, makam islam, makam lainnya dan retribusi pemberian perizinan pemindahan jenazah
4.1.2.01.05.	Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum	untuk menganggarkan pendapatan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum yang meliputi retribusi parkir di tepi jalan umum dan retribusi parkir insidentil
4.1.2.01.06.	Retribusi Pelayanan Pasar	untuk menganggarkan pendapatan retribusi pelayanan pasar
4.1.2.01.07.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	untuk menganggarkan pendapatan retribusi pengujian kendaraan bermotor
4.1.2.01.08.	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	untuk menganggarkan pendapatan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran pada bangunan/gedung
4.1.2.01.09.	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	untuk menganggarkan pendapatan retribusi penggantian biaya cetak peta yang meliputi penggandaan peta, jasa pemetaan, pengadaan patok dan penerapan rencana kota dan penelitian administrasi
4.1.2.01.10.	Retribusi Pelayanan Pendidikan	untuk menganggarkan pendapatan retribusi pelayanan pendidikan
4.1.2.01.11.	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	untuk menganggarkan pendapatan retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
4.1.2.01.12.	Retribusi Pengolahan Limbah Cair	untuk menganggarkan pendapatan Retribusi Pengolahan Limbah Cair
4.1.2.01.13.	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	untuk menganggarkan pendapatan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
4.1.2.01.14.	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	untuk menganggarkan pendapatan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
4.1.2.02.	Retribusi Jasa Usaha	
4.1.2.02.01.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	untuk menganggarkan pendapatan retribusi jasa usaha yang diperoleh dari pemakaian kekayaan daerah
4.1.2.02.02.	Retribusi Pasar Grosir / Pertokoan	untuk menganggarkan pendapatan retribusi jasa usaha yang diperoleh dari pasar grosir/pertokoan meliputi : retribusi stand, retribusi air dan listrik, pendapatan parkir dan lain-lain
4.1.2.02.03.	Retribusi Tempat Pelelangan	untuk menganggarkan pendapatan retribusi jasa usaha yang diperoleh dari tempat pelelangan.
4.1.2.02.04.	Retribusi Terminal	untuk menganggarkan pendapatan retribusi jasa usaha yang diperoleh dari terminal
4.1.2.02.05.	Retribusi Tempat Khusus Parkir	untuk menganggarkan pendapatan retribusi jasa usaha yang diperoleh dari tempat khusus parkir

Paraf Hierarki		Paraf Koordinasi	
Sekda	7	Asisten	h
Asisten Part. & Kasub	6	PD Pemrakarsa	1
Kabag Hukum	2	PD Terkait	

KODE	URAIAN	KETERANGAN
1	2	3
4.1.2.02.06.	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vilia	untuk menganggarkan pendapatan retribusi jasa usaha yang diperoleh dari tempat penginapan/pesanggrahan/villa
4.1.2.02.08.	Retribusi Rumah Potong Hewan	untuk menganggarkan pendapatan retribusi jasa usaha yang diperoleh dari Rumah Potong Hewan
4.1.2.02.09.	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	untuk menganggarkan pendapatan retribusi jasa usaha yang diperoleh dari pelayanan kepelabuhan
4.1.2.02.10.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	untuk menganggarkan pendapatan retribusi jasa usaha yang diperoleh dari tempat rekreasi dan olahraga,
4.1.2.02.11.	Retribusi Penyeberangan di Air	untuk menganggarkan pendapatan retribusi jasa usaha yang diperoleh dari penyeberangan di air.
4.1.2.02.13.	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	untuk menganggarkan pendapatan retribusi jasa usaha yang diperoleh dari penjualan Produksi Usaha Daerah
4.1.2.03.	Retribusi Perizinan Tertentu	
4.1.2.03.01.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	untuk menganggarkan pendapatan retribusi perizinan tertentu yang diperoleh dari Izin Mendirikan Bangunan, meliputi retribusi IMB bangunan dan retribusi IMB reklame.
4.1.2.03.02.	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	untuk menganggarkan pendapatan retribusi perizinan tertentu yang diperoleh dari Izin tempat Penjualan Minuman beralkohol.
4.1.2.03.03.	Retribusi Izin Gangguan/Keramaian	untuk menganggarkan pendapatan retribusi perizinan tertentu yang diperoleh dari Izin gangguan/keramaian, meliputi, retribusi izin gangguan / keramaian.
4.1.2.03.04.	Retribusi Izin Trayek	untuk menganggarkan pendapatan retribusi perizinan tertentu yang diperoleh dari Izin trayek, meliputi retribusi izin trayek mikrolek, retribusi izin trayek taksi, retribusi izin trayek bus kota dan retribusi trayek angguna.
4.1.2.03.05.	Retribusi Izin Usaha Perikanan	untuk menganggarkan pendapatan retribusi perizinan tertentu yang diperoleh dari Izin usaha perikanan.
4.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	
4.1.3.01.	Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	
4.1.3.01.01.	Bank Jatim	untuk menganggarkan pendapatan bagian laba atas penyertaan modal pada Bank Jatim.
4.1.3.01.02.	Bank Perkreditan Rakyat	untuk menganggarkan pendapatan bagian laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Pendapatan Bagian Laba

Paraf Hierarki		Paraf Koordinasi	
Sekda	<i>[Signature]</i>	Asisten	<i>[Signature]</i>
Asisten Pen. & Kesra	<i>[Signature]</i>	PD Pemrakarsa	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>	PD Terkait	<i>[Signature]</i>

KODE	URAIAN	KETERANGAN
1	2	3
		atas penyertaan modal PT.Bank Perkreditan Rakyat JawaTimur.
4.1.3.01.03.	Perusahaan Daerah Air Minum	untuk menganggarkan pendapatan bagian laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).
4.1.3.01.04.	Perusahaan Daerah Aneka Usaha	untuk menganggarkan pendapatan bagian laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha.
4.1.3.02.	Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Pemerintah/BUMN	
4.1.3.02.01.	BUMN	untuk menganggarkan pendapatan bagian laba atas penyertaan modal pada BUMN.
4.1.3.03.	Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Swasta	
4.1.3.03.01.	Perusahaan Patungan	untuk menganggarkan pendapatan bagian laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Patungan milik swasta.
4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asil Daerah yang Sah	
4.1.4.01.	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	
4.1.4.01.01.	Pelepasan Hak Atas Tanah	untuk menganggarkan pendapatan Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan yang diperoleh dari pendapatan hasil pelepasan Hak Atas Tanah.
4.1.4.01.02.	Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor tidak terpakai	untuk menganggarkan pendapatan Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan yang diperoleh dari Penjualan Peralatan /Perlengkapan Kantor tidak terpakai.
4.1.4.01.03.	Penjualan Mesin/alat-alat berat tidak terpakai	untuk menganggarkan pendapatan Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan yang diperoleh dari Penjualan Mesin /Alat -alat Berat tidak terpakai.
4.1.4.01.04.	Penjualan Rumah Jabatan/Rumah Dinas	untuk menganggarkan pendapatan Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan yang diperoleh dari Penjualan Rumah Jabatan/Rumah Dinas.
4.1.4.01.05.	Penjualan Kendaraan Dinas roda dua	untuk menganggarkan pendapatan Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan yang diperoleh dari Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua dan roda tiga
4.1.4.01.06.	Penjualan Kendaraan Dinas roda empat	untuk menganggarkan pendapatan Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan yang diperoleh dari Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat dan lebih.

Paraf Hierarchy		Paraf Koordinasi	
Sekda	✓	Asisten _____	h
Asisten. Pen & Yasa	✓	PD Pemrakarsa	f
Kabag Hukum	h	PD Terkait	

KODE	URAIAN	KETERANGAN
1	2	3
4.1.4.01.07.	Penjualan Drum Bekas	untuk menganggarkan pendapatan Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan yang diperoleh dari Penjualan Drum Bekas.
4.1.4.01.08.	Penjualan Hasil Penebangan Pohon	untuk menganggarkan pendapatan Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan yang diperoleh dari Penjualan Hasil Penebangan Pohon.
4.1.4.01.09.	Penjualan Lampu Hias Bekas	untuk menganggarkan pendapatan Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan yang diperoleh dari Penjualan Lampu Hias Bekas.
4.1.4.01.10.	Penjualan bahan-bahan Bekas Bangunan	untuk menganggarkan pendapatan Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan yang diperoleh dari Penjualan Bahan - bahan Bekas Bangunan.
4.1.4.01.11.	Penjualan Perlengkapan Lalu Lintas	untuk menganggarkan pendapatan Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan yang diperoleh dari Penjualan Perlengkapan lalu lintas.
4.1.4.01.12.	Penjualan Obat-obatan dan hasil farmasi	untuk menganggarkan pendapatan Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan yang diperoleh dari Penjualan Obat-obatan dan Hasil Farmasi.
4.1.4.01.13.	Penjualan hasil pertanian	untuk menganggarkan pendapatan Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan yang diperoleh dari Penjualan Hasil Pertanian.
4.1.4.01.14.	Penjualan hasil kehutanan	untuk menganggarkan pendapatan Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan yang diperoleh dari Penjualan Hasil Kehutanan.
4.1.4.01.15.	Penjualan hasil perkebunan	untuk menganggarkan pendapatan Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan yang diperoleh dari Penjualan Hasil Perkebunan.
4.1.4.01.16.	Penjualan hasil peternakan	untuk menganggarkan pendapatan Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan yang diperoleh dari Penjualan Hasil Peternakan.
4.1.4.01.17.	Penjualan hasil perikanan	untuk menganggarkan pendapatan Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan yang diperoleh dari Penjualan Hasil Perikanan.
4.1.4.01.18.	Penjualan hasil sitaan	untuk menganggarkan pendapatan Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan yang diperoleh dari Penjualan Hasil Sitaan.
4.1.4.02.	Penerimaan Jasa Giro	
4.1.4.02.01.	Jasa Giro Kas Daerah	untuk menganggarkan penerimaan jasa giro yang diperoleh dari kas daerah.
4.1.4.02.02.	Jasa Giro Pemegang Kas	untuk menganggarkan penerimaan jasa giro yang diperoleh dari pemegang kas.
4.1.4.02.03.	Jasa Giro Dana Cadangan	untuk menganggarkan penerimaan jasa giro yang diperoleh dari Dana cadangan.

Paraf Hierarki		Paraf Koordinasi	
Sekda	6	Asisten	W
Asisten Pem & Pesta	4	PD Pemrakarsa	Y
Kabag Hukum	2	PD Terkait	

KODE	URAIAN	KETERANGAN
1	2	3
4.1.4.03.	Pendapatan Bunga Deposito	
4.1.4.03.01.	Rekening Deposito pada BPD	untuk menganggarkan pendapatan bunga deposito yang diperoleh dari BPD Jawa Timur.
4.1.4.03.02.	Rekening Deposito Pada BRI	untuk menganggarkan pendapatan bunga deposito yang diperoleh dari BRI.
4.1.4.03.03.	Rekening Deposito Pada BNI	untuk menganggarkan pendapatan bunga deposito yang diperoleh dari BNI.
4.1.4.03.04.	Pendapatan Bunga Piutang	untuk menganggarkan pendapatan bunga yang diperoleh dari Piutang.
4.1.4.03.05.	Rekening Deposito pada Bank Mandiri	untuk menganggarkan pendapatan bunga deposito yang diperoleh dari Bank Mandiri.
4.1.4.03.06.	Rekening Deposito pada BTN	untuk menganggarkan pendapatan bunga deposito yang diperoleh dari BTN.
4.1.4.04.	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	
4.1.4.04.01.	Kerugian Uang Daerah	untuk menganggarkan pendapatan tuntutan ganti kerugian daerah yang diperoleh dari kerugian uang daerah.
4.1.4.04.02.	Kerugian Barang Daerah	untuk menganggarkan pendapatan tuntutan ganti kerugian daerah yang diperoleh dari kerugian barang daerah.
4.1.4.05.	Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah	
4.1.4.05.01.	Penerimaan Komisi dari penempatan Kas Daerah	untuk menganggarkan pendapatan komisi, potongan dan selisih nilai tukar rupiah yang diperoleh dari penerimaan komisi dari penempatan kas Daerah.
4.1.4.05.02.	Penerimaan Potongan dari Pihak Ketiga	untuk menganggarkan pendapatan komisi, potongan dan selisih nilai tukar rupiah yang diperoleh dari penerimaan potongan dari Pihak Ketiga
4.1.4.05.03.	Penerimaan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah dari Pihak Ketiga	untuk menganggarkan pendapatan komisi, potongan dan selisih nilai tukar rupiah yang diperoleh dari penerimaan keuntungan selisih nilai tukar rupiah dari pihak ketiga
4.1.4.06.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	
4.1.4.06.01.	Bidang Pendidikan	untuk menganggarkan pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diperoleh dari bidang pendidikan.
4.1.4.06.02.	Bidang Kesehatan	untuk menganggarkan pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diperoleh dari bidang Kesehatan.
4.1.4.06.03.	Bidang Pekerjaan Umum	untuk menganggarkan pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diperoleh dari bidang Pekerjaan Umum.
4.1.4.06.04.	Bidang Perumahan Rakyat	untuk menganggarkan pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diperoleh dari bidang Perumahan Rakyat.




Paraf Hierarki		Paraf Koordinasi	
Sekda	✓	Asisten	h
Asisten Pen & Kasa	h	PD Pemrakarsa	f
Kabag Hukum	h	PD Terkait	




KODE	URAIAN	KETERANGAN
1	2	3
4.1.4.06.05.	Bidang Penataan Ruang	untuk menganggarkan pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diperoleh dari bidang Penata Ruang
4.1.4.06.06.	Bidang Perencanaan Pembangunan	untuk menganggarkan pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diperoleh dari bidang perencanaan pembangunan.
4.1.4.06.07.	Bidang Perhubungan	untuk menganggarkan pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diperoleh dari bidang perhubungan.
4.1.4.06.08.	Bidang Lingkungan Hidup	untuk menganggarkan pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diperoleh dari Bidang Lingkungan Hidup
4.1.4.06.09.	Bidang Pertanahan	untuk menganggarkan pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diperoleh dari Bidang Pertanahan
4.1.4.07.	Pendapatan Denda Pajak	
4.1.4.07.01.	Pendapatan Denda Pajak Hotel	untuk menganggarkan pendapatan denda pajak yang diperoleh dari pajak hotel.
4.1.4.07.02.	Pendapatan Denda Pajak Restoran	untuk menganggarkan pendapatan denda pajak yang diperoleh dari pajak Restoran.
4.1.4.07.03.	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	untuk menganggarkan pendapatan denda pajak yang diperoleh dari pajak hiburan.
4.1.4.07.04.	Pendapatan Denda Pajak Reklame	untuk menganggarkan pendapatan denda pajak yang diperoleh dari pajak Reklame.
4.1.4.07.05.	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan	untuk menganggarkan pendapatan denda pajak yang diperoleh dari pajak Penerangan Jalan.
4.1.4.07.07.	Pendapatan Denda Pajak Parkir	untuk menganggarkan pendapatan denda pajak yang diperoleh dari pajak Parkir.
4.1.4.07.08.	Pendapatan Denda Pajak Air Bawah Tanah	untuk menganggarkan pendapatan denda pajak yang diperoleh dari pajak Air Bawah Tanah.
4.1.4.07.09.	Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet	untuk menganggarkan pendapatan denda pajak yang diperoleh dari pajak Sarang Burung Walet.
4.1.4.07.11.	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	untuk menganggarkan pendapatan denda pajak yang diperoleh dari pajak Mineral Bukan Logam dan batuan.
4.1.4.07.12.	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	untuk menganggarkan pendapatan denda pajak yang diperoleh dari pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.
4.1.4.07.13.	Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	untuk menganggarkan pendapatan denda pajak yang diperoleh dari pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Paraf Hierarki	
Sekda	7
Asisten Pem & Kesra	1
Kabag Hukum	2




Paraf Koordinasi	
Asisten	h
PD Pemrakarsa	f
PD Terkait	f




KODE	URAIAN	KETERANGAN
1	2	3
4.1.4.08.	Pendapatan Denda Retribusi	
4.1.4.08.01.	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	untuk menggabungkan pendapatan denda retribusi yang diperoleh dari retribusi jasa umum.
4.1.4.08.02.	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	untuk menggabungkan pendapatan denda retribusi yang diperoleh dari retribusi jasa Usaha.
4.1.4.08.03.	Pendapatan Denda Retribusi Perizinan tertentu	untuk menggabungkan pendapatan denda retribusi yang diperoleh dari retribusi perizinan tertentu.
4.1.4.09.	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	
4.1.4.09.01.	Hasil Eksekusi Jaminan atas Pelaksanaan Pekerjaan	untuk menggabungkan pendapatan hasil eksekusi atas jaminan yang diperoleh dari pelaksanaan pekerjaan termasuk pekerjaan pembongkaran dan kerjasama Aset
4.1.4.09.02.	Hasil Eksekusi Jaminan atas Pembongkaran Reklame	untuk menggabungkan pendapatan hasil eksekusi atas jaminan yang diperoleh dari pembongkaran reklame.
4.1.4.09.03.	Hasil Eksekusi Jaminan atas KTP Musiman	untuk menggabungkan pendapatan Hasil eksekusi atas jaminan yang diperoleh dari KTP musiman.
4.1.4.10.	Pendapatan dari Pengembalian	
4.1.4.10.01.	Pendapatan dari Pengembalian Pajak Penghasilan Pasal 21	untuk menggabungkan pendapatan daripengembalian yang diperoleh dari pajak penghasilan pasal 21, pasal 22 dan pasal 23
4.1.4.10.02.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan pembayaran asuransi kesehatan	untuk menggabungkan pendapatan dari pengembalian yang diperoleh dari Kelebihan pembayaran asuransi kesehatan.
4.1.4.10.03.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan pembayaran Gaji dan Tunjangan	untuk menggabungkan pendapatan dari pengembalian yang diperoleh dari Kelebihan pembayaran Gaji, Tunjangan dan honorarium
4.1.4.10.04.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan pembayaran Perjalanan Dinas	untuk menggabungkan pendapatan dari pengembalian yang diperoleh dari Kelebihan pembayaran Perjalanan Dinas
4.1.4.10.05.	Pendapatan dari Pengembalian dari Uang Muka	untuk menggabungkan pendapatan dari pengembalian yang diperoleh dari Pengembalian Uang Muka.
4.1.4.11.	Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	
4.1.4.11.01.	Fasilitas Sosial	untuk menggabungkan pendapatan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang diperoleh dari fasilitas umum.
4.1.4.11.02.	Fasilitas Umum	untuk menggabungkan pendapatan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang diperoleh dari fasilitas umum.
4.1.4.12.	Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	

Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten Pem & Kasub	
Kabag Hukum	







Paraf Koordinasi	
Asisten	
PD Pemrakarsa	
PD Terkait	

KODE	URAIAN	KETERANGAN
1	2	3
4.1.4.12.01.	Uang Pendaftaran/Ujian Masuk	untuk menganggarkan pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang diperoleh dari uang pendaftaran/ujian masuk.
4.1.4.12.02.	Uang Sekolah/pendidikan dan pelatihan	untuk menganggarkan pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang diperoleh dari uang sekolah/pendidikan dan latihan.
4.1.4.12.03.	Uang Ujian kenaikan tingkat/kelas	untuk menganggarkan pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang diperoleh dari uang ujian kenaikan tingkat/kelas
4.1.4.13.	Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Rumah	
4.1.4.13.01.	Angsuran/Cicilan Penjualan Rumah Dinas Daerah Golongan III	untuk menganggarkan pendapatan dari angsuran /cicilan penjualan yang diperoleh dari angsuran /cicilan penjualan rumah Dinas Daerah Golongan III.
4.1.4.13.02.	Angsuran/Cicilan Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas	untuk menganggarkan pendapatan dari angsuran /cicilan penjualan yang diperoleh dari angsuran /cicilan penjualan kendaraan perorangan Dinas.
4.1.4.13.03.	Angsuran/Cicilan Ganti Kerugian Barang Milik Daerah	untuk menganggarkan pendapatan dari angsuran /cicilan Ganti Kerugian yang diperoleh dari angsuran /cicilan penjualan Barang Milik Daerah.
4.1.4.14.	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	
4.1.4.14.01.	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dari Kelompok Masyarakat	untuk menganggarkan pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir yang diperoleh dari Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dari kelompok masyarakat dan perseorangan
4.1.4.15.	Lain Lain Pendapatan AsU Daerah Yang Sah	
4.1.4.15.01.	Lain lain Pendapatan BLUD	untuk menganggarkan pendapatan yang diperoleh dari lain lain pendapatan BLUD.
4.1.4.15.06.	Pedapatan Dari hasil perjanjian kerjasama	untuk menganggarkan pendapatan dari hasil perjanjian kerjasama.
4.1.4.16.	Pendapatan Lain-lain	
4.1.4.16.01.	Pendapatan Lain-Lain	untuk menganggarkan penerimaan lain-lain yang diperoleh dari penerimaan lain-lain.
4.1.4.16.02.	Pendapatan dari hasil perjanjian kerjasama	untuk menganggarkan penerimaan lain-lain yang diperoleh dari hail perjanjian kerjasama..
4.1.4.17.	Pendapatan Dana Kapitasi JKN FKTP	
4.1.4.17.01.	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Pacitan	untuk menganggarkan pendapatan dari Dana kapitasi JKN FKTP yang diperoleh dari Dana Kapitasi JKN FKTP Pukesmas Pacitan.
4.1.4.17.02.	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Tanjungsari	untuk menganggarkan pendapatan dari Dana kapitasi JKN FKTP yang diperoleh dari Dana Kapitasi JKN FKTP Pukesmas




Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten Pen & Yasa	
Kabag Hukum	




Paraf Koordinasi	
Asisten _____	
PD Pemrakarsa	
PD Terkait	

KODE	URAIAN	KETERANGAN
1	2	3
		Tanjungari.
4.1.4.17.03.	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Kebonagung	untuk menganggarkan pendapatan dari Dana kapitasi JKN FKTP yang diperoleh dari Dana Kapitasi JKN FKTP Pukesmas Kebonagung.
4.1.4.17.04.	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Ketro Wonojoyo	untuk menganggarkan pendapatan dari Dana kapitasi JKN FKTP yang diperoleh dari Dana Kapitasi JKN FKTP Pukesmas Ketro Wonojoyo.
4.1.4.17.05.	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Anjosari	untuk menganggarkan pendapatan dari Dana kapitasi JKN FKTP yang diperoleh dari Dana Kapitasi JKN FKTP Pukesmas Arjosari.
4.1.4.17.06.	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Kedungbendo	untuk menganggarkan pendapatan dari Dana kapitasi JKN FKTP yang diperoleh dari Dana Kapitasi JKN FKTP Pukesmas Kedungbendo.
4.1.4.17.07.	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Punung	untuk menganggarkan pendapatan dari Dana kapitasi JKN FKTP yang diperoleh dari Dana Kapitasi JKN FKTP Pukesmas Punung.
4.1.4.17.08.	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Gondosari	untuk menganggarkan pendapatan dari Dana kapitasi JKN FKTP yang diperoleh dari Dana Kapitasi JKN FKTP Pukesmas Gondosari.
4.1.4.17.09.	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Pringkuku	untuk menganggarkan pendapatan dari Dana kapitasi JKN FKTP yang diperoleh dari Dana Kapitasi JKN FKTP Pukesmas Pringkuku.
4.1.4.17.10.	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Candi	untuk menganggarkan pendapatan dari Dana kapitasi JKN FKTP yang diperoleh dari Dana Kapitasi JKN FKTP Pukesmas Candi.
4.1.4.17.11.	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Donorojo	untuk menganggarkan pendapatan dari Dana kapitasi JKN FKTP yang diperoleh dari Dana Kapitasi JKN FKTP Pukesmas Donorojo.
4.1.4.17.12.	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Kalak	untuk menganggarkan pendapatan dari Dana kapitasi JKN FKTP yang diperoleh dari Dana Kapitasi JKN FKTP Pukesmas Kalak.
4.1.4.17.13.	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Ngadirojo	untuk menganggarkan pendapatan dari Dana kapitasi JKN FKTP yang diperoleh dari Dana Kapitasi JKN FKTP Pukesmas Ngadirojo.
4.1.4.17.14.	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Wonokarto	untuk menganggarkan pendapatan dari Dana kapitasi JKN FKTP yang diperoleh dari Dana Kapitasi JKN FKTP Pukesmas Wonokarto.
4.1.4.17.15.	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Tulakan	untuk menganggarkan pendapatan dari Dana kapitasi JKN FKTP yang diperoleh dari Dana Kapitasi JKN FKTP Pukesmas Tulakan.
4.1.4.17.16.	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Bubakan	untuk menganggarkan pendapatan dari Dana kapitasi JKN FKTP yang diperoleh dari Dana Kapitasi JKN FKTP Pukesmas Bubakan.

Paraf hierarki	Paraf Koordinasi
Sekda 	Asisten 
Asisten Pembantu Kepala 	PD Pemrakarsa 
Kebag Hukum 	PD Terkait 

KODE	URAIAN	KETERANGAN
1	2	3
4.1.4.17.17.	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Sudimoro	untuk menganggarkan pendapatan dari Dana kapitasi JKN FKTP yang diperoleh dari Dana Kapitasi JKN FKTP Pukesmas Sudimoro.
4.1.4.17.18.	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Sukorejo	untuk menganggarkan pendapatan dari Dana kapitasi JKN FKTP yang diperoleh dari Dana Kapitasi JKN FKTP Pukesmas Sukorejo.
4.1.4.17.19.	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Tegalombo	untuk menganggarkan pendapatan dari Dana kapitasi JKN FKTP yang diperoleh dari Dana Kapitasi JKN FKTP Pukesmas Tegalombo.
4.1.4.17.20.	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Gemaharjo	untuk menganggarkan pendapatan dari Dana kapitasi JKN FKTP yang diperoleh dari Dana Kapitasi JKN FKTP Pukesmas Gemaharjo.
4.1.4.17.21.	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Nawangan	untuk menganggarkan pendapatan dari Dana kapitasi JKN FKTP yang diperoleh dari Dana Kapitasi JKN FKTP Pukesmas Nawangan.
4.1.4.17.22.	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Pakisbaru	untuk menganggarkan pendapatan dari Dana kapitasi JKN FKTP yang diperoleh dari Dana Kapitasi JKN FKTP Pukesmas Pakisbaru
4.1.4.17.23.	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Bandar	untuk menganggarkan pendapatan dari Dana kapitasi JKN FKTP yang diperoleh dari Dana Kapitasi JKN FKTP Pukesmas Bandar.
4.1.4.17.24.	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Jeruk	untuk menganggarkan pendapatan dari Dana kapitasi JKN FKTP yang diperoleh dari Dana Kapitasi JKN FKTP Pukesmas Jeruk.
4.2.	Dana Perimbangan	
4.2.1.	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	
4.2.1.01.	Bagi Hasil Pajak	
4.2.1.01.01.	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	untuk menganggarkan penerimaan bagi hasil pajak yang diperoleh dari bagi hasil pajak bumi dan bangunan.
4.2.1.01.02.	Bagi Hasil dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	untuk menganggarkan penerimaan bagi hasil pajak yang diperoleh dari bagi hasil Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
4.2.1.01.03.	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang Pribadi dalam negeri dan PPh Pasal 21	untuk menganggarkan penerimaan bagi hasil pajak yang diperoleh dari bagi hasil Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang Pribadi dalam negeri dan PPh Pasal 21.
4.2.1.01.04.	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	untuk menganggarkan penerimaan bagi hasil pajak yang diperoleh dari bagi hasil Cukai Hasil Tembakau.
4.2.1.02.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	
4.2.1.02.01.	Bagi Hasil dari luran Hak Pengusahaan Hutan	untuk menganggarkan penerimaan bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam yang diperoleh dari bagi hasil luran hak

Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten Pembantu Sekda	
Kasubag Hukum	

Paraf Koordinasi	
Asisten	
PD Pemrakarsa	
PD Terkait	

KODE	URAIAN	KETERANGAN
1	2	3
		penguasaan hutan.
4.2.1.02.02.	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan	untuk menganggarkan penerimaan bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam yang diperoleh dari bagi hasil dari provisi sumber daya hutan.
4.2.1.02.03.	Bagi Hasil dari Dana Reboisasi	untuk menganggarkan penerimaan bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam yang diperoleh dari bagi hasil dana reboisasi.
4.2.1.02.04.	Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land-rent)	untuk menganggarkan penerimaan bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam yang diperoleh dari bagi hasil iuran tetap (land-rent).
4.2.1.02.05.	Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)	untuk menganggarkan penerimaan bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam yang diperoleh dari bagi hasil iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti).
4.2.1.02.06.	Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan	untuk menganggarkan penerimaan bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam yang diperoleh dari bagi hasil dari pungutan pengusahaan perikanan.
4.2.1.02.07.	Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan	untuk menganggarkan penerimaan bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam yang diperoleh dari bagi hasil dari pungutan hasil perikanan.
4.2.1.02.08.	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi	untuk menganggarkan penerimaan bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam yang diperoleh dari bagi hasil dari pertambangan minyak bumi.
4.2.1.02.09.	Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi	untuk menganggarkan penerimaan bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam yang diperoleh dari bagi hasil pertambangan gas bumi.
4.2.1.02.10.	Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi	untuk menganggarkan penerimaan bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam yang diperoleh dari bagi hasil pertambangan panas bumi.
4.2.1.02.12.	Bagi Hasil dari Migas	untuk menganggarkan penerimaan bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam yang diperoleh dari bagi hasil migas.
4.2.1.02.13.	Bagi Hasil dari Minerba	untuk menganggarkan penerimaan bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam yang diperoleh dari bagi hasil minerba.
4.2.2.	Dana Alokasi Umum	
4.2.2.01.	Dana Alokasi Umum	
4.2.2.01.01.	Dana Alokasi Umum	untuk menganggarkan penerimaan dari dana alokasi umum.
4.2.3.	Dana Alokasi Khusus	
4.2.3.01.	Dana alokasi Khusus	
4.2.3.01.01.	Dana alokasi khusus Reguler	untuk menganggarkan penerimaan dari dana alokasi khusus.
4.2.3.01.02.	Dana Alokasi Khusus Penugasan	untuk menganggarkan penerimaan dari dana alokasi khusus penugasan.
4.2.3.02.03.	Dana Tunjangan Profesi Guru PNS Daerah (TPGPNSD)	untuk menganggarkan penerimaan dari dana Tunjangan Profesi Guru PNS Daerah (TPGPNSD).

Paraf Hierarki		Paraf Koordinasi	
Sekda	✓	Asisten _____	h
Asisten Pen & Kabag	h	PD Pemrakarsa	f
Kabag	h	PD Terkait	

KODE	URAIAN	KETERANGAN
1	2	3
4.2.3.02.04.	Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD (TAMSIL PNSD)	untuk menganggarkan penerimaan dari dana Tambahan Penghasilan Guru PND (TAMSIL PNSD).
4.2.3.02.05.	Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD (BOP PAUD)	untuk menganggarkan penerimaan dari dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD (BOP PAUD)
4.2.3.02.06.	Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	untuk menganggarkan penerimaan dari dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)
4.2.3.02.07.	Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	untuk menganggarkan penerimaan dari dana Pelayanan Adminitrai Kependudukan.
4.2.3.02.08.	Dana Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	untuk menganggarkan penerimaan dari Dana Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan.
4.2.3.02.09	Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Ketenagakerjaan	untuk menganggarkan penerimaan dari dana Peningkatan Kapasitas Koperai, Usaha Kecil dan Menengah.
4.2.3.02.10.	Dana Pelayanan Kepariwisataa	untuk menganggarkan penerimaan dari dana Pelayanan Kepariwisataa.
4.3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	
4.3.1.	Pendapatan Hibah	
4.3.1.01.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah	
4.3.1.01.01.	Pemerintah	untuk menganggarkan pendapatan hibah dari pemerintah.
4.3.1.02.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah lainnya	
4.3.1.02.01.	Pemerintah Daerah	untuk menganggarkan pendapatan hibah dari pemerintah daerah lainnya yang diperoleh dari Pemerintah Provinsi.
4.3.1.02.03.	Hibah Dana BOS SD Kec. Donorojo	untuk menganggarkan pendapatan Dana Bos dari SD Kec. Donoroja
4.3.1.02.04.	Hibah Dana BOS SD Kec. Punung	untuk menganggarkan pendapatan Dana Bus dari SD Kee. Punung
4.3.1.02.05.	Hibah Dana BOS SD Kec. Pringkuku	untuk menganggarkan pendapatan Dana Dos dari SD Kee. Pringkuku
4.3.1.02.06.	Hibah Dana BOS SD Kec. Pacitan	untuk menganggarkan pendapatan Dann Bos dari SD Kee. Pacitan
4.3.1.02.07.	Hibah Dana BOS SD Kec. Kebonagung	untuk menganggarkan pendapatan Dana Bus dari SD Kec. Kebonagung
4.3.1.02.08.	Hibah Dana BOS SD Kec. Arjosari	untuk menganggarkan pendapatan Dana Bos dari SD Kec. Arjosari
4.3.1.02.09.	Hibah Dana BOS SD Kec. Nawangan	untuk menganggarkan pendapatan Dana Bus dari SD Kee. Nawangan
4.3.1.02.10.	Hibah Dana BOS SD Kec. Bandar	untuk menganggarkan pendapatan Dana Bos dari SD Kee. Bandar
4.3.1.02.11.	Hibah Dana BOS-SD Kec. Tegalombo	untuk menganggarkan pendapatan Dana Bus dari SD Kec. Tegalombo
4.3.1.02.12.	Hibah Dana BOS SD Kec. Tulakan	untuk menganggarkan pendapatan Dana Bos dari SD Kec. Tulakan
4.3.1.02.13.	Hibah Dana BOS SD Kec. Ngadirojo	untuk menganggarkan pendapatan Dana Bos dari SD Kec. Ngadirojo
4.3.1.02.14.	Hibah Dana BOS SD Kec.	untuk menganggarkan pendapatan

Paraf Hierarki	
Sekda	<input checked="" type="checkbox"/>
Asisten Per. & Kesa	<input type="checkbox"/>
Kabag Hukum	<input checked="" type="checkbox"/>

Paraf Koordinasi	
Asisten	<input type="checkbox"/>
PD Pemrakarsa	<input type="checkbox"/>
PD Terkait	<input type="checkbox"/>

KODE	URAIAN	KETERANGAN
1	2	3
	Sudimoro	Dana Bos dari SD Kec. Sudimoro
4.3.1.02.15.	Hibah Dana BOS SMP Kec. Donorojo	untuk mengganggu pendapatan Dana Bos dari SMP Kec. Donorojo
4.3.1.02.16.	Hibah Dana BOS SMP Kec. Punung	untuk mengganggu pendapatan Dana Bos dari SMP Kec. Punung
4.3.1.02.17.	Hibah Dana BOS SMP Kec. Pringkuku	untuk mengganggu pendapatan Dana Bos dari SMP Kec. Pringkuku
4.3.1.02.18.	Hibah Dana BOS SMP Kec. Pacitan	untuk mengganggu pendapatan Dana Bos dari SMP Kec. Pacitan
4.3.1.02.19.	Hibah Dana BOS SMP Kec. Kebonagung	untuk mengganggu pendapatan Dana Bos dari SMP Kec. Kebonagung
4.3.1.02.20.	Hibah Dana BOS SMP Kec. Arjosari	untuk mengganggu pendapatan Dana Bos dari SMP Kec. Arjosari
4.3.1.02.21.	Hibah Dana BOS SMP Kec. Nawangan	untuk mengganggu pendapatan Dana Bos dari SMP Kec. Nawangan
4.3.1.02.22.	Hibah Dana BOS SMP Kec. Bandar	untuk mengganggu pendapatan Dana Bos dari SMP Kec. Bandar
4.3.1.02.23.	Hibah Dana BOS SMP Kec. Tegalombo	untuk mengganggu pendapatan Dana Bos dari SMP Kec. Tegalombo
4.3.1.02.24.	Hibah Dana BOS SMP Kec. Tulakan	untuk mengganggu pendapatan Dana Bos dari SMP Kec. Tulakan
4.3.1.02.25.	Hibah Dana BOS SMP Kec. Ngadirojo	untuk mengganggu pendapatan Dana Bos dari SMP Kec. Ngadirojo
4.3.1.02.26.	Hibah Dana BOS SMP Kec. Sudimoro	untuk mengganggu pendapatan Dana Bos dari SMP Kec. Sudimoro
4.3.1.03.	Pendapatan Hibah dari badan/Lembaga/organisasi swasta dalam negeri	
4.3.1.03.01.	Badan/lembaga/ organisasi swasta dalam negeri	untuk mengganggu pendapatan hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri yang diperoleh dari Badan/Lembaga/Organisasi.
4.3.1.04.	Pendapatan Hibah dari kelompok masyarakat/perorangan	
4.3.1.04.01.	Kelompok masyarakat/perorangan .	untuk mengganggu pendapatan hibah dari kelompok masyarakat/perorangan.
4.3.1.05.	Pendapatan Hibah dari Luar Negeri	
4.3.1.05.01.	Pendapatan Hibah dari Bilateral	untuk mengganggu pendapatan hibah dari luar negeri yang diperoleh dari bilateral.
4.3.1.05.02.	Pendapatan Hibah dari Multilateral	untuk mengganggu pendapatan hibah dari luar negeri yang diperoleh dari multilateral.
4.3.1.05.03.	Pendapatan Hibah dari Donor lainnya	untuk mengganggu pendapatan hibah dari luar negeri yang diperoleh donor lainnya.
4.3.2.	Dana Darurat	
4.3.2.01.	Peaanggulangan Korban/Kerusakan Akibat Bencana Alam	
4.3.2.01.01.	Korban/Kerusakan Akibat Bencana Alam	untuk mengganggu penanggulangan korban/ kerusakan akibat bencana alam.

Paraf Hierarki	
Sekda	<i>[Signature]</i>
Asisten Pem & Kesra	<i>[Signature]</i>
Kabag	<i>[Signature]</i>

Paraf Koordinasi	
Asisten	<i>[Signature]</i>
PD Pemrakarsa	<i>[Signature]</i>
PD Terkait	<i>[Signature]</i>

KODE	URAIAN	KETERANGAN
1	2	3
4.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya	
4.3.3.01.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	
4.3.3.01.01.	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	untuk menganggarkan dana bagi hasil pajak dari provinsi yang diperoleh dari pajak kendaraan bermotor.
4.3.3.01.03.	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	untuk menganggarkan dana bagi hasil dari bea balik nama kendaraan bermotor.
4.3.3.01.05.	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	untuk menganggarkan dana bagi hasil pajak dari provinsi yang diperoleh dari pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
4.3.3.01.07.	Bagi Hasil dari Pajak Air Permukaan	untuk menganggarkan dana bagi hasil pajak dari provinsi yang diperoleh dari pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan.
4.3.3.01.08.	Bagi Hasil Dari Pajak Rokok	untuk menganggarkan dana bagi hasil pajak dari provinsi yang diperoleh dari pajak Rokok.
4.3.3.02.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 3)	
4.3.3.02.01.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi .	untuk menganggarkan dana bagi hasil pajak dari provinsi lainnya
4.3.3.03.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Kabupaten 3)	
4.3.3.03.01.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Kabupaten .	untuk menganggarkan dana bagi hasil pajak dari kabupaten lainnya.
4.3.3.04.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Kota 3)	
4.3.3.04.01.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Kota .	untuk menganggarkan dana bagi hasil pajak dari kota lainnya.
4.3.4.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	
4.3.4.01.	Dana Penyesuaian	
4.3.4.01.05.	Dana Insentif Daerah	untuk menganggarkan pendapatan dana penyesuaian yang diperoleh dari Dana Insentif Daerah
4.3.4.01.09.	Dana Desa	untuk menganggarkan penerimaan dana Desa dari pemerintah pusat
4.3.4.02.	Dana Otonomi Khusus	
4.3.4.02.01.	Dana Otonomi Khusus .	untuk menganggarkan penerimaan dana otonomi khusus.
4.3.5.	Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	
4.3.5.01.	Bantuan Keuangan dari Provinsi	
4.3.5.01.01.	Bantuan keuangan dari Provinsi.	untuk menganggarkan Bantuan Keuangan dari Provinsi.
4.3.5.02.	Bantuan Keuangan dari Kabupaten	
4.3.5.02.01.	Bantuan keuangan dari Kabupaten	untuk menganggarkan penerimaan dana bantuan keuangan dari Kabupaten
4.3.5.03.	Bantuan Keuangan dari kota	

Paraf Hierarki	
Sekda	✓
Asisten Pembantu Kepala	f
Kabag Hukum	x

Paraf Koordinasi	
Asisten	h
PD Pemrakarsa	f
PD Terkait	f

KODE	URAIAN	KETERANGAN
1	2	3
4.3.5.03.01.	Bantuan keuangan dari Kota	untuk menganggarkan penerimaan dana bantuan keuangan dari Kota.

BUPATI PACITAN ✓







INDARTATO

Paraf Koordinasi	
sten _____	h
Pemrakarsa _____	g
Terkait _____	

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 50 Tahun 2019
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PACITAN NOMOR 66 TAHUN 2017
TENTANG KODE REKENING ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2019

KODE REKENING BELANJA

KODE	URAIAN	KETERANGAN
1	2	3
5.	BELANJA DAERAH	
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	
5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	
5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	
5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	Untuk pemberian gaji pokok PNS / Uang Representasi kepada PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah Kab. Pacitan, Pejabat negara dan DPRD Kab. Pacitan.
5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	Untuk pemberian Tunjangan Keluarga kepada PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah Kab. Pacitan, Pejabat negara dan DPRD Kab. Pacitan.
5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	Untuk pemberian Tunjangan Jabatan kepada PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah Kab. Pacitan, Pejabat negara dan DPRD Kab. Pacitan.
5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	Untuk pemberian Tunjangan Fungsional kepada PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah Kab. Pacitan.
5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	Untuk pemberian Tunjangan Fungsional Umum kepada PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah Kab. Pacitan.
5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	Untuk pemberian Tunjangan Beras kepada PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah Kab. Pacitan, Pejabat negara dan DPRD Kab. Pacitan.
5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Kbusus	Untuk pemberian Tunjangan PPh / Tunjangan Kbusus kepada PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah Kab. Pacitan, Pejabat negara dan DPRD Kab. Pacitan.
5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	Untuk pemberian Tunjangan Pembulatan Gaji kepada PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah Kab. Pacitan, Pejabat negara dan DPRD Kab. Pacitan.
5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	Untuk pemberian Iuran Asuransi Kesehatan (ASKES)/BPJS Kesehatan dari pemberi kerja kepada PNS/Pejabat Negara/DPRD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan.
5.1.1.01.10.	Uang Paket	Untuk pemberian Uang Paket kepada DPRD Kabupaten Pacitan.
5.1.1.01.11.	Tunjangan Musyawarah Badan	Untuk pemberian Tunjangan Panitia Musyawarah kepada DPRD Kabupaten Pacitan.

Paraf Hierarki	Paraf Koordinasi
Sekda 	Asisten 
Asisten Pem & Kaca 	PD Pemrakarsa 
Kabag Hukum 	PD Terkait 

KODE	URAIAN	KETERANGAN
1	2	3
5.1.1.01.12.	Tunjangan Komisi	Untuk pemberian Tunjangan Komisi kepada DPRD Kabupaten Pacitan.
5.1.1.01.13.	Tunjangan Anggaran Badan	Untuk pemberian Tunjangan Panitia Anggaran kepada DPRD Kabupaten Pacitan.
5.1.1.01.14.	Tunjangan Kehormatan Badan	Untuk pemberian Tunjangan Badan Kebormatan kepada DPRD Kabupaten Pacitan.
5.1.1.01.15.	Tunjangan Kelengkapan Lainnya 2) Alat	Untuk pemberian Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya kepada DPRD Kabupaten Pacitan.
5.1.1.01.16.	Tunjangan Perumahan	Untuk pemberian Tunjangan Perumahan kepada DPRD Kabupaten Pacitan.
5.1.1.01.17.	Uang Duka Wafat/Tewas	Untuk pemberian Uang Duka Wafat / Tewas kepada Kepala Daerah, DPRD, PNS Kabupaten Pacitan.
5.1.1.01.18.	Uang Jasa Pengabdian	Untuk pemberian Uang Jasa Pengabdian kepada DPRD Kabupaten Pacitan.
5.1.1.01.19.	Belanja Operasional DPRD Penunjang Pimpinan	Untuk pemberian Penunjang Operasional Pimpinan DPRD Kabupaten Pacitan.
5.1.1.01.20.	Tunjangan DPRD kesehatan	Untuk pemberian Tunjangan kesehatan DPRD Kabupaten Pacitan.
5.1.1.01.21.	Tunjangan Profesi Guru	Untuk pemberian Tunjangan Profesi Guru.
5.1.1.01.22.	Tunjangan Kecelakaan Kerja Jaminan	Untuk pemberian Tunjangan Jaminan Kecelakaan Kerja.
5.1.1.01.23.	Tunjangan Kematian Jaminan	Untuk pemberian Tunjangan Jaminan Kematian.
5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	
5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	Untuk pemberian Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja kepada PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan.
5.1.1.02.02.	Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas	Untuk pemberian Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat bertugas kepada PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan.
5.1.1.02.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja	Untuk pemberian Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi kerja kepada PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan.
5.1.1.02.04.	Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi	Untuk pemberian Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi kepada PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan.
5.1.1.02.05.	Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja	Untuk pemberian Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja kepada PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan.
5.1.1.02.06.	Tambahan Penghasilan Guru	Untuk pemberian Tambahan Penghasilan Guru PNS non-sertifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan
5.1.1.03.	Belanja lainnya Penerimaan anggota Pimpinan dan DPRD serta	

Paraf Hierarchy		
Sekda	✓	
Asisten Pem. & Kece	+	
Kabag Hukum	✓	
Asisten		✓
PD Pemrakarsa		+
PD Terkait		+

KODE	URAIAN	KETERANGAN
1	2	3
	KDH/WKDH	
5.1.1.03.01.	Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	Untuk pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pacitan.
5.1.1.03.02.	Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH	Untuk pemberian Belanja Penunjang Operasional kepada Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pacitan.
5.1.1.03.03.	Tunjangan Badan Pembentukan Perda	Untuk pemberian tunjangan badan pembentukan Perda
5.1.1.03.04.	Tunjangan Reses	untuk pemberian tunjangan reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pacitan
5.1.1.03.05.	Tunjangan Transportasi	untuk pemberian tunjangan transportasi Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pacitan
5.1.1.03.06.	Dana Operasional	untuk pemberian dana operasional
5.1.1.03.07.	Tunjangan Badan Pembentukan Peraturan Daerah	untuk pemberian Tunjangan Badan Pembentukan Peraturan Daerah
5.1.1.04.	Biaya Pemungutan Pajak	
5.1.1.04.01.	Biaya pemungutan PBB	Untuk Biaya Pemungutan PBB Pemerintah Kabupaten Pacitan.
5.1.1.04.02.	Biaya pemungutan Pajak Daerah	Untuk Biaya Pemungutan Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
5.1.1.05.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	
5.1.1.05.01.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah.	Untuk Insentif Pemungutan Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
5.1.1.06.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	
5.1.1.06.01.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah.	Untuk Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
5.1.2.	BELANJA BUNGA	
5.1.2.01.	Bunga Utang Pinjaman	
5.1.2.01.01.	Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah	Untuk Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah
5.1.2.01.02.	Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Daerah lainnya	Untuk Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya.
5.1.2.01.03.	Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank	Untuk Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank.
5.1.2.01.04.	Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan bukan Bank	Untuk Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan bukan Bank.
5.1.2.02.	Bunga Utang Obligasi	
5.1.2.02.01.	Bunga Utang Obligasi	Untuk Belanja Bunga Utang Obligasi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan.
5.1.3.	BELANJA SUBSIDI	
5.1.3.01.	Belanja Subsidi kepada Perusahaan/Lembaga	
5.1.3.01.01.	Belanja Subsidi kepada Perusahaan	Untuk Belanja Subsidi kepada Perusahaan.

Paraf Hierarki		Paraf Koordinasi	
Sekda	✓	Asisten	✓
Asisten Pemb. Kasra	✓	PD Pemrakarsa	✓
Kabag Hukum	✓	PD Terkait	✓

KODE	URAIAN	KETERANGAN
1	2	3
5.1.3.01.02.	Belanja Subsidi kepada Lembaga	Untuk Belanja Subsidi kepada Lembaga.
5.1.4.	BELANJA HIBAH	
5.1.4.01.	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	
5.1.4.01.01.	Pemerintah Pusat	Untuk Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat.
5.1.4.02.	Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya³	
5.1.4.02.01.	Pemerintah Provinsi	Untuk Belanja Hibah kepada Pemerintah Provinsi.
5.1.4.02.02.	Pemerintah Kabupaten/Kota	Untuk Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya.
5.1.4.03.	Belanja Hibah kepada Pemerintahan Desa	
5.1.4.03.01.	Pemerintahan Desa	Untuk Belanja Hibah kepada Pemerintah Desa.
5.1.4.04.	Belanja Hibah kepada Perusahaan Daerah/BUMD/BUMN⁴	
5.1.4.04.01.	Perusahaan Daerah BUMD/BUMN	Untuk Belanja Hibah kepada Perusahaan Daerah BUMD/BUMN.
5.1.4.05.	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta	
5.1.4.05.01.	Badan / lembaga / organisasi swasta	Untuk Belanja Hibah kepada Badan / lembaga/Organisasi Semi Pemerintah / Instansi Pemerintah.
5.1.4.05.02.	Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD (DAK)	Untuk Belanja Hibah untuk Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD (DAK).
5.1.4.05.03.	Insentif Guru PAUD 166 Desa	Untuk Belanja Hibah Insentif Guru PAUD 166 desa
5.1.4.05.04.	KONI	Untuk Belanja Hibah kepada KONI
5.1.4.05.05.	Ketua Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Kab. Pacitan	Untuk Belanja Hibah kepada Ketua Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Kab. Pacitan
5.1.4.05.06.	PMI Kabupaten Pacitan	Untuk Belanja Hibah kepada PMI Kabupaten Pacitan
5.1.4.05.07.	Pramuka Kwarcab Pacitan	Untuk Belanja Hibah kepada Pramuka Kwarcab Pacitan
5.1.4.05.08.	BAZNAS Kabupaten Pacitan	Untuk Belanja Hibah kepada BAZNAS Kabupaten Pacitan
5.1.4.05.09.	Ketua Yayasan Jantung Indonesia (YJI) Cabang Kab. Pacitan	Untuk Belanja Hibah kepada Ketua Yayasan Jantung Indonesia (YJI) Cabang Kab. Pacitan
5.1.4.05.10.	Ketua YABI/AICINDA Kab. Pacitan	Untuk Belanja Hibah kepada Ketua YABI/AICINDA Kab. Pacitan
5.1.4.05.11.	Kepolisian Resort Pacitan	Untuk Belanja Hibah kepada Kepolisian Resort Pacitan
5.1.4.05.12.	Kodim Kab. Pacitan	Untuk Belanja Hibah kepada Kodim Kab. Pacitan
5.1.4.05.13.	Ketua Persatuan Wredatama Seluruh Indonesia (PWRI) Kab.	Untuk Belanja Hibah kepada Ketua Persatuan Wredatama Seluruh Indonesia (PWRI) Kab. Pacitan

Paraf	Hierarki
Sekda	✓
Asisten Sekda	✓
Kabag Hukum	✓

Asisten	✓
PD Pemrakarsa	✓
PD Terkait	✓

KODE	URAIAN	KETERANGAN
1	2	3
5.1.4.05.14.	Ketua DPD Muhammadiyah Kab. Pacitan	Untuk Belanja Hibab kepada Ketua DPD Muhammadiyah Kab. Pacitan
5.1.4.05.15.	Ketua DPC NU Kab. Pacitan	Untuk Belanja Hibab kepada Ketua DPC NU Kab. Pacitan
5.1.4.05.16.	Ketua Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMU Kab. Pacitan)	Untuk Belanja Hibab kepada Ketua Pengrus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII Kab. Pacitan)
5.1.4.05.17.	Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kab. Pacitan	Untuk Belanja Hibah Kepada Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kab. Pacitan
5.1.4.05.18.	Himpunan Nelayan Selurub Indonesia (HNSI) Kab. Pacitan	Untuk Belanja Hibah kepada Himpunan Nelayan Selurub Indonesia (HNSI) Kab. Pacitan
5.1.4.05.19.	Asosiasi Pemerintahab Kabupaten Selurub Indonesia (APKASI) Kab Pacitan	Untuk Belanja Hibah kepada Asosiasi Pemerintahab Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Kab Pacitan
5.1.4.05.20.	MUI Kabupaten Pacitan	Untuk Bclanja Hibah kepada MUI Kabupaten Pacitan
5.1.4.05.21.	Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kab. Pacitan	Untuk Belanja Hibab kepada Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kab. Pacitan
5.1.4.05.22.	Ketua Badan Pembina Olah Raga Cacat (BPOC) Kab. Pacitan	Untuk Belanja Hibab kepada Ketua Badan Pembina Olah Raga Cacat (BPOC) Kab. Pacitan
5.1.4.05.23.	Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kab. Pacitan	Untuk Belanja Hibab kepada Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kab. Pacitan
5.1.4.05.24.	Ketua PEPABRI Kab. Pacitan	Untuk Belanja Hibab kepada Ketua PEPABRI Kab. Pacitan
5.1.4.05.25.	Ketua Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) Kab. Pacitan	Untuk Belanja Hibab kepada Ketua Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) Kab. Pacitan
5.1.4.05.26.	Ketua DHC '45 Kab. Pacitan (operasional)	Untuk Belanja Hibah kepada Ketua DHC '45 Kab. Pacitan
5.1.4.05.27.	DHC '45 (Palagan Tumpak Rinjing)	Untuk Belanja Hibah kepada DHC '45 Kab. Pacitan untuk palagan tumpak rinjing
5.1.4.05.28.	Ketua Dewan Koperasi Indonesia Daerab (DEKOPINDA) Kab. Pacitan	Untuk Belanja Hibah kepada Ketua Dewan Koperasi Indonesia Daerab (OEKOPINDA) Kab. Pacitan
5.1.4.05.29.	Ketua Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia (HMI) Cab. Pacitan	Untuk Belanja Hibab kepada Ketua Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia (HMI) Cab. Pacitan
5.1.4.05.30.	Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kab. Pacitan	Untuk Belanja Hibah kepada Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kab. Pacitan
5.1.4.05.31.	Kadinh Kabupaten Pacitan	Untuk Belanja Hibah kepada Kadinh Kabupaten Pacitan
5.1.4.05.32.	IPHI kab. Pacitan	Untuk Belanja Hibah kepada IPHI kab. Pacitan
5.1.4.05.33.	FORMI Kab. Pacitan	Untuk Belanja Hibah kepada FORMI Kab. Pacitan
5.1.4.05.34.	Pemuda Panca Marga	Untuk Belanja Hibah kepada Pemuda

Paraf Hierarki		
Sekda	8	
Asisten Pen & Kes	4	
Kepag	2	
Paraf Koordinator		
Asisten		h
PD Pemrakarsa		f
PD Terkait		

KODE	URAIAN	KETERANGAN
1	2	3
		Panca Marga
5.1.4.05.35.	KPU Kab. Pacitan	Untuk Belanja Hibah kepada KPU Kab. Pacitan
5.1.4.05.36.	BOP Kesetaraan	Untuk Belanja Hibah kepada BOP Kesetaraan
5.1.4.05.37.	Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS)	Untuk Belanja Hibah Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS)
5.1.4.05.38.	Insentif Kinerja Kepala/Guru TK/PAUD Non PNS	Untuk Belanja Hibah Insentif Kinerja Kepala/Guru TK/PAUD Non PNS
5.1.4.05.39.	Insentif Kinerja Guru Non PNS	Untuk Belanja Hibah Insentif Kinerja Guru Non PNS
5.1.4.06.	Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat/Perorangan	
5.1.4.06.01.	Kelompok masyarakat/perorangan	Untuk Belanja Hibah kepada Kelompok / Anggota Masyarakat / Organisasi Non Pemerintah.
5.1.4.07.	Belanja Hibah Dana BOS	
5.1.4.07.01.	Belanja Hibah Dana BOS ke SD Swasta	Untuk Belanja Hibah Dana BOS ke SD Swasta.
5.1.4.07.02.	Belanja Hibah Dana BOS ke SMP Swasta	Untuk Belanja Hibah Dana BOS ke SMP Swasta.
5.1.5.	BELANJA BANTUAN SOSIAL	
5.1.5.01.	Belanja Bantuan Sosial Kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan	
5.1.5.01.01.	Belanja bantuan sosial kepada organisasi sosial kemasyarakatan	Untuk Belanja Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan.
5.1.5.01.02.	Bantuan sosial tidak direncanakan (GNOTA)	Untuk Belanja Sosial tidak direncanakan GNOTA.
5.1.5.02.	Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat	
5.1.5.02.01.	Belanja Bantuan Sosial Kelompok Masyarakat	Untuk Belanja Sosial kepada Kelompok Masyarakat.
5.1.5.03.	Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat	
5.1.5.03.01.	Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat	Untuk Belanja Sosial kepada Anggota Masyarakat.
5.1.5.03.02.	Bantuan sosial tidak direncanakan bidang masalah sosial	Untuk Belanja Sosial tidak direncanakan bidang masalah sosial.
5.1.5.03.03.	Bantuan pendidikan siswa miskin Grindulu Mapan	Untuk Belanja Sosial pendidikan siswa miskin Grindulu Mapan.
5.1.5.03.04.	Bantuan sosial tidak direncanakan bidang Pendidikan	Untuk Belanja Sosial tidak direncanakan bidang Pendidikan.
5.1.5.03.05.	Bantuan Pangan daerah Grindulu Mapan	Untuk Belanja Sosial bantuan Pangan daerah Grindulu Mapan.

Paraf Kepala	Paraf Koordinasi
Sekda	Asisten
Asisten Perencanaan	PD Pemrakarsa
Asisten Program	PD Terkait

KODE	URAIAN	KETERANGAN
1	2	3
5.1.5.03.06.	Masyarakat Gangguan Jiwa/Pasung	Untuk Belanja Sosial Masyarakat Gangguan Jiwa/Pasung.
5.1.5.03.07.	Bantuan sosial tidak direncanakan bidang Penanggulangan Bencana	Untuk Belanja Sosial tidak direncanakan bidang Penanggulangan Bencana.
5.1.5.03.08.	Bantuan sosial tidak direncanakan bidang Kesehatan	Untuk Belanja Sosial tidak direncanakan bidang Kesehatan.
5.1.5.03.09.	DAK Perumahan dan Permukiman	Untuk Belanja Bantuan Sosial DAK Perumahan dan Permukiman
5.1.5.03.10.	Bantuan sosial rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	Untuk Belanja Sosial rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.
5.1.5.03.11.	Bantuan Mahasiswa Miskin Berprestasi	Untuk Belanja Bantuan Sosial Mahasiswa Miskin Berprestasi
5.1.5.03.12.	Bantuan Grindulu Mapan	Untuk Belanja Bantuan Sosial bantuan Grindulu mapan
5.1.5.03.13.	Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Untuk Belanja Bantuan Sosial Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
5.1.6.	BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/ KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA	
5.1.6.01.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Provinsi	
5.1.6.01.01.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Provinsi	Untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Provinsi.
5.1.6.02.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota	
5.1.6.02.01.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota	Untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kabupaten / Kota lainnya.
5.1.6.03.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	
5.1.6.03.01.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	Untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa.
5.1.6.04.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Kabupaten/Kota	
5.1.6.04.01.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Kabupaten/Kota	Untuk Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Kabupaten / Kota.
5.1.6.05.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa	
5.1.6.05.01.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa	Untuk Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa.
5.1.6.06.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Parkir	

Paraf Hierarki	
Sekda	✓
Asisten Pemda	+
Keseg. Hukum	+

Berlangganan.	
Asisten	h
PD Pemrakarsa	f
PD Terkait	f

KODE	URAIAN	KETERANGAN
1	2	3
5.1.6.06.01.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Berlangganan	Untuk Belanja Bagi Hasil Retribusi Parkir Berlangganan.
5.1.6.08.	Belanja Bagi Hasil Pajak daerah Kepada Pemerintah Desa Di Kecamatan Pacitan	
5.1.6.08.01.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Kembang	Untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Kembang.
5.1.6.08.02.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Sukoharjo	Untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Sukoharjo.
5.1.6.08.03.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Kayen	Untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Kayen.
5.1.6.08.04.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Sirnohoyo	Untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Sirnohoyo.
5.1.6.08.05.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Arjowinangun	Untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Arjowinangun.
5.1.6.08.06.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Bangunsari	Untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Bangunsari.
5.1.6.08.07.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Sedeng	Untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Sedeng.
5.1.6.08.08.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Sumberharjo	Untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Sumberharjo.
5.1.6.08.09.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Tanjungsari	Untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Tanjungsari.
5.1.6.08.10.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Menadi	Untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Menadi.
5.1.6.08.11.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Mentoro	Untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Mentoro.
5.1.6.08.12.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Purworejo	Untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Purworejo.
5.1.6.08.13.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Nanggungun.	Untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Nanggungun.
5.1.6.08.14.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Widoro	Untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Widoro.

Parat hierarki		Parat Koordinasi	
Sekda	✓	Asisten	✓
Asisten Perencanaan	✓	PD Pemrakarsa	✓
	✓	PD Terkait	✓

KODE	URAIAN	KETERANGAN
1	2	3
5.1.6.08.15.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Semanten	Untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Semanten.
5.1.6.08.16.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Samhong	Untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Samhong.
5.1.6.08.17.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Banjarsari	Untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Banjarsari.
5.1.6.08.18.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Bolosingo	Untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Bolosingo.
5.1.6.08.19.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Ponggok	Untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Ponggok.
5.1.6.08.20.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Tamhacrejo	Untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Tamhacrejo.
5.1.6.09.	Belanja Bagi Hasil Pajak daerah Kepada Pemerintah Desa Di Kecamatan Kehonagung	
5.1.6.09.01.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Plimnbringung	Untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Plimhungan.
5.1.6.09.02.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Karangnongko	Untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Karangnongko.
5.1.6.09.03.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Kalipelus	Untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Kalipelus.
5.1.6.09.04.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Katipugal	Untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Katipugal.
5.1.6.09.05.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Klesem	Untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Klesem.
5.1.6.09.06.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Sidomulyo	Untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Sidomulyo.
5.1.6.09.07.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Wora Wari	Untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Wora Wari.
5.1.6.09.08.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Mantren	Untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Mantren.
5.1.6.09.09.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Gawang.	Untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Gawang.

Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten Perencanaan & Kasubid	
Kabag Hukum	

Paraf Koordinasi	
Asisten	
PD Pemrakarsa	
PD Terkait	

KODE	URAIAN	KETERANGAN
1	2	3
5.1.6.09.10.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Karanganyar	Untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Karanganyar.
5.1.6.09.11.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kehonagung	Untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Kehonagung.
5.1.6.09.12.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Purwoasri	Untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Purwoasri.
5.1.6.09.13.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Banjarjo	Untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Banjarjo.
5.1.6.09.14.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Gemhuk	Untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Gemhuk.
5.1.6.09.15.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Sanggrahan	Untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Sanggrahan.
5.1.6.09.16.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Punjung	Untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Punjung.
5.1.6.09.17.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Wonogondo	Untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Wonogondo.
5.1.6.09.18.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Ketepung	Untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Ketepung.
5.1.6.09.19.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Ketro	Untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Ketro.
5.1.6.10.	Belanja Bagi Hasil Pajak daerah Kepada Pemerintah Desa Di Kecamatan Arjosari	
5.1.6.10.01.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Mlati	Untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Mlati.
5.1.6.10.02.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Sedayu	Untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Sedayu.
5.1.6.10.03.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Tremas	Untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Tremas.
5.1.6.10.04.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Arjosari	Untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Arjosari.
5.1.6.10.05.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Gunungsari	Untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Gunungsari.
5.1.6.10.06.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada	Untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Pagutan.

Paraf Hierarki		Paraf Koordinasi	
Sekda	✓	Asisten	h
Asst. Pem. & Kasub	✓	PD Pemrakarsa	h
Kabag Hukum	h	PD Terkait	

KODE	URAIAN	KETERANGAN
1	2	3
	Pemerintah Desa Pagutan	
5.1.6.10.07.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Gemhong	Untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Gembong.
5.1.6.10.08.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Borang	Untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Borang.
5.1.6.10.09.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Gegeran	Untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Gegeran.
5.1.6.10.10.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Kedungbendo	Untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Kedunghendo.
5.1.6.10.11.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Mangunharjo	Untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Mangunharjo.
5.1.6.10.12.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Jetis Kidul	Untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Jetis Kidul.
5.1.6.10.13.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Temon	Untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Temon.
5.1.6.10.14.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Jatimalang	Untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Jatimalang.
5.1.6.10.15.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Gayuhan	Untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Gayuhan.
5.1.6.10.16.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Karangreja	Untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Karangreja.
5.1.6.10.17.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Karanggede	Untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Karanggede.
5.1.6.11.	Belanja Bagi Hasil Pajak daerah Kepada Pemerintah Desa Di Kecamatan Pringkuku	
5.1.6.11.01.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Watukarung	Untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Watukarung.
5.1.6.11.02.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Dersono	Untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Dersono.
5.1.6.11.03.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Sugihwaras	Untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Sugihwaras.
5.1.6.11.04.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada	Untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Jluhang.

Paraf Hierarki		Paraf Koordinasi	
Sekda	<i>[Signature]</i>	Asisten _____	<i>[Signature]</i>
A. Kab. Pen. & Desa	<i>[Signature]</i>	PD Pemrakarsa	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>	PD Terkait	<i>[Signature]</i>




KODE	URAIAN	KETERANGAN
1	2	3
	Pemerintah Desa Jlubang	
5.1.6.11.05.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Candi	Untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Candi.
5.1.6.11.06.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Poko	Untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Poko.
5.1.6.11.07.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Dadapan	Untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Dadapan.
5.1.6.11.08.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Pringkuku	Untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Pringkuku.
5.1.6.11.09.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Sobo	Untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Sobo.
5.1.6.11.10.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Ngadirejan	Untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Ngadirejan.
5.1.6.11.11.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Glinggangan	Untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Glinggangan.
5.1.6.11.12.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Pelem	Untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Pelem.
5.1.6.11.13.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Tamanasri	Untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Tamanasri.
5.1.6.12.	Belanja Bagi Hasil Pajak daerah Kepada Pemerintah Desa Di Kecamatan Punung	
5.1.6.12.01.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Homo	Untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Bomo.
5.1.6.12.02.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Sooko	Untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Sooko.
5.1.6.12.03.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Punung	Untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Punung.
5.1.6.12.04.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Mendolo Kidul	Untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Mendolo Kidul.
5.1.6.12.05.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Mendolo Lor	Untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Mendolo Lor.
5.1.6.12.06.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Kendal	Untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Kendal.




Paraf Hierarki		Paraf Koordinasi	
Sekda	✓	Asisten	h
Asisten Pembantu	h	PD Pemrakarsa	h
Kabag	h	PD Terkait	h

KODE	URAIAN	KETERANGAN
1	2	3
5.1.6.12.07.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Piton	Untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Piton.
5.1.6.12.08.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Wareng	Untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Wareng.
5.1.6.12.09.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Mantren	Untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Mantren.
5.1.6.12.10.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Ploso	Untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Ploso.
5.1.6.12.11.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Gondosari	Untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Gondosari.
5.1.6.12.12.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Tinatar	Untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Tinatar.
5.1.6.12.13.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Kebonsari	Untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Kebonsari.
5.1.6.13.	Belanja Bagi Hasil Pajak daerah Kepada Pemerintah Desa Di Kecamatan Donorojo	
5.1.6.13.01.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Widoro	Untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Widoro.
5.1.6.13.02.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Sawahan	Untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Sawahan.
5.1.6.13.03.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Kalak	Untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Kalak.
5.1.6.13.04.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Sendang	Untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Sendang.
5.1.6.13.05.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Klepu	Untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Klepu.
5.1.6.13.06.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Gedampol	Untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Gedampol.
5.1.6.13.07.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Cemeng	Untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Cemeng.
5.1.6.13.08.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Gendaran	Untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Gendaran.
5.1.6.13.09.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Sukodono	Untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Sukodono.

Paraf H. Bradi	Paraf Koordinasi
Sekda	Asisten _____
As. Sekda	PD Pemrakarsa
As. Staf	PD Terkait

KODE	URAIAN	KETERANGAN
1	2	3
5.1.6.13.10.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Sekar	Untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Sekar.
5.1.6.13.11.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Donorojo	Untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Donorojo.
5.1.6.13.12.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Belah	Untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Belah.
5.1.6.14.	Belanja Bagi Hasil Pajak daerah Kepada Pemerintah Desa Di Kecamatan Tegalombo	
5.1.6.14.01.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Kebondalem	Untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Kebondalem.
5.1.6.14.02.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Gedangan	Untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Gedangan.
5.1.6.14.03.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Ngreco	Untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Ngreco.
5.1.6.14.04.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Kasihan	Untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Kasihan.
5.1.6.14.05.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Pucangombo	Untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Pucangombo.
5.1.6.14.06.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Gemaharjo	Untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Gemaharjo.
5.1.6.14.07.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Ploso	Untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Ploso.
5.1.6.14.08.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Tegalombo	Untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Tegalombo.
5.1.6.14.09.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Kemuning	Untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Kemuning.
5.1.6.14.10.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Tahunan	Untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Tahunan.
5.1.6.14.11.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Tahunan Baru	Untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Tahunan baru.
5.1.6.15.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Di Kecamatan Ngadirojo	

Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten Perencanaan & Kesa	
Kabag Umum	

Paraf Koordinasi	
Asisten	
PD Pemrakarsa	
PD Terkait	

KODE	URAIAN	KETERANGAN
1	2	3
5.1.6.15.01.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Sidomulyo	Untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Sidomulyo.
5.1.6.15.02.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Hadiwarno	Untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Hadiwarno.
5.1.6.15.03.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Tanjungpuro	Untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Tanjungpuro.
5.1.6.15.04.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Hadiluwih	Untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Hadiluwih.
5.1.6.15.05.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Pagerejo	Untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Pagerejo.
5.1.6.15.06.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Wiyoro	Untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Wiyoro.
5.1.6.15.07.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Ngadirojo	Untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Ngadirojo.
5.1.6.15.08.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Bogoharjo	Untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Bogoharjo.
5.1.6.15.09.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Cokrokemhang	Untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Cokrokemhang.
5.1.6.15.10.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Bodag	Untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Bodag.
5.1.6.15.11.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Tanjunglor	Untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Tanjunglor.
5.1.6.15.12.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Nogosari	Untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Nogosari.
5.1.6.15.13.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Cangkring	Untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Cangkring.
5.1.6.15.14.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Wonodadikulon	Untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Wonodadikulon.
5.1.6.15.15.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Wonodadiwetan	Untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Wonodadiwetan.
5.1.6.15.16.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada	Untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Wonokarto.

Paral. Hierarki	
Sekda	6
Asisten Pen. & Kab.	1
Kabag. Hukum	1

Paral. Koordinasi	
Asisten _____	
PD Pemrakarsa	
PD Terkait	

KODE	URAIAN	KETERANGAN
1	2	3
	Pemerintah Desa Wonokarto	
5.1.6.15.17.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Wonoasri	Untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Wonoasri.
5.1.6.15.18.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Wonosoho	Untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Wonosoho.
5.1.6.16.	Belanja Bagi Hasil Pajak daerah Kepada Pemerintah Desa Di Kecamatan Tulakan	
5.1.6.16.01.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Jetak	Untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Jetak.
5.1.6.16.02.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Nglaran	Untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Nglaran.
5.1.6.16.03.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Wonoanti	Untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Wonoanti.
5.1.6.16.04.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Padi	Untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Padi.
5.1.6.16.05.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Kluwih	Untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Kluwih.
5.1.6.16.06.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Bungur	Untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Bungur.
5.1.6.16.07.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Tulakan	Untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Tulakan.
5.1.6.16.08.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Jatigunung	Untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa jatigunung.
5.1.6.16.09.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa kalikuning	Untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Kalikuning.
5.1.6.16.10.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Gasang	Untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Gasang.
5.1.6.16.11.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Ngile	Untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Ngile.
5.1.6.16.12.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Buhakan	Untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Buhakan.
5.1.6.16.13.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Losari	Untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Losari.
5.1.6.16.14.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Ngumhul	Untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Ngumhul

Paraf Literasi	
Sekda	6
Wakil Sekda	4
Ketabag Hukum	1

Paraf Koordinator	
Asisten	
PD Pemrakarsa	
PD Terkait	

KODE	URAIAN	KETERANGAN
1	2	3
5.1.6.16.15.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Wonosidi	Untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Wonosidi.
5.1.6.16.16.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Ketro	Untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Ketro.
5.1.6.17.	Belanja Bagi Hasil Pajak daerah Kepada Pemerintah Desa Di Kecamatan Sudimoro	
5.1.6.17.01.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Pager Kidul	Untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Pager Kidul.
5.1.6.17.02.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Pager Lor	Untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Pager Lor.
5.1.6.17.03.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Sukorejo	Untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Sukorejo.
5.1.6.17.04.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Sudimoro	Untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Sudimoro.
5.1.6.17.05.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Ketanggung	Untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Ketanggung.
5.1.6.17.06.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Klepu	Untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Klepu.
5.1.6.17.07.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Gunungrejo	Untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Gunungrejo.
5.1.6.17.08.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Karang Mulyo	Untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Karang Mulyo.
5.1.6.17.09.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Semhowo	Untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Semhowo.
5.1.6.17.10.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Sumherejo	Untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Sumherejo.
5.1.6.18.	Belanja Bagi Hasil Pajak daerah Kepada Pemerintah Desa Di Kecamatan Nawangan	
5.1.6.18.01.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Gondang	Untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Gondang.
5.1.6.18.02.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Mujing	Untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Mujing.
5.1.6.18.03.	Belanja Bagi Hasil Pajak	Untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah

Paraf Hierarki	Paraf Koordinasi
Sekda	Asisten
Peny. & B	PD Pemrakarsa
	PD Terkait

KODE	URAIAN	KETERANGAN
1	2	3
	Daerah Kepada Pemerintah Desa Sempu	Kepada Pemerintah Desa Sempu.
5.1.6.18.04.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Nawangan	Untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Nawangan.
5.1.6.18.05.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Tokawi	Untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Tokawi.
5.1.6.18.06.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Jetis Lor	Untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Jetis Lor.
5.1.6.18.07.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Penggung	Untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Penggung.
5.1.6.18.08.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Pakis Baru	Untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Pakis Baru.
5.1.6.18.09.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Ngromo	Untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Ngromo.
5.1.6.20.	Belanja Bagi Hasil Pajak daerah Kepada Pemerintah Desa Di Kecamatan Bandar	
5.1.6.20.01.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Bandar	Untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Bandar.
5.1.6.20.02.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Ngunut	Untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Ngunut.
5.1.6.20.03.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Bangunsari	Untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Bangunsari.
5.1.6.20.04.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Watupatok	Untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Watupatok.
5.1.6.20.05.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Petungsinarang	Untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Petungsinarang.
5.1.6.20.06.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Kledung	Untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Kledung.
5.1.6.20.07.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Tumpuk	Untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Tumpuk.
5.1.6.20.08.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Jeruk	Untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Jeruk.
5.1.6.21.	Belanja Bagi Hasil Retribnsi Daerah Kepada	

Para Hierarki	
Sekda	6
Asisten Sekda	1
PD Pemrakarsa	1
PD Terkait	2







Para Koordinasi	
Asisten	
PD Pemrakarsa	
PD Terkait	

KODE	URAIAN	KETERANGAN
1	2	3
	Pemerintah Desa Di Kecamatan Pacitan	
5.1.6.21.01.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Kembang	Untuk Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Kembang.
5.1.6.21.02.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Sukobarjo	Untuk Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Sukobarjo.
5.1.6.21.03.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Kayen	Untuk Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Kayen.
5.1.6.21.04.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Sirnobojo	Untuk Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Sirnobojo.
5.1.6.21.05.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Arjowinangun	Untuk Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Arjowinangun.
5.1.6.21.06.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Bangunsari	Untuk Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Bangunsari.
5.1.6.21.07.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Sedeng	Untuk Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Sedeng.
5.1.6.21.08.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Sumberharjo	Untuk Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Sumberharjo.
5.1.6.21.09.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Tanjungsari	Untuk Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Sirnobojo.
5.1.6.21.10.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Menadi	Untuk Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Menadi.
5.1.6.21.11.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Mentoro	Untuk Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Mentoro.
5.1.6.21.12.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Purworejo	Untuk Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Purworejo.
5.1.6.21.13.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Nanggung	Untuk Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Nanggung.
5.1.6.21.14.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Widoro	Untuk Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Widoro.
5.1.6.21.15.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Semanten	Untuk Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Semanten.

Paraf Hierarki	
Sekda	
Staf	
...	

Paraf Koordinasi	
Asisten	
PD Pemrakarsa	
PD Terkait	

KODE	URAIAN	KETERANGAN
1	2	3
5.1.6.21.16.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Sambong	Untuk Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Sambong.
5.1.6.21.17.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Banjarsari	Untuk Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Banjarsari.
5.1.6.21.18.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Bolosingo	Untuk Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Bolosingo.
5.1.6.21.19.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Punggok	Untuk Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Punggok.
5.1.6.21.20.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Tambakrejo	Untuk Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Tambakrejo.
5.1.6.22.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Di Kecamatan Kebonagung	
5.1.6.22.01.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Plumbungan	Untuk Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Plumbungan.
5.1.6.22.02.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Karangnongko	Untuk Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Karangnongko.
5.1.6.22.03.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Kalipelus	Untuk Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Kalipelus.
5.1.6.22.04.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Kartipugal	Untuk Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Kartipugal.
5.1.6.22.05.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Klesem	Untuk Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Klesem.
5.1.6.22.06.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Sidomulyo	Untuk Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Sidomulyo.
5.1.6.22.07.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Wora Wari	Untuk Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Wora Wari.
5.1.6.22.08.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Mantren	Untuk Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Mantren.
5.1.6.22.09.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Gawang	Untuk Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Gawang.
5.1.6.22.10.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Karanganyar	Untuk Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Karanganyar.

Paraf Hierarki		Paraf Koor/Jinasi	
Sekda		Asisten	
Asisten Perencanaan & Kas		PD Pemrakarsa	
Kabag Hukum		PD Terkait	







KODE	URAIAN	KETERANGAN
1	2	3
5.1.6.22.11.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Kebonagung	Untuk Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Kebonagung.
5.1.6.22.12.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Purwoasri	Untuk Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Purwoasri.
5.1.6.22.13.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Banjarjo	Untuk Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Banjarjo.
5.1.6.22.14.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Gembuk	Untuk Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Gembok.
5.1.6.22.15.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Sanggrahan	Untuk Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Sanggrahan.
5.1.6.22.16.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Punjung	Untuk Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Punjng.
5.1.6.22.17.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Wonogondo	Untuk Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Wonogondo.
5.1.6.22.18.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Ketepung	Untuk Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Ketepung.
5.1.6.22.19.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Ketro	Untuk Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Ketro.
5.1.6.23.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Di Kecamatan Arjosari	
5.1.6.23.01.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Mlati	Untuk Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Mlati.
5.1.6.23.02.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Sedayu	Untuk Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Sedayu.
5.1.6.23.03.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Tremas	Untuk Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Tremas.
5.1.6.23.04.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Arjosari	Untuk Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Arjosari.
5.1.6.23.05.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Gunungsari	Untuk Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Gunungsari.
5.1.6.23.06.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Pagutan	Untuk Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Pagutan
5.1.6.23.07.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Gembong	Untuk Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Gembong.

Paraf Hierarki	Paraf Koordinasi
Sekda	Asisten
Asisten Pemb. Kes	PD Pemrakarsa
Kabag	PD Terkait







KODE	URAIAN	KETERANGAN
1	2	3
5.1.6.23.08.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Borang	Untuk Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Borang.
5.1.6.23.09.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Gegeran	Untuk Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Gegeran.
5.1.6.23.10.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Kedungbendo	Untuk Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Kedungbendo.
5.1.6.23.11.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Mangunharjo	Untuk Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Mangunharjo.
5.1.6.23.12.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Jetis Kidul	Untuk Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Jetis Kidul.
5.1.6.23.13.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Temori	Untuk Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Temon.
5.1.6.23.14.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Jatimalang	Untuk Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Jatimalang.
5.1.6.23.15.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Gayuhan	Untuk Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Gayuhan.
5.1.6.23.16.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Karangrejo	Untuk Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Karangrejo.
5.1.6.23.17.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Karanggede	Untuk Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Karanggede.
5.1.6.24.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Di Kecamatan Pringsuku	
5.1.6.24.01.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Watukarung	Untuk Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Watukarung.
5.1.6.24.02.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Dersono	Untuk Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Dersono.
5.1.6.24.03.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Sugihwaras	Untuk Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Sugihwaras.
5.1.6.24.04.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Jlubang	Untuk Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Jlubang.
5.1.6.24.05.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Candi	Untuk Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Candi.

Paraf Hierarki		Paraf Koordinasi	
Sekda	<input checked="" type="checkbox"/>	Asisten	<input checked="" type="checkbox"/>
Kisat. Pen & Ketr.	<input checked="" type="checkbox"/>	PD Pemrakarsa	<input checked="" type="checkbox"/>
Kabag Hukum	<input checked="" type="checkbox"/>	PD Terkait	<input checked="" type="checkbox"/>

KODE	URAIAN	KETERANGAN
1	2	3
5.1.6.24.06.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Poko	Untuk Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Poko.
5.1.6.24.07.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Dadapan	Untuk Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Dadapan.
5.1.6.24.08.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Pringkuku	Untuk Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Pringkuku.
5.1.6.24.09.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Sobro	Untuk Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Poko.
5.1.6.24.10.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Ngadirejan	Untuk Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Ngadirejan.
5.1.6.24.11.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Glinggangan	Untuk Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Glinggangan.
5.1.6.24.12.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Pelem	Untuk Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Pelem.
5.1.6.24.13.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Tamanasri	Untuk Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Tamanasri.
5.1.6.25.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Di Kecamatan Punung	
5.1.6.25.01.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Homo	Untuk Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Bomo.
5.1.6.25.02.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Sooko	Untuk Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Sooko.
5.1.6.25.03.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Punung	Untuk Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Punung.
5.1.6.25.04.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Mendolo Kidul	Untuk Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Mendolo Kidul.
5.1.6.25.05.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa mendolo Lor	Untuk Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Mendolo Lor.
5.1.6.25.06.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Kendal	Untuk Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Kendal.
5.1.6.25.07.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Piton	Untuk Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Piton.
5.1.6.25.08.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada	Untuk Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Wareng.

Paraf Hierarki	Paraf Koord.nasi
Sekda 	Asisten 
Kat. Pem. & Per. 	PO Pemrakarsa 
Keseg. Hukum 	PO Terkait 

KODE	URAIAN	KETERANGAN
1	2	3
	Pemerintah Desa Wareng	
5.1.6.25.09.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Mantren	Untuk Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Mantren.
5.1.6.25.10.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Ploso	Untuk Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Ploso.
5.1.6.25.11.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Gondosari	Untuk Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Gondosari.
5.1.6.25.12.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Tinatar	Untuk Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Tinatar.
5.1.6.25.13.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Kebonsari	Untuk Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Kebonsari.
5.1.6.26.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Di Kecamatan Donorojo	
5.1.6.26.01.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Widoro	Untuk Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Widoro.
5.1.6.26.02.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Sawahan	Untuk Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Sawahan.
5.1.6.26.03.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Kalak	Untuk Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Kalak.
5.1.6.26.04.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Sendang	Untuk Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Sendang.
5.1.6.26.05.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Klepu	Untuk Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Klepu.
5.1.6.26.06.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Gedompoi	Untuk Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Gedompoi.
5.1.6.26.07.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Cemeng	Untuk Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Cemeng.
5.1.6.26.08.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Gendaran	Untuk Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Gendaran.
5.1.6.26.09.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Sukodono	Untuk Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Sukodono.
5.1.6.26.10.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Sekar	Untuk Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Sekar.
5.1.6.26.11.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada	Untuk Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa

Paraf Hierarki		Paraf Koordinasi	
Sekda		Asisten	
Asisten Pemb. Kas		PD Pemrakarsa	
Kauag. Humas		PD Terkait	

KODE	URAIAN	KETERANGAN
1	2	3
	Pemerintah Desa Donorojo	Donorojo.
5.1.6.26.12.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Belah	Untuk Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Belah.
5.1.6.27.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Di Kecamatan Tegalombo	
5.1.6.27.01.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Kebondalem	Untuk Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Kebondalem.
5.1.6.27.02.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Gedangan	Untuk Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Gedangan.
5.1.6.27.03.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Ngreco	Untuk Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Ngreco.
5.1.6.27.04.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Kasihan	Untuk Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Kasihan.
5.1.6.27.05.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Pucangombo	Untuk Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Pucangombo.
5.1.6.27.06.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Gemabarjo	Untuk Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Gemaharjo.
5.1.6.27.07.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Ploso	Untuk Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Ploso.
5.1.6.27.08.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Tegalombo	Untuk Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Tegalombo.
5.1.6.27.09.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Kemuning	Untuk Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Kemuning.
5.1.6.27.10.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Tahunan	Untuk Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Tahunan.
5.1.6.27.11.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Tahunan Baru	Untuk Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Tahunan Baru.
5.1.6.28.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Di Kecamatan Ngadirojo	
5.1.6.28.01.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Sidomulyo	Untuk Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Sidomulyo.
5.1.6.28.02.	Belanja Bagi Hasil	Untuk Belanja Bagi Hasil Retribusi

Paraf Hierarki		Paraf Koordinasi	
Sekda	✓	Asisten _____	✓
Asisten Sekda	✓	PD Pemrakarsa	✓
Kabag Hukum	✓	PD Terkait	✓

KODE	URAIAN	KETERANGAN
1	2	3
	Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Hadiwarno	Daerah Kepada Pemerintah Desa Hadiwarno.
5.1.6.28.03.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Tanjungpuro	Untuk Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Tanjungpuro.
5.1.6.28.04.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Hadiluwih	Untuk Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Hadiluwih.
5.1.6.28.05.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Pagerejo	Untuk Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Pagerejo.
5.1.6.28.06.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Wiyoro	Untuk Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Wiyoro.
5.1.6.28.07.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Ngadirojo	Untuk Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Ngadirojo.
5.1.6.28.08.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Bogoharjo	Untuk Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Bogoharjo.
5.1.6.28.09.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Cokrokembang	Untuk Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Cokrokembang.
5.1.6.28.10.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Sidomulyo	Untuk Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Sidomulyo.
5.1.6.28.11.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Tanjunglor	Untuk Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Tanjunglor.
5.1.6.28.12.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Nogosari	Untuk Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Nogosari.
5.1.6.28.13.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Cangkring	Untuk Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Cangkring.
5.1.6.28.14.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Wonodadi Kulon	Untuk Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Wonodadi Kulon.
5.1.6.28.15.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Wonodadi Wetan	Untuk Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Wonodadi Wetan.
5.1.6.28.16.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Wonokarto	Untuk Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Wonokarto.
5.1.6.28.17.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada	Untuk Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa

Paraf/Inisial		Paraf/Koordinasi	
Sekda	✓	Asisten	h
Asisten Pembantu Sekda	t	PD Pemrakarsa	f
Kepala Bidang	h	PD Terkait	

KODE	URAIAN	KETERANGAN
1	2	3
	Pemerintah Desa Wonoasri	Wonoasri.
5.1.6.28.18.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Wonosobo	Untuk Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Wonosobo.
5.1.6.29.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Di Kecamatan Tulakan	
5.1.6.29.01.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Jetak	Untuk Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Jetak.
5.1.6.29.02.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Nglaran	Untuk Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Nglaran.
5.1.6.29.03.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Wonoanti	Untuk Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Wonoanti.
5.1.6.29.04.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Padi	Untuk Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Padi.
5.1.6.29.05.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Kluwih	Untuk Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Kluwih.
5.1.6.29.06.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Bungur	Untuk Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Bungur.
5.1.6.29.07.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Tulakan	Untuk Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Tulakan.
5.1.6.29.08.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Jatigunung	Untuk Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Jatigunung.
5.1.6.29.09.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Kalikuning	Untuk Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Kalikuning.
5.1.6.29.10.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Gasang	Untuk Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Gasang.
5.1.6.29.11.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Ngile	Untuk Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Ngile.
5.1.6.29.12.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Bubakan	Untuk Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Bubakan.
5.1.6.29.13.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Losari	Untuk Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Losari.
5.1.6.29.14.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Ngumbul	Untuk Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Ngumbul.
5.1.6.29.15.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Wonosidi	Untuk Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Wonosidi.

Paraf Hiararki		Paraf Koordinasi	
Sekda		Asisten	
Asisten Sekda		PD Pemrakarsa	
Asisten Pembantu Sekda		PD Terkait	

KODE	URAIAN	KETERANGAN
1	2	3
5.1.6.29.16.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Ketro	Untuk Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Ketro.
5.1.6.30.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Di Kecamatan Sudimoro	
5.1.6.30.01.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Pager Kidul	Untuk Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Pager Kidul.
5.1.6.30.02.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Pager Lor	Untuk Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Pager Lor.
5.1.6.30.03.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Sukorejo	Untuk Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Sukorejo.
5.1.6.30.04.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Sudimoro	Untuk Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Sudimoro.
5.1.6.30.05.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Ketanggung	Untuk Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Ketanggung.
5.1.6.30.06.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Klepu	Untuk Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Klepu.
5.1.6.30.07.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Gunungrejo	Untuk Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Gunungrejo.
5.1.6.30.08.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Karang Mulyo	Untuk Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Karang Mulyo.
5.1.6.30.09.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Sembowo	Untuk Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Sembowo.
5.1.6.30.10.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Sumberejo	Untuk Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Sumberejo.
5.1.6.31.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Di Kecamatan Nawangan	
5.1.6.31.01.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Gondang	Untuk Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Gondang.
5.1.6.31.02.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Mujing	Untuk Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Mujing.
5.1.6.31.03.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Sempu	Untuk Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Sempu.

Paraf Hierarki	
Sekda	<input checked="" type="checkbox"/>
Asisten Pemda	<input type="checkbox"/>
Kabag Hukum	<input type="checkbox"/>

Paraf Koordinasi	
Asisten	<input type="checkbox"/>
PD Pemrakarsa	<input type="checkbox"/>
PD Terkait	<input type="checkbox"/>

KODE	URAIAN	KETERANGAN
1	2	3
5.1.6.31.04.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Nawangan	Untuk Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Nawangan.
5.1.6.31.05.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Tokawi	Untuk Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Tokawi.
5.1.6.31.06.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Jetis Lor	Untuk Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Jetis Lor.
5.1.6.31.07.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Penggung	Untuk Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Penggung.
5.1.6.31.08.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Palis Baru	Untuk Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Pakis Baru.
5.1.6.31.09.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Ngromo	Untuk Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Ngromo.
5.1.6.32.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Di Kecamatan Bandar	
5.1.6.32.01.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Bandar	Untuk Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Bandar.
5.1.6.32.02.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Ngunut	Untuk Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Ngunut.
5.1.6.32.03.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Bangunsari	Untuk Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Bangunsari.
5.1.6.32.04.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Watupatok	Untuk Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Watupatok.
5.1.6.32.05.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Petungsinarang	Untuk Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Petungsinarang.
5.1.6.32.06.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Kledung	Untuk Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Kledung.
5.1.6.32.07.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Tumpuk	Untuk Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Tumpuk.
5.1.6.32.08.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Jeruk	Untuk Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Jeruk.
5.1.7.	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA	

Paraf Hierarki	
Sekda	✓
Asisten Sekda	f
Kabag Hukum	2

Paraf Koordinasi	
Asisten	h
PD Pemrakarsa	f
PD Terkait	

KODE	URAIAN	KETERANGAN
1	2	3
	DAN PARTAI POLITIK	
5.1.7.01.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi	
5.1.7.01.01.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi	Untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi.
5.1.7.02.	Belanja Bantuan Keuangan kepada kabupaten/Kota	
5.1.7.02.01.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota	Untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten / Kota..
5.1.7.03.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa	
5.1.7.03.01.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa	Untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa.
5.1.7.04.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah/Pemerintahan Desa lainnya	
5.1.7.04.01.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi	Untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi di luar Jawa Timur.
5.1.7.04.02.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota	Untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten / Kota di luar Jawa Timur.
5.1.7.04.03.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa	Untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan di luar Jawa Timur.
5.1.7.05.	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	
5.1.7.05.01.	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik.	Untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.
5.1.7.05.02.	Belanja Bantuan Kepada Partai Nasdem.	Untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Nasdem.
5.1.7.05.03.	Belanja Bantuan Kepada Partai Keadilan Sejahtera.	Untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Keadilan Sejahtera.
5.1.7.05.04.	Belanja Bantuan Kepada Partai PDI Perjuangan.	Untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai PDI Perjuangan.
5.1.7.05.05.	Belanja Bantuan Kepada Partai GOLKAR.	Untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai GOLKAR.
5.1.7.05.06.	Belanja Bantuan Kepada Partai GERINDRA.	Untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai GERINDRA.
5.1.7.05.07.	Belanja Bantuan Kepada Partai DEMOKRAT.	Untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai DEMOKRAT.
5.1.7.05.08.	Belanja Bantuan Kepada Partai Amanat Nasional.	Untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Amanat Nasional.
5.1.7.05.09.	Belanja Bantuan Kepada Partai Persatuan Pembangunan.	Untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Persatuan Pembangunan.
5.1.7.05.10.	Belanja Bantuan Kepada Partai HANURA.	Untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai HANURA.
5.1.7.05.11.	Belanja Bantuan Kepada Partai Kebangkitan Bangsa.	Untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Kebangkitan Bangsa.
5.1.7.06.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada	

Paraf Hierarki	Paraf Koordinasi
Sekda <input checked="" type="checkbox"/>	Asisten <input type="checkbox"/>
Asisten Perencanaan <input type="checkbox"/>	PD Pemrakarsa <input type="checkbox"/>
Kabag Hukum <input type="checkbox"/>	PD Terkait <input type="checkbox"/>

KODE	URAIAN	KETERANGAN
1	2	3
	Pemerintah Dess di Kecamatan Donorojo	
5.1.7.06.01.	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Belah.	Untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Belah.
5.1.7.06.02.	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Cemeng.	Untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Cemeng.
5.1.7.06.03.	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Donorojo.	Untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Donorojo.
5.1.7.06.04.	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Gedompol.	Untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Gedompol.
5.1.7.06.05.	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Gendaran.	Untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Gendaran.
5.1.7.06.06.	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Kalak.	Untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Kalak.
5.1.7.06.07.	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Klepu.	Untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Klepu.
5.1.7.06.08.	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Sawahan.	Untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Sawahan.
5.1.7.06.09.	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Sekar.	Untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Sekar.
5.1.7.05.10.	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Sendang.	Untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Sendang.
5.1.7.06.11.	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Sukodono.	Untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Snkodonn.
5.1.7.06.12.	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Widoro.	Untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Widoro.
5.1.7.07.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Punung	
5.1.7.07.01.	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Bnmn.	Untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Domo.
5.1.7.07.02.	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Gondosari.	Untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Gondosari.
5.1.7.07.03.	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Kebonsari.	Untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Kebonsari.
5.1.7.07.04.	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Kendal.	Untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Kendal.
5.1.7.07.05.	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Mantren.	Untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Mantren.

Part. Hierarchy		Asisten	
Sekda	✓	PD Pemrakarsa	✓
Asisten Pembantu Kepala	✓	PD Terkait	✓
Kebag. Hukum	✓		

KODE	URAIAN	KETERANGAN
1	2	3
5.1.7.07.06.	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Mendolo Kidul.	Untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Mendolo Kidul.
5.1.7.07.07.	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Mendolo Lor.	Untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Mendolo Lor.
5.1.7.07.08.	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Piton.	Untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Piton.
5.1.7.07.09.	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Ploso.	Untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Ploso.
5.1.7.07.10.	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Punung.	Untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Punung.
5.1.7.07.11.	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Sooko.	Untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Sooko.
5.1.7.07.12.	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tinatar.	Untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tinatar.
5.1.7.07.13.	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Wareng.	Untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Wareng.
5.1.7.08.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Pringkuku	
5.1.7.08.01.	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Candi.	Untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Candi.
5.1.7.08.02.	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Dadapan.	Untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Dadapan.
5.1.7.08.03.	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Dersono.	Untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Dersono.
5.1.7.08.04.	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Glinggangan.	Untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Glinggangan.
5.1.7.08.05.	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Jlubang.	Untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Jlubang.
5.1.7.08.06.	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Ngadirejan.	Untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Ngadirejan.
5.1.7.08.07.	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Pelem.	Untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Pelem.
5.1.7.08.08.	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Poko.	Untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Poko.
5.1.7.08.09.	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Pringkuku.	Untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Pringkuku.
5.1.7.08.010.	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa	Untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Sobo.

Paralel		Asisten	
Sekda	✓	PD Pemrakarsa	✓
Asisten Pembantu Kepala	✓	PD Terkait	✓
Kabag Hukum	✓		

KODE	URAIAN	KETERANGAN
1	2	3
	Sobo.	
5.1.7.08.11.	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Sugihwaras.	Untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa sugihwaras.
5.1.7.08.12.	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tamanasri.	Untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tamanasri
5.1.7.08.13.	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Watukarung.	Untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Watukarung.
5.1.7.09.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Pacitan	
5.1.7.09.01.	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Arjowinangun.	Untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Arjowinangun.
5.1.7.09.02.	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Bangunsari.	Untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Bangunsari.
5.1.7.09.03.	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Banjarsari.	Untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Banjarsari.
5.1.7.09.04.	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Bolosingo.	Untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Bolosingo.
5.1.7.09.05.	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Kayen.	Untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Kayen.
5.1.7.09.06.	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Kembang.	Untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Kembang.
5.1.7.09.07.	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Menadi.	Untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Menadi.
5.1.7.09.08.	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Mentoro.	Untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Mentoro.
5.1.7.09.09.	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Nanggung.	Untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Nanggung.
5.1.7.09.10.	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Ponggok.	Untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Ponggok.
5.1.7.09.11.	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Purworejo.	Untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Purworejo.
5.1.7.09.12.	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Sambong.	Untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Sambong.
5.1.7.09.13.	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Sedeng.	Untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Sedeng.
5.1.7.09.14.	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Semanten.	Untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Semanten.

Revisi Hierarchy	
Sekda	7
Asisten Sekda	1
Asisten Sekda	2







Paraf Koordinasi	
Asisten	h
PD Pemrakarsa	f
PD Terkait	

KODE	URAIAN	KETERANGAN
1	2	3
5.1.7.09.15.	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Sirnobojo.	Untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Sirnobojo.
5.1.7.09.16.	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Sukoharjo.	Untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Sukoharjo.
5.1.7.09.17.	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Sumberharjo.	Untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Sumberharjo.
5.1.7.09.18.	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tambakrejo.	Untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tambakrejo.
5.1.7.09.19.	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tanjungsari.	Untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tanjungsari.
5.1.7.09.20.	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Widoro.	Untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Widoro.
5.1.7.10.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Kebonagung	
5.1.7.10.01.	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Banjarjo.	Untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Banjarjo.
5.1.7.10.02.	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Gawang.	Untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Gawang.
5.1.7.10.03.	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Gembuk.	Untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Gembuk.
5.1.7.10.04.	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Kalipelus.	Untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Kalipelus.
5.1.7.10.05.	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Karanganyar.	Untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Karanganyar.
5.1.7.10.06.	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Karangnongko.	Untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Karangnongko.
5.1.7.10.07.	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Katipugal.	Untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Katipugal.
5.1.7.10.08.	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Kebonagung.	Untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Kebonagung.
5.1.7.10.09.	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Ketepung.	Untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Ketepung.
5.1.7.10.10.	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Ketro.	Untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Ketro.
5.1.7.10.11.	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Klesem.	Untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Klesem.
5.1.7.10.12.	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa	Untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Mantren.

Paraf Hierarki	
Sekda	✓
Asisten Pen & Kabag Hukum	f
Kabag Hukum	g

Paraf Koordinasi	
Asisten	h
PD Pemrakarsa	f
PD Terkait	

KODE	URAIAN	KETERANGAN
1	2	3
	Mantren.	
5.1.7.10.13.	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Plumbungan.	Untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Plumbungan.
5.1.7.10.14.	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Punjung.	Untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Punjung.
5.1.7.10.15.	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Purwoasri.	Untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Purwoasri.
5.1.7.10.16.	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Sanggrahan.	Untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Sanggrahan.
5.1.7.10.17.	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Sidomulyo.	Untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Sidomulyo.
5.1.7.10.18.	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Wonogondo.	Untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Wonogondo.
5.1.7.10.19.	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Wora Wari.	Untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Wora Wari.
5.1.7.11.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Arjosari	
5.1.7.11.01.	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Arjosari.	Untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Arjosari.
5.1.7.11.02.	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Borang.	Untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Borang.
5.1.7.11.03.	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Gayuhan.	Untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Gayuhan.
5.1.7.11.04.	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Gegeran.	Untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Gegeran.
5.1.7.11.05.	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Gembong.	Untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Gembong.
5.1.7.11.06.	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Gunungsari.	Untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Gunungsari.
5.1.7.11.07.	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Jatimalang.	Untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Jatimalang.
5.1.7.11.08.	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Jetis Kidul.	Untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Jetis Kidul.
5.1.7.11.09.	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Karanggede.	Untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Karanggede.
5.1.7.11.10.	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Karangrejo.	Untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Karangrejo.

Paraf Hierarki	Paraf Koordinasi
Sekda 	Asisten 
Asisten Pem & Kasub 	PD Pemrakarsa 
Kabag Hukum 	PD Terkait 

KODE	URAIAN	KETERANGAN
1	2	3
5.1.7.11.11.	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Kedungbendo.	Untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Kedungbendo.
5.1.7.11.12.	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Mangunharjo.	Untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Mangunharjo.
5.1.7.11.13.	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Mlati.	Untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Mlati.
5.1.7.11.14.	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Pagutan.	Untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Pagutan.
5.1.7.11.15.	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Sedayu.	Untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Sedayu.
5.1.7.11.16.	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Temon.	Untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Temon.
5.1.7.11.17.	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tremas.	Untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tremas.
5.1.7.12.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Nawangan	
5.1.7.12.01.	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Gondang.	Untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Gondang.
5.1.7.12.02.	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Jetislor.	Untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Jetislor.
5.1.7.12.03.	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Mujing.	Untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Mujing.
5.1.7.12.04.	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Nawangan.	Untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Nawangan.
5.1.7.12.05.	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Ngrumo.	Untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Ngrumo.
5.1.7.12.06.	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Pakisbaru.	Untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Pakisbaru.
5.1.7.12.07.	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Penggung.	Untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Penggung.
5.1.7.12.08.	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Sempu.	Untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Sempu.
5.1.7.12.09.	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tokawi.	Untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tokawi.
5.1.7.13.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Bandar	

Paraf Hierarki		Paraf Koordinasi	
Sekda	✓	Asisten	h
Asst. Pemb. Kes	h	PD Pemrakarsa	h
Kabag. Hukum	h	PD Terkait	h

KODE	URAIAN	KETERANGAN
1	2	3
5.1.7.13.01.	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Bandar.	Untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Bandar.
5.1.7.13.02.	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Bangunsari.	Untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Bangunsari.
5.1.7.13.03.	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Jeruk.	Untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Jeruk.
5.1.7.13.04.	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Kledung.	Untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Kledung.
5.1.7.13.05.	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Ngunut.	Untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Ngunut.
5.1.7.13.06.	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Petungsinarang.	Untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Petungsinarang.
5.1.7.13.07.	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tumpuk.	Untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tumpuk.
5.1.7.13.08.	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Watupatok.	Untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Watupatok.
5.1.7.14.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Tegalombo	
5.1.7.14.01.	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Gedangan.	Untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Gedangan.
5.1.7.14.02.	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Gemaharjo.	Untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Gemaharjo.
5.1.7.14.03.	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Kasihan.	Untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Kasihan.
5.1.7.14.04.	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Kebondalem.	Untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Kebondalem.
5.1.7.14.05.	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Kemuning.	Untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Kemuning.
5.1.7.14.06.	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Ngreco.	Untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Ngreco.
5.1.7.14.07.	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Ploso.	Untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Ploso.
5.1.7.14.08.	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Pucangombo.	Untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Pucangombo.
5.1.7.14.09.	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahunan.	Untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahunan.
5.1.7.14.10.	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa	Untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahunan Baru.

Paraf Hierarki	Paraf Koordinasi
Sekda <input checked="" type="checkbox"/>	Asisten <input checked="" type="checkbox"/>
Asy. Pemb. Kes. <input checked="" type="checkbox"/>	PD Pemrakarsa <input checked="" type="checkbox"/>
Kabag. Hukum <input checked="" type="checkbox"/>	PD Terkait <input checked="" type="checkbox"/>

KODE	URAIAN	KETERANGAN
1	2	3
	Tahunan Baru.	
5.1.7.14.11.	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tegalombo.	Untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tegalombo.
5.1.7.15.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Tulakan	
5.1.7.15.01.	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Bubakan.	Untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Bubakan.
5.1.7.15.02.	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Bungur.	Untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Bungur.
5.1.7.15.03.	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Gasang.	Untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Gasang.
5.1.7.15.04.	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Jatigunung.	Untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Jatigunug.
5.1.7.15.05.	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Jetak.	Untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Jetak.
5.1.7.15.06.	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa kalikuning.	Untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Kalikuning.
5.1.7.15.07.	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Ketro.	Untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Ketro.
5.1.7.14.08.	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Kluwih.	Untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Kluwih.
5.1.7.15.09.	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Losari.	Untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Losari.
5.1.7.15.10.	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Ngile.	Untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Ngile.
5.1.7.15.11.	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Nglaran.	Untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Nglaran.
5.1.7.15.12.	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Ngumbul.	Untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Ngumbul.
5.1.7.15.13.	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Padi.	Untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Padi.
5.1.7.15.14.	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tulakan.	Untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tulakan.
5.1.7.15.15.	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Wonoanti.	Untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Wonoanti.
5.1.7.15.16.	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Wonosidi.	Untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Wonosidi.

Paraf Hierarki		Paraf Koordinasi	
Sekda	✓	Asisten _____	h
Asisten Sekda	l	PD Pemrakarsa	y
Kabag Hukum	x	PD Terkait	

KODE	URAIAN	KETERANGAN
1	2	3
5.1.7.16.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Ngadirojo	
5.1.7.16.01.	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Bodag.	Untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Bodag.
5.1.7.16.02.	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Bogoharjo.	Untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Bogoharjo.
5.1.7.16.03.	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Cangkring.	Untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Cangkring.
5.1.7.16.04.	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Cokrokembang.	Untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Cokrokembang.
5.1.7.16.05.	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Hadiluwih.	Untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Hadiluwih.
5.1.7.16.06.	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Hadiwarno.	Untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Hadiwarno.
5.1.7.16.08.	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Ngadirojo.	Untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Ngadirojo.
5.1.7.16.09.	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Nogosari.	Untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Nogosari.
5.1.7.16.10.	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Pagerejo.	Untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Pagerejo.
5.1.7.16.11.	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Sidomulyo.	Untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Sidomulyo.
5.1.7.16.12.	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tanjunglor.	Untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tanjunglor.
5.1.7.16.13.	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tanjungpuro.	Untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tanjungpuro.
5.1.7.16.14.	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Wiyoro.	Untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Wiyoro.
5.1.7.16.15.	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Wonoasri.	Untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Wonoasri.
5.1.7.16.16.	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Wonodadi Kulon.	Untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Wonodadi Kulon.
5.1.7.16.17.	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Wonodadi Wetan.	Untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Wonodadi Wetan.
5.1.7.16.18.	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa	Untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Wonokarto.







Paraf Hierarki	
Sekda	<input checked="" type="checkbox"/>
Asisten Sekda	<input type="checkbox"/>
Kabag Hukum	<input type="checkbox"/>

Paraf Koordinasi	
Asisten	<input checked="" type="checkbox"/>
PD Pemrakarsa	<input type="checkbox"/>
PD Terkait	<input type="checkbox"/>

KODE	URAIAN	KETERANGAN
1	2	3
	Wonokarto.	
5.1.7.16.19.	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Wanasoba.	Untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Wonosobo.
5.1.7.17.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Sudimoro	
5.1.7.17.01.	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Gunungrejo.	Untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Gunungrejo.
5.1.7.17.02.	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Karangmulyo.	Untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Karangmulyo.
5.1.7.17.03.	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Ketanggung.	Untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Ketanggung.
5.1.7.17.04.	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Klepu.	Untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Klepu.
5.1.7.17.05.	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Pagerkidul.	Untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Pagerkidul.
5.1.7.17.06.	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Pagerlor.	Untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Pagerlor.
5.1.7.17.07.	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Sembowo.	Untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Sembowo.
5.1.7.17.08.	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Sudimoro.	Untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Sudimoro.
5.1.7.17.09.	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Sukorejo.	Untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Sukorejo.
5.1.7.17.10.	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Sumberejo.	Untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Sumberejo.
5.1.8.	BELANJA TIDAK TEKDUGA	
5.1.8.01.	Belanja Tidak Terduga.	
5.1.8.01.01.	Belanja Tidak Terduga	Untuk Belanja Tidak Terduga untuk keperluan mendesak yang ditetapkan dalam APBD Pemerintah Kabupaten Pacitan.
5.2.	BELANJA LANGSUNG	
5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	
5.2.1.01.	Honorarium PNS	
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	Untuk pembayaran Honorarium pengelola keuangan dan barang, panitia/Tim pelaksana Kegiatan bagi PNS maupun Non PNS yang ditetapkan dengan surat Keputusan Bupati atau Kepala OPD
5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	Untuk Biaya Honorarium Bagi PNS yang mendapat Tugas sebagai Tim Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan

Paraf Hierarki		Paraf Koordinasi	
Sekda	✓	Asisten	h
Asisten Pem & Pesa	t	PD Pemrakarsa	f
Kabag Hukum	2	PD Terkait	

KODE	URAIAN	KETERANGAN
1	2	3
		Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan.
5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	Untuk Biaya Honorarium Bagi PNS yang mendapat Tugas sebagai Panitia/Pejabat Pemeriksa Barang dan Jasa, serta pengawas lapangan PNS dan Non PNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan.
5.2.1.01.04.	Honorarium Tim Penilaian Angka Kredit	Untuk Biaya Honorarium Bagi PNS yang mendapat Tugas sebagai Tim Penilaian Angka Kredit di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan.
5.2.1.01.05.	Honorarium Tim Perencana Pengadaan Tanah	Untuk Biaya Honorarium Bagi PNS yang mendapat Tugas sebagai Tim Perencana Pengadaan Tanah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan.
5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	Untuk Biaya Honorarium Bagi PNS yang mendapat Tugas sebagai panitia/pejabat Penerima Hasil Pekerjaan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan.
5.2.1.01.07.	Honorarium Penilik	Untuk Biaya Honorarium Bagi PNS yang mendapat Tugas sebagai penilik di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan.
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	
5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	Untuk Biaya Honorarium Tenaga Honorer/ Pegawai Tidak Tetap di lingkungan pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan. Contoh: 1.Upah honorer Daerah 2.Upah tenaga PP31.
5.2.1.03.	Uang Lembur	
5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	Untuk Pemberian Uang Lembur bagi tenaga PNS yang melaksanakan pekerjaan pada waktu diluar jam kerja pada hari kerja.
5.2.1.03.02.	Uang Lembur Non PNS	Untuk Pemberian Uang Lembur bagi tenaga Honorer Daerah / tenaga harian lepas yang melaksanakan pekerjaan pada waktu diluar jam kerja pada hari kerja.
5.2.1.04.	Jasa Pemungutan	
5.2.1.04.02.	Jasa Pemungutan Pajak Daerah dan PBB	Untuk Pemberian Jasa Pemungutan Pajak Daerah dan PBB
5.2.1.06.	Honorarium Pengelolaan Dana BLUD	
5.2.1.06.01.	Honorarium Pengelolaan Dana BLUD	Untuk Pemberian Honorarium Pengelolaan Dana BLUD.
5.2.1.07.	Belanja Pegawai BOS	
5.2.1.07.01.	Belanja Pegawai BOS	Untuk Belanja Pegawai BOS.
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	
5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	Untuk Pembelian Kebutuhan peralatan/Alat Tulis kantor dengan masa

Paraf Hierarchy	Paraf Koordinasi
Sekda 	Asisten 
Asisten Pem. & Kab. 	PD Pemrakarsa 
Kabag Hukum 	PD Terkait 

KODE	URAIAN	KETERANGAN
1	2	3
		pakai kurang dari 12 bulan atau pakai habis
5.2.2.01.02.	Belanja dokumen/ administrasi tender	Untuk Pengadaan dokumen dan Adminitrasi pengadaan barang dan jasa untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Paaitan.
5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pljar, battery kering)	Untuk Pembelian Alat Listrik dan Elektronik dengan masa pakai kurang dari 12 Bulan atau pakai habis.
5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	Untuk pembelian perangko, materai dan benda pos lainnya.
5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	Untuk pembelian peralatan kebersihan dan bahan pembersih dengan masa pakai kurang dari 12 bulan atau pakai habis
5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	Untuk Pembelian bahan bakar minyak dan gas.
5.2.2.01.07.	Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran	Untuk biaya pengisian tabung pemadam kebakaran.
5.2.2.01.08.	Belanja pengisian tabung gas	Untuk biaya pengisian tabung gas.
5.2.2.01.09.	Belanja Peralatan Penunjang Kesehatan	Pembelian alat kesehatan dengan masa pakai kurang dari 12 bulan atau sekali pakai.
5.2.2.01.10.	Belanja pengadaan blanko Cek/Giro	Untuk Pembelian Cek/giro
5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	Untuk Mengalokasikan kebutuhan dokumentasi.
5.2.2.01.12.	Belanja Kotak Saran	Untuk pengeluaran atas pembelian Kotak Saran
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	
5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	Untuk mengalokasikan biaya bahan baku bangunan / material tidak termasuk upah pemasangan
5.2.2.02.02.	Belanja bahan/bibit tanaman	Untuk mengalokasikan pengandaan bahan/bibit tanaman.
5.2.2.02.03.	Belanja bibit ternak	Untuk mengalokasikan pengadaan bibit ternak.
5.2.2.02.04.	Belanja bahan obat-obatan	Untuk mengalokasikan pengadaan obat - obatan
5.2.2.02.05.	Belanja bahan kimia	Untuk mengalokasikan kebutuhan bahan kimia.
5.2.2.02.06.	Belanja Tropy/Piagam/Hadiah	Untuk mengalokasikan biaya kegiatan / pekerjaan pengadaan Tropy/Piagam/Hadiah.
5.2.2.02.07.	Belanja Pakan Ternak	Untuk mengalokasikan biaya kegiatan / pekerjaan pengadaan Pakan Ternak.
5.2.2.02.08.	Belanja bahan pupuk	Untuk mengalokasikan biaya kegiatan / pekerjaan pengadaan Bahan Pupuk.
5.2.2.02.09.	Belanja bibit ikan dan pakan	Untuk mengalokasikan biaya kegiatan / pekerjaan pengadaan Bibit Ikan dan Pakan.
5.2.2.02.10.	Bahan Baku Perikanan	Untuk mengalokasikan biaya kegiatan / pekerjaan pengadaan Bahan Baku Perikanan.
5.2.2.02.11.	Belanja Bahan Makanan	Untuk mengalokasikan biaya kegiatan / pekerjaan pengadaan Bahan Makanan.
5.2.2.02.12.	Belanja Bahan Baku	Untuk mengalokasikan biaya kegiatan /

Paraf Hierarki	
Sekda	✓
Asisten Pem. & Kab. Paaitan	✓
Kabag. Perencanaan	✓

Paraf Koordinasi	h
Asisten _____	
PD Pemrakarsa	✓
PD Terkait	

KODE	URAIAN	KETERANGAN
1	2	3
	Industri	pekerjaan pengadaan Bahan Baku Industri.
5.2.2.02.13.	Belanja Bahan Praktik/Peraga / pelatihan / Dikiat	Untuk mengalokasikan biaya kegiatan / pekerjaan pengadaan Bahan Praktik/Peraga/pelatihan /Diklat (catatan : tidak boleh langsung discrahkan sebelum proses dihibahkan)
5.2.2.02.14.	Belanja Peralatan Industri	Untuk mengalokasikan biaya kegiatan / pekerjaan pengadaan Peralatan Industri.
5.2.2.02.15.	Belanja Induk hewan dan tumbuhan	Untuk mengalokasikan biaya kegiatan / pekerjaan pengadaan Induk hewan dan tumbuhan.
5.2.2.02.16.	Belanja Bingkai / Figura Lambang / Logo /Lukisan / Hiasan Binding	Untuk mengalokasikan biaya kegiatan / pekerjaan pengadaan Bingkai /Figura Lambang/ Logo/ Lukisan /Hiasan Binding.
5.2.2.02.17	Belanja Souvenir	Untuk mengalokasikan biaya kegiatan / pekerjaan pengadaanSouvenir..
5.2.2.02.18.	Belanja Bahan Baku Peternakan	Untuk mengalokasikan biaya kegiatan / pekerjaan pengadaan Bahan Baku Peternakan.
5.2.2.02.19.	Belanja Bahan Cadangan Pangan	Untuk mengalokasikan biaya kegiatan / pekerjaan pengadaan Bahan Cadangan Pangan.
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	
5.2.2.03.01.	Belanja telepon	Untuk mengalokasikan kebutuhan jasa kantor bernpa pembayaran rekening Telepon termasuk Speedy.
5.2.2.03.02.	Belanja air	Untuk mengalokasikan biaya rekening air.
5.2.2.03.03.	Belanja listrik	Untuk mengalokasikan biaya rekening listrik meliputi pra dan pasca bayar, tambah daya dan pemasangan barn
5.2.2.03.04.	Belanja Jasa pengumuman lelang/ pemenang lelang	Untuk mengalokasikan biaya Publikasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan melalui media cetak / elektronik .
5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	Untuk mengalokasikan biaya berlangganan surat kabar, majalah atau terbitan lainnya.
5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet/ televisi	Untuk mengalokasikan biaya kawat, Faksimili , Internet, Domain, Hosting dan televisi.
5.2.2.03.07.	Belanja paket/pengiriman	Untuk mengalokasikan biaya pengiriman barang, surat / dokumen melalui jasa kurir / ekspedisi.
5.2.2.03.08.	Belanja Sertifikasi	Untuk mengalokasikan biaya sertifikasi antara lain Audit ISO, HAKI, Hak Paten,
5.2.2.03.09.	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	Untuk mengalokasikan biaya jasa transaksi Keuangan melalui perbankan atau transaksi keuangan.
5.2.2.03.10.	Belanja jasa administrasi pemungutan Pajak Penerangan Jalan Umum	Untuk mengalokasikan biaya jasa administrasi pungutan pajak penerangan jalan umum.
5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Administrasi Penyelesaian Perkara	Untuk mengalokasikan biaya jasa administrasi Penyelesaian Perkara.

Paraf Hierarki	
Sekda	<input checked="" type="checkbox"/>
Asisten Pembantu Sekda	<input type="checkbox"/>
Kabag	<input checked="" type="checkbox"/>

Paraf Koordinasi	
Asisten	<input checked="" type="checkbox"/>
PD Pemrakarsa	<input type="checkbox"/>
PD Terkait	<input type="checkbox"/>

KODE	URAIAN	KETERANGAN
1	2	3
5.2.2.03.12.	Belanja pemasangan iklan	Untuk mengalokasikan biaya Pemasangan Iklan.
5.2.2.03.13.	Belanja Layanan Kesehatan	Untuk mengalokasikan biaya Administrasi Layanan Kesehatan.
5.2.2.03.14.	Belanja Jasa Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah	Untuk mengalokasikan biaya Jasa Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah.
5.2.2.03.15.	Belanja Jasa Media	Untuk mengalokasikan biaya Jasa Media.
5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Laundry	Untuk mengalokasikan biaya Jasa Laundry.
5.2.2.03.17.	Belanja Jasa Medis/Paramedis	Untuk mengalokasikan biaya Jasa Medis/ Paramedis.
5.2.2.03.18.	Belanja Jasa Pengamanan Kantor dan Rumah Dinas	Untuk mengalokasikan biaya Jasa pengamanan Kantor dan Rumah Dinas.
5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Cleaning Service	Untuk mengalokasikan biaya Jasa Cleaning service.
5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Teknis	Untuk mengalokasikan biaya Jasa Teknis kegiatan non PNS atas perjanjian kerja
5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	Untuk mengalokasikan biaya Jasa Pihak ketiga sehubungan dengan kegiatan non fisik yang pelaksanaannya oleh EO (even Organizer)
5.2.2.03.22.	Uang untuk di berikan kepada pihak ketiga	Untuk Pemberian Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga (Badan, lembaga, kelompok) untuk hadiah berupa uang
5.2.2.03.23.	Uang Untuk diberikan kepada masyarakat	Untuk Pemberian Uang untuk diberikan kepada Masyarakat (Perseorangan) untuk hadiah berupa uang
5.2.2.03.24	Uang untuk di berikan kepada siswa / pelajar	Untuk Pemberian Uang untuk diberikan kepada Siswa atau Pelajar yang berprestasi berupa uang
5.2.2.03.25.	Jasa Premi Pendamping Operator dan PKH	Untuk mengalokasikan biaya Jasa Premi Pendamping Operator dan PKH.
5.2.2.03.26.	Belanja Jasa Pemungutan Pajak Daerah dan PBB	Untuk mengalokasikan biaya Jasa Pemungutan Pajak Daerah dan PBB..
5.2.2.03.27.	Upah Tenaga Harian	Untuk Biaya upah Tenaga Harian di lingkungan pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan yang sifat pembayarannya harian dengan surat perjanjian kerja.
5.2.2.03.28.	Upah Tenaga Borongan	Untuk Biaya upah Tenaga Borongan di lingkungan pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan yang sifat pembayarannya borongan dengan surat perjanjian kerja
5.2.2.03.29.	Belanja Biaya Retribusi	Untuk Biaya retribusi daerah
5.2.2.03.30.	Belanja Akomodasi	Untuk biaya akomodasi tamu Pemerintah Daerah yang meliputi: biaya penginapan, biaya transport, biaya makan dan minum.
5.2.2.03.31.	Belanja Kontribusi	Untuk biaya kontribusi dari Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga
5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	
5.2.2.04.01.	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	Untuk mengalokasikan biaya premi asuransi kesehatan.
5.2.2.04.02.	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	Untuk mengalokasikan biaya premi asuransi atas aset yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Pacitan.

Paraf Hierarki	<input checked="" type="checkbox"/>	Paraf Koordinasi	
Sekda	<input checked="" type="checkbox"/>	Asisten _____	<input checked="" type="checkbox"/>
Asisten Per & Kesra	<input checked="" type="checkbox"/>	PD Pemrakarsa	<input checked="" type="checkbox"/>
Kabag Hukum	<input checked="" type="checkbox"/>	PD Terkait	<input checked="" type="checkbox"/>

KODE	URAIAN	KETERANGAN
1	2	3
5.2.2.04.03.	Belanja Premi Asuransi Kecelakaan	Untuk mengalokasikan biaya premi asuransi kecelakaan pengunjung kawasan wisata.
5.2.2.04.04.	Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan	Untuk mengalokasikan biaya premi ketenagakerjaan.
5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	
5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	Untuk mengalokasikan biaya perawatan kendaraan bermotor roda dua atau lebih yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan.
5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	Untuk mengalokasikan biaya penggantian suku cadang/ spare part kendaraan bermotor roda 2 atau lebih yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan.
5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	Untuk mengalokasikan belanja pelumas kendaraan bermotor roda dua atau lebih yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Pacitan.
5.2.2.05.04.	Belanja Jasa KIR	Untuk mengalokasikan biaya pengujian kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Pacitan.
5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	Untuk mengalokasikan biaya pengurusan STNK dan perpanjangan kendaraan bermotor roda dua dan empat yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Pacitan.
5.2.2.05.06.	Belanja perpanjangan Surat Ijin Mengemudi	Untuk mengalokasikan biaya pengurusan SIM.
5.2.2.05.07.	Belanja Perawatan Kendaraan Dinas Jabatan / Operasional	Untuk pengeluaran atas belanja perawatan kendaraan dinas jabatan / Operasional
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	Untuk mengalokasikan biaya barang - barang cetakan
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	Untuk mengalokasikan biaya Foto eopy.
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	
5.2.2.07.01.	Belanja sewa rumah jabatan/rumah dinas	Untuk mengalokasikan biaya sewa rumah pejabat eksekutif dan legislatif.
5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	Untuk mengalokasikan biaya sewa tempat berupa gedung/kantor/tempat lainnya.
5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	Untuk mengalokasikan biaya sewa ruang pertemuan.
5.2.2.07.04.	Belanja Sewa tempat parkir/uang tambat/hanggar sarana mobilitas	Untuk mengalokasikan biaya sewa hanggar/tempat parkir kapal.
5.2.2.07.05.	Belanja Sewa Tanah	Untuk mengalokasikan biaya sewa tanah.
5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	
5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	Untuk mengalokasikan biaya sewa kendaraan bermotor roda dua, roda

Paraf Hierarki		Paraf Koordinasi	
Sekda	<input checked="" type="checkbox"/>	Asisten	<input checked="" type="checkbox"/>
Asisten Per. & K. 2013	<input checked="" type="checkbox"/>	PD Pemrakarsa	<input checked="" type="checkbox"/>
Kabag Hukum	<input checked="" type="checkbox"/>	PD Terkait	<input checked="" type="checkbox"/>

KODE	URAIAN	KETERANGAN
1	2	3
		empat dan sarana kendaraan darat lainnya
5.2.2.08.02.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Air	Untuk mengalokasikan biaya sewa perahu motor dan kendaraan air lainnya.
5.2.2.08.03.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara	Untuk mengalokasikan biaya sewa pesawat, helikopter, balon udara dan sarana kendaraan udara lainnya.
5.2.2.09.	Belanja Sewa Alat Berat	
5.2.2.09.01.	Belanja sewa Eskavator	Untuk mengalokasikan biaya sewa eskavator.
5.2.2.09.02.	Belanja sewa Buldoser	Untuk mengalokasikan biaya sewa buldoser.
5.2.2.09.03	Belanja Sewa Stom Wales	Untuk mengalokasikan biaya sewa Sewa Stom Wales.
5.2.2.09.04.	Belanja Sewa Mesin Pengolah Semen	Untuk mengalokasikan biaya sewa Mesin Pengolah Semen.
5.2.2.10.	Belanja Sewa dan Perlengkapan Peralatan Kantor	
5.2.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi	Untuk mengalokasikan biaya sewa meja kursi guna menunjang pelaksanaan kegiatan/ pekerjaan.
5.2.2.10.02.	Belanja sewa komputer dan printer	Untuk mengalokasikan biaya sewa komputer dan printer guna menunjang pelaksanaan kegiatan/ pekerjaan.
5.2.2.10.03.	Belanja sewa proyektor	Untuk mengalokasikan biaya sewa proyektor guna menunjang pelaksanaan kegiatan/ pekerjaan.
5.2.2.10.04.	Belanja sewa generator	Untuk mengalokasikan biaya sewa generator guna menunjang pelaksanaan kegiatan/ pekerjaan.
5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	Untuk mengalokasikan biaya sewa tenda guna menunjang pelaksanaan kegiatan/ pekerjaan.
5.2.2.10.06.	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	Untuk mengalokasikan biaya sewa pakaian adat/tradisional guna menunjang pelaksanaan kegiatan/ pekerjaan.
5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System	Untuk mengalokasikan biaya sewa sound system.
5.2.2.10.08.	Belanja sewa panggung	Untuk mengalokasikan biaya sewa panggung.
5.2.2.10.09.	Belanja Sewa Dekorasi dan Perlengkapannya	Untuk mengalokasikan biaya sewa dekorasi.
5.2.2.10.10.	Belanja Sewa Genset	Untuk mengalokasikan biaya sewa Genset.
5.2.2.10.11.	Belanja Sewa Alat Ukur	Untuk mengalokasikan biaya sewa Alat Ukur.
5.2.2.10.12.	Belanja Sewa Alat Pemotong	Untuk mengalokasikan biaya sewa Alat Pemotong.
5.2.2.10.13.	Sewa Mesin Pendingin Ruang (AC)	Untuk mengalokasikan biaya sewa mesin pendingin ruangan (AC).
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	
5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	Untuk mengalokasikan biaya makan minum harian pegawai PNS/Pegawai

Sekda	✓
Asisten Sekda	✓
Kabag Hukum	✓

Paraf Koordinasi	
Asisten	h
PD Pemrakarsa	f
PD Terkait	

KODE	URAIAN	KETERANGAN
1	2	3
		tidak tetap dan Tenaga dari luar OPDnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan, yang penggunaannya pada hari dan jam kerja.
5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	Untuk mengalokasikan biaya makan minum kegiatan rapat, workshop, sosialisasi, bimtek dan kegiatan lainnya yang sifatnya mengumpulkan peserta di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan.
5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	Untuk mengalokasikan biaya makan minum tamu dari luar Satuan Kerja Pemerintah Kabupaten Pacitan.
5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman pasien	untuk pengeluaran atas belanja makanan dan minuman pasien
5.2.2.11.05.	Belanja makanan dan minuman panti sosial	untuk pengeluaran atas belanja makanan dan minuman panti sosial
5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta Diklat	untuk pengeluaran atas belanja makanan dan minuman peserta Diklat
5.2.2.12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	
5.2.2.12.01.	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	Untuk mengalokasikan biaya pakaian untuk Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
5.2.2.12.02.	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	Untuk mengalokasikan biaya pembelian pakaian sipil harian.
5.2.2.12.03.	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	Untuk mengalokasikan biaya pakaian sipil lengkap.
5.2.2.12.04.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	Untuk mengalokasikan biaya pakaian dinas harian OPD/Unit Kerja. Terdiri dari PDH Drill dan PDH hitam putih
5.2.2.12.05.	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	Untuk mengalokasikan biaya pakaian upacara.
5.2.2.12.06.	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	Untuk mengalokasikan biaya pakaian sipil resmi.
5.2.2.12.07.	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Untuk mengalokasikan biaya pakaian dinas lapangan.
5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	
5.2.2.13.01.	Belanja pakaian kerja lapangan	Untuk mengalokasikan biaya pakaian pakaian kerja lapangan.
5.2.2.13.02.	Belanja Kelengkapan Kerja	Untuk mengalokasikan biaya kelengkapan kerja.
5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	
5.2.2.14.01.	Belanja pakaian KORPRI	Untuk mengalokasikan biaya pembelian pakaian Korpri.
5.2.2.14.02.	Belanja pakaian adat daerah	Untuk mengalokasikan biaya pembelian pakaian Adat Daerah termasuk PKJ
5.2.2.14.03.	Belanja pakaian hatik tradisional	Untuk mengalokasikan biaya pembelian pakaian Batik Tradisional.
5.2.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	Untuk mengalokasikan biaya pembelian pakaian Olahraga.
5.2.2.14.05.	Belanja pakaian Paskibraka	Untuk mengalokasikan biaya pembelian pakaian Paskibraka.
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	

Paraf Hierarki	
Sekda	8
Asisten Sekda	4
Kepag Hukum	2

Paraf Koordinasi	
Asisten	M
PD Pemrakarsa	f
PD Terkait	

KODE	URAIAN	KETERANGAN
1	2	3
5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	Untuk mengalokasikan biaya perjalanan dinas di dalam Kabupaten Pacitan.
5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	Untuk mengalokasikan biaya perjalanan dinas ke luar Kabupaten Pacitan.
5.2.2.15.03.	Belanja perjalanan dinas luar negeri	Untuk mengalokasikan biaya perjalanan dinas ke luar negeri.
5.2.2.16.	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	
5.2.2.16.01.	Belanja beasiswa tugas belajar D3	Untuk mengalokasikan biaya Pendidikan Pegawai jenjang Diploma 3 yang disetor ke lembaga pendidikan.
5.2.2.16.02.	Belanja beasiswa tugas belajar S1	Untuk mengalokasikan biaya Pendidikan Pegawai ke jenjang Sarjana yang disetor ke lembaga pendidikan.
5.2.2.16.03.	Belanja beasiswa tugas belajar S2	Untuk mengalokasikan biaya Pendidikan Pegawai ke jenjang Magister yang disetor ke lembaga pendidikan.
5.2.2.16.04.	Belanja beasiswa tugas belajar S3	Untuk mengalokasikan biaya Pendidikan Pegawai ke jenjang Doktoral yang disetor ke lembaga pendidikan.
5.2.2.17.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	
5.2.2.17.01.	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan	Untuk mengalokasikan kontribusi pelatihan peningkatan kemampuan manajerial dan kepemimpinan bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan.
5.2.2.17.02.	Belanja sosialisasi	Untuk mengalokasikan kontribusi keikutsertaan Sosialisasi.
5.2.2.17.03.	Belanja bimbingan teknis	Untuk mengalokasikan kontribusi pelatihan peningkatan kemampuan teknis bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan.
5.2.2.18.	Belanja Perjalanan Pindah Tugas	
5.2.2.18.01.	Belanja perjalanan pindah tugas dalam daerah	Untuk mengalokasikan biaya yang diperuntukkan bagi personil yang dalam jenjang promosi atau pemerataan pegawai pindah tugas dalam daerah.
5.2.2.18.02.	Belanja perjalanan pindah tugas luar daerah	Untuk mengalokasikan biaya yang diperuntukkan bagi personil yang dalam jenjang promosi atau pemerataan pegawai pindah tugas luar daerah.
5.2.2.19.	Belanja Pemulangan Pegawai	
5.2.2.19.01	Belanja pemulangan pegawai yang pensiun dalam daerah	Untuk mengalokasikan biaya yang diperuntukkan bagi personil dalam hal menjalankan kewajibannya telah mencapai purna tugas dan dipulangkan dalam daerah.
5.2.2.19.02.	Belanja pemulangan	Untuk mengalokaikan biaya yang

Paraf Hierarchy	
Sekda	✓
Asisten Pem. & Kes	✓
Kabag Hukum	✓

Paraf Koordinasi	
Asisten _____	✓
PD Pemrakarsa	✓
PD Terkait	✓

KODE	URAIAN	KETERANGAN
1	2	3
	pegawai yang pensiun luar daerah	diperuntukkan bagi personil dalam hal menjalankan kewajibannya telah meneapai purna tugas dan dipulangkan ke luar daerah.
5.2.2.19.03.	Belanja pemulangan pegawai yang tewas dalam melaksanakan tugas	Untuk mengalokasikan biaya yang diperuntukkan bagi personil yang bertugas dalam hal menjalankan kewajibannya gugur atau meninggal dunia.
5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	
5.2.2.20.01.	Belanja Pemeliharaan Jalan	Untuk mengalokasikan biaya pekerjaan perbaikan jalan yang bertujuan untuk mempertahankan umur ekonomis jalan.
5.2.2.20.02.	Belanja Pemeliharaan Jembatan	Untuk mengalokasikan biaya pekerjaan perbaikan jembatan yang bertujuan untuk mempertahankan umur ekonomis jembatan
5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Irigasi	Untuk mengalokasikan biaya pekerjaan perbaikan irigasi yang bertujuan untuk mempertahankan umur ekonomis irigasi.
5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Untuk mengalokasikan biaya pekerjaan perbaikan gedung dan bangunan yang bertujuan untuk mempertahankan umur ekonomis gedung dan bangunan
5.2.2.20.05.	Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi	Untuk mengalokasikan biaya pekerjaan perbaikan jaringan dan instalasi yang bertujuan untuk mempertahankan umur ekonomis jaringan dan instalasi.
5.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Untuk mengalokasikan biaya pekerjaan perbaikan peralatan dan mesin yang bertujuan untuk mempertahankan umur ekonomis peralatan dan mesin.
5.2.2.20.07.	Belanja Pemeliharaan Drainase	Untuk mengalokasikan biaya pekerjaan perbaikan drainase yang bertujuan untuk mempertahankan umur ekonomis drainase.
5.2.2.20.08.	Belanja Pemeliharaan Taman	Untuk mengalokasikan biaya pekerjaan perbaikan taman yang bertujuan untuk mempertahankan umur ekonomis taman.
5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Situs Purbakala	Untuk mengalokasikan biaya pekerjaan perbaikan situs purbakala yang bertujuan untuk mempertahankan umur ekonomis situs purbakala.
5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	
5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	Untuk mengalokasikan biaya Jasa pihak ketiga dalam kegiatan penelitian, penyusunan kajian, naskah akademik.
5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	Untuk mengalokasikan biaya Jasa pihak ketiga dalam kegiatan perencanaan non-konstruksi.
5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	Untuk mengalokasikan biaya Jasa pihak ketiga dalam kegiatan pengawasan non-konstruksi.
5.2.2.21.04.	Belanja Jasa Konsultansi Bimbingan Teknis	Untuk mengalokasikan biaya Jasa pihak ketiga dalam kegiatan Bimbingan Teknis.

Paraf Hierarki	
Sekda	✓
Asisten Pen & Kesa	✓
Kabag Hukum	✓

Paraf Koordinasi	
Asisten	h
PD Pemrakarsa	✓
PD Terkait	




KODE	URAIAN	KETERANGAN
1	2	3
5.2.2.21.05.	Belanja Jasa Konsultansi	Untuk mengalokasikan biaya Jasa pihak ketiga dalam kegiatan Konsultansi Profesional termasuk: KJPP, Akuntan Publik
5.2.2.22.	Belanja Barang Dana BOS	
5.2.2.22.01.	Belanja Barang Dana BOS	Untuk mengalokasikan dana BOS bagi SD dan SMP Negeri
5.2.2.23.	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	
5.2.2.23.01.	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat.	Untuk mengalokasikan biaya barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat.
5.2.2.23.02.	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Pihak Ketiga.	Untuk mengalokasikan biaya barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga
5.2.2.24.	Belanja Barang yang akan dijual kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	
5.2.2.24.01.	Belanja Barang yang akan dijual kepada Masyarakat.	Untuk mengalokasikan biaya barang yang akan dijual kepada Masyarakat.
5.2.2.24.02.	Belanja Barang yang akan dijual kepada Pihak Ketiga	Untuk mengalokasikan biaya barang yang akan dijual kepada Pihak Ketiga
5.2.2.25.	Belanja Barang Jasa BLUD	
5.2.2.25.01.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	Untuk mengalokasikan biaya Barang dan Jasa BLUD.
5.2.2.26.	Belanja Rumah Tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
5.2.2.26.01.	Belanja Rumah Tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.	Untuk mengalokasikan biaya Rumah Tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
5.2.2.26.02.	Belanja Kesehatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Untuk mengalokasikan biaya Kesehatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
5.2.2.26.03.	Belanja Kelengkapan dan Kebutuhan Harian Rumah Tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Untuk mengalokasikan biaya Kelengkapan dan Kebutuhan Harian Rumah Tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
5.2.2.26.04.	Belanja Sarana dan Prasarana Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Untuk mengalokasikan biaya Sarana dan Prasarana Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
5.2.2.27.	Belanja Kompensasi	
5.2.2.27.01.	Belanja Kompensasi Bangunan Rumah dan Fasilitas Umum	Untuk mengalokasikan biaya Kompensasi Bangunan Rumah dan Fasilitas Umum.
5.2.2.28.	Belanja Jasa Profesi	
5.2.2.28.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	Untuk mengalokasikan biaya Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.
5.2.3.	BELANJA MODAL	
5.2.3.01.	Belanja Modal Pengadaan Tanah	

Paraf Hierarki	Paraf Koordinasi
Sekda <input checked="" type="checkbox"/>	Asisten _____ <input checked="" type="checkbox"/>
Kabag/Asisten Kabag <input checked="" type="checkbox"/>	PD Pemrakarsa _____ <input checked="" type="checkbox"/>
Kabag Hukum <input checked="" type="checkbox"/>	PD Terkait _____ <input type="checkbox"/>

KODE	URAIAN	KETERANGAN
1	2	3
5.2.3.01.01.	Belanja modal Pengadaan tanah kantor	Untuk mengalokasikan pengadaan tanah kantor.
5.2.3.01.02.	Belanja modal Pengadaan tanah sarana kesehatan rumah sakit	Untuk mengalokasikan pengadaan tanah sarana kesehatan rumah sakit.
5.2.3.01.03.	Belanja modal Pengadaan tanah sarana kesehatan puskesmas	Untuk mengalokasikan pengadaan tanah sarana kesehatan puskesmas.
5.2.3.01.04.	Belanja modal Pengadaan tanah sarana kesehatan poliklinik	Untuk mengalokasikan pengadaan tanah sarana kesehatan poliklinik.
5.2.3.01.05.	Belanja modal Pengadaan tanah sarana pendidikan taman kanak-kanak	Untuk mengalokasikan pengadaan tanah sarana pendidikan Taman Kanak-kanak.
5.2.3.01.06.	Belanja modal Pengadaan tanah sarana pendidikan sekolah dasar	Untuk mengalokasikan pengadaan tanah sarana pendidikan Sekolah Dasar Negeri (SDN).
5.2.3.01.07.	Belanja modal Pengadaan tanah sarana pendidikan menengah umum dan kejuruan	Untuk mengalokasikan pengadaan tanah sarana pendidikan Menengah Pertama Negeri (SMPN).
5.2.3.01.08.	Belanja modal Pengadaan tanah sarana pendidikan menengah lanjutan dan kejuruan	Untuk mengalokasikan pengadaan tanah sarana pendidikan Menengah Umum Negeri dan Kejuruan Negeri.
5.2.3.01.09.	Belanja modal Pengadaan tanah sarana pendidikan luar biasa/khusus	Untuk mengalokasikan pengadaan tanah sarana pendidikan luar biasa/khusus.
5.2.3.01.10.	Belanja modal Pengadaan tanah sarana pendidikan pelatihan dan kursus	Untuk mengalokasikan pengadaan tanah sarana pendidikan pelatihan dan kursus.
5.2.3.01.11.	Belanja modal Pengadaan tanah sarana sosial panti asuhan	Untuk mengalokasikan pengadaan tanah sarana sosial panti asuhan.
5.2.3.01.12.	Belanja modal Pengadaan tanah sarana sosial panti jompo	Untuk mengalokasikan pengadaan tanah sarana sosial panti jompo.
5.2.3.01.13.	Belanja modal Pengadaan tanah sarana umum terminal	Untuk mengalokasikan pengadaan tanah sarana umum terminal.
5.2.3.01.14.	Belanja modal Pengadaan tanah sarana umum dermaga	Untuk mengalokasikan pengadaan tanah sarana umum dermaga.
5.2.3.01.15.	Belanja modal Pengadaan tanah sarana umum lapangan terbang perintis	Untuk mengalokasikan pengadaan tanah sarana umum lapangan terbang perintis.
5.2.3.01.16.	Belanja modal Pengadaan tanah sarana umum rumah potong hewan	Untuk mengalokasikan pengadaan tanah sarana umum rumah potong hewan.
5.2.3.01.17.	Belanja modal Pengadaan tanah sarana umum tempat pelelangan ikan	Untuk mengalokasikan pengadaan tanah sarana umum tempat pelelangan ikan.
5.2.3.01.18.	Belanja modal Pengadaan tanah sarana umum pasar	Untuk mengalokasikan pengadaan tanah sarana umum pasar.
5.2.3.01.19.	Belanja modal Pengadaan tanah sarana umum tempat pembuangan akhir	Untuk mengalokasikan pengadaan tanah sarana umum tempat pembuangan akhir sampah, baik menambah luasan tanah

Paraf Hierarki	Paraf Koordinasi
Sekda <input checked="" type="checkbox"/>	Asisten _____ <input checked="" type="checkbox"/>
_____ <input type="checkbox"/>	PD Pemrakarsa _____ <input type="checkbox"/>
_____ <input type="checkbox"/>	PD Terkait _____ <input type="checkbox"/>

KODE	URAIAN	KETERANGAN
1	2	3
	sampah	maupun tidak menambah luasan tanah.
5.2.3.01.20.	Belanja modal Pengadaan tanah sarana umum taman	Untuk mengalokasikan pengadaan tanah sarana umum taman.
5.2.3.01.21.	Belanja modal Pengadaan tanah sarana umum pusat hiburan rakyat	Untuk mengalokasikan pengadaan tanah sarana umum pusat hiburan rakyat.
5.2.3.01.22.	Belanja modal Pengadaan tanah sarana umum ibadah	Untuk mengalokasikan pengadaan tanah sarana umum ibadah
5.2.3.01.23.	Belanja modal Pengadaan tanah sarana stadion olahraga	Untuk mengalokasikan pengadaan tanah sarana stadion olahraga.
5.2.3.01.24.	Belanja modal Pengadaan tanah perumahan	Untuk mengalokasikan pengadaan tanah perumahan.
5.2.3.01.25.	Belanja modal Pengadaan tanah pertanian	Untuk mengalokasikan pengadaan tanah pertanian.
5.2.3.01.26.	Belanja modal Pengadaan tanah perkebunan	Untuk mengalokasikan pengadaan tanah perkebunan.
5.2.3.01.27.	Belanja modal Pengadaan tanah perikanan	Untuk mengalokasikan pengadaan tanah perikanan.
5.2.3.01.28.	Belanja modal Pengadaan tanah peternakan	Untuk mengalokasikan pengadaan tanah peternakan.
5.2.3.01.29.	Belanja modal Pengadaan tanah perkampungan	Untuk mengalokasikan pengadaan tanah perkampungan.
5.2.3.01.30.	Belanja modal Pengadaan tanah pergudangan/tempat penimbunan material bahan baku	Untuk mengalokasikan pengadaan tanah pergudangan/tempat penimbunan material bahan baku.
5.2.3.01.31.	Belanja Modal Pengadaan Tanah untuk Penanggulangan Banjir	Untuk mengalokasikan pengadaan tanah Pengadaan Tanah untuk Penanggulangan Banjir
5.2.3.01.32.	Belanja Modal Pengadaan Tanah untuk Sarana Irigasi	Untuk mengalokasikan pengadaan tanah untuk sarana Irigasi.
5.2.3.01.33.	Belanja Modal Pengadaan Tanah Untuk Sarana Umum Jalan	Untuk mengalokasikan pengadaan tanah sarana umum Jalan.
5.2.3.01.34.	Belanja Modal Pengadaan Tanah untuk Situs Purbakala	Untuk mengalokasikan pengadaan tanah untuk Situs Purbakala.
5.2.3.01.35.	Belanja modal pengadaan tanah untuk tugu batas kota	Untuk mengalokasikan pengadaan tanah untuk tugu batas kota.
5.2.3.01.36.	Pengadaan Tanah Untuk Sarana Air Bersih	Untuk mengalokasikan pengadaan tanah untuk sarana Air Bersih.
5.2.3.01.37.	Pengadaan Tanah untuk sarana umum kawasan wisata	Untuk mengalokasikan pengadaan tanah untuk sarana umum kawasan wisata.
5.2.3.01.38.	Belanja Modal Pengadaan Tanah Untuk Kompensasi Lahan	Untuk mengalokasikan pengadaan tanah untuk kompensasi lahan.
5.2.3.02.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat	
5.2.3.02.01.	Belanja modal Pengadaan traktor.	Untuk mengalokasikan pengadaan traktor.

Paraf Hierarki	<input checked="" type="checkbox"/>	Paraf Koordinasi	
Sekda	<input checked="" type="checkbox"/>	Asisten	
Asisten Sekda	<input checked="" type="checkbox"/>	PD Pemrakarsa	
Kepag	<input checked="" type="checkbox"/>	PD Terkait	

KODE	URAIAN	KETERANGAN
1	2	3
5.2.3.02.02.	Belanja modal Pengadaan buldozer	Untuk mengalokasikan pengadaan buldozer.
5.2.3.02.03.	Belanja modal Pengadaan stoom wals	Untuk mengalokasikan pengadaan stoom wals.
5.2.3.02.04.	Belanja modal Pengadaan eskavator	Untuk mengalokasikan pengadaan eskavator.
5.2.3.02.05.	Belanja modal Pengadaan dump truk	Untuk mengalokasikan pengadaan dump truk .
5.2.3.02.06.	Belanja modal Pengadaan crane	Untuk mengalokasikan pengadaan crane.
5.2.3.02.07.	Belanja modal Pengadaan kendaraan penyapu jalan	Untuk mengalokasikan pengadaan kendaraan penyapu jalan.
5.2.3.02.08.	Belanja modal Pengadaan mesin pengolah semen	Untuk mengalokasikan pengadaan mesin pengolah semen.
5.2.3.02.09.	Belanja modal Pengadaan mesin pengolah air bersih	Untuk mengalokasikan pengadaan mesin pengolah air bersih (reservoir osmosis).
5.2.3.02.10.	Belanja modal alat-alat bantu	Untuk mengalokasikan pengadaan alat alat bantu
5.2.3.02.11.	Belanja Modal Pengadaan Kontainer	Untuk mengalokasikan pengadaan Kontainer.
5.2.3.02.12.	Belanja Modal Pengadaan Wheel Loader	Untuk mengalokasikan pengadaan Wheel Loader.
5.2.3.02.13.	Belanja Modal Escalator	Untuk mengalokasikan pengadaan Ecalator.
5.2.3.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	
5.2.3.03.01.	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sedan	Untuk mengalokasikan pengadaan alat angkutan darat bermotor sedan (jenis sedan).
5.2.3.03.02.	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor jeep	Untuk mengalokasikan pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor jeep (jenis jeep).
5.2.3.03.03.	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor station wagon	Untuk mengalokasikan pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor station wagon .
5.2.3.03.04.	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor bus	Untuk mengalokasikan pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor bus.
5.2.3.03.05.	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor micro bus	Untuk mengalokasikan pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor mikro bus.
5.2.3.03.06.	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor truck	Untuk mengalokasikan pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor truk.
5.2.3.03.07.	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor tangki (air, minyak, tinja)	Untuk mengalokasikan pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor tangki (air, minyak, tinja).
5.2.3.03.08.	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor boks	Untuk mengalokasikan pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor boks.
5.2.3.03.09.	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor pick up	Untuk mengalokasikan pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor pick up.
5.2.3.03.10.	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat	Untuk mengalokasikan pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor ambulance.

Paraf Hierarki		Paraf Koordinasi	
Sekda	✓	Asisten _____	h
Asst. Pemb. Kesra	h	PD Pemrakarsa	h
Kabag. Hukum	h	PD Terkait	h

KODE	URAIAN	KETERANGAN
1	2	3
	bermotor ambulans	
5.2.3.03.11.	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor pemadam kebakaran	Untuk mengalokasikan pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor pemadam kebakaran.
5.2.3.03.12.	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor	Untuk mengalokasikan pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor.
5.2.3.03.13.	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor lift/elevator	Untuk mengalokasikan pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor lift/elevator.
5.2.3.03.14.	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor tangga berjalan	Untuk mengalokasikan pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor tangga berjalan.
5.2.3.03.15.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Roda Tiga	Untuk mengalokasikan pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor Roda Tiga.
5.2.3.04.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	
5.2.3.04.01.	Belanja modal Pengadaan gerobak	Untuk mengalokasikan pengadaan gerobak.
5.2.3.04.02.	Belanja modal Pengadaan pedati/delman/dokar/bendi/cidomo/andong	Untuk mengalokasikan pengadaan pedati/delman/dokar/bendi/cidomo/andong.
5.2.3.04.03.	Belanja modal Pengadaan becak	Untuk mengalokasikan pengadaan becak.
5.2.3.04.04.	Belanja modal Pengadaan sepeda	Untuk mengalokasikan pengadaan sepeda.
5.2.3.04.05.	Belanja modal Pengadaan karavan	Untuk mengalokasikan pengadaan karavan.
5.2.3.04.06.	Belanja Modal Pengadaan Trolley	Untuk mengalokasikan pengadaan Trolley.
5.2.3.05.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan di atas Air Bermotor	
5.2.3.05.01.	Belanja modal Pengadaan kapal motor	Untuk mengalokasikan pengadaan kapal motor.
5.2.3.05.02.	Belanja modal Pengadaan kapal feri	Untuk mengalokasikan pengadaan kapal feri.
5.2.3.05.03.	Belanja modal Pengadaan speed boat	Untuk mengalokasikan pengadaan speed boat.
5.2.3.05.04.	Belanja modal Pengadaan motor boat/motor tempel	Untuk mengalokasikan pengadaan motor boat/motor tempel.
5.2.3.05.05.	Belanja modal Pengadaan hydro foil	Untuk mengalokasikan pengadaan hydro foil.
5.2.3.05.06.	Belanja modal Pengadaan jet foil	Untuk mengalokasikan pengadaan jet foil.
5.2.3.05.07.	Belanja modal Pengadaan kapal tug boat	Untuk mengalokasikan pengadaan kapal tug boat.
5.2.3.05.08.	Belanja modal Pengadaan kapal tanker	Untuk mengalokasikan pengadaan kapal tanker.
5.2.3.05.09.	Belanja modal Pengadaan kapal kargo	Untuk mengalokasikan pengadaan kapal kargo.
5.2.3.05.10.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Tempel	Untuk mengalokasikan pengadaan Mesin Tempel.

Paraf Hierarki		Paraf Koordinasi	
Sekda		Asisten	
Asisten Sekda		PD Pemrakarsa	
Kabag Hukum		PD Terkait	

KODE	URAIAN	KETERANGAN
1	2	3
5.2.3.06.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan di atas Air Tidak Bermotor	
5.2.3.06.01.	Belanja modal Pengadaan perahu layar	Untuk mengalokasikan pengadaan perahu layar.
5.2.3.06.02.	Belanja modal Pengadaan perahu sampan	Untuk mengalokasikan pengadaan perahu sampan.
5.2.3.06.03.	Belanja modal Pengadaan perahu tongkang	Untuk mengalokasikan pengadaan perahu tongkang.
5.2.3.06.04.	Belanja modal Pengadaan perahu karet	Untuk mengalokasikan pengadaan perahu karet.
5.2.3.06.05.	Belanja modal Pengadaan perahu rakit	Untuk mengalokasikan pengadaan perahu rakit.
5.2.3.06.06.	Belanja modal Pengadaan perahu sekoci	Untuk mengalokasikan pengadaan perahu sekoci.
5.2.3.07.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Udara	
5.2.3.07.01.	Belanja modal Pengadaan pesawat kargo	Untuk mengalokasikan pengadaan pesawat kargo.
5.2.3.07.02.	Belanja modal Pengadaan pesawat penumpang	Untuk mengalokasikan pengadaan pesawat penumpang.
5.2.3.07.03.	Belanja modal Pengadaan pesawat helikopter	Untuk mengalokasikan pengadaan pesawat helikopter.
5.2.3.07.04.	Belanja modal pesawat pemadam kebakaran	Untuk mengalokasikan pengadaan pesawat pemadam kebakaran.
5.2.3.07.05.	Belanja modal Pengadaan pesawat capung	Untuk mengalokasikan pengadaan pesawat capung.
5.2.3.07.06.	Belanja modal Pengadaan pesawat terbang ampibi	Untuk mengalokasikan pengadaan pesawat terbang ampibi.
5.2.3.07.07.	Belanja modal Pengadaan pesawat terbang layang	Untuk mengalokasikan pengadaan pesawat terbang layang.
5.2.3.08.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	
5.2.3.08.01.	Belanja modal Pengadaan mesin las	Untuk mengalokasikan pengadaan mesin las.
5.2.3.08.02.	Belanja modal Pengadaan mesin bubut	Untuk mengalokasikan pengadaan mesin bubut.
5.2.3.08.03.	Belanja modal Pengadaan mesin dongkrak	Untuk mengalokasikan pengadaan mesin dongkrak.
5.2.3.08.04.	Belanja modal Pengadaan mesin kompresor	Untuk mengalokasikan pengadaan mesin kompresor.
5.2.3.08.05.	Belanja Modal Pengadaan Genset	Untuk mengalokasikan pengadaan Genset.
5.2.3.08.06.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Bor	Untuk mengalokasikan pengadaan Mesin Bor.
5.2.3.08.07.	Belanja Modal Pompa Air	Untuk mengalokasikan pengadaan Pompa Air.
5.2.3.08.08.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Perbengkelan	Untuk mengalokasikan pengadaan Peralatan Perbengkelan.
5.2.3.09.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	
5.2.3.09.01.	Belanja modal Pengadaan penggiling hasil pertanian	Untuk mengalokasikan pengadaan penggiling hasil pertanian.

Paraf Hierarki		Paraf Koordinasi	
Sekda	✓	Asisten	h
Asisten Per & Kery	↓	PD Pemrakarsa	↓
Kabag Hukum	✗	PD Terkait	↓

KODE	URAIAN	KETERANGAN
1	2	3
5.2.3.09.02.	Belanja modal Pengadaan alat pengering gabah	Untuk mengalokasikan pengadaan alat pengering gabah.
5.2.3.09.03.	Belanja modal Pengadaan mesin bajak	Untuk mengalokasikan pengadaan mesin bajak .
5.2.3.09.04.	Belanja modal Pengadaan alat penetas	Untuk mengalokasikan pengadaan alat penetas..
5.2.3.09.05.	Belanja Modal Alat Pemantau Kualitas Air	Untuk mengalokasikan pengadaan alat Pemantau Kwalita Air.
5.2.3.09.06.	Belanja Modal Alat Pengolah /Pencacah Sampah	Untuk mengalokasikan pengadaan alat Pengolah /Pencacah Sampah.
5.2.3.09.07.	Belanja Modal Alat Pemotong Rumput	Untuk mengalokasikan pengadaan alat Pemotong Rumput.
5.2.3.09.08.	Belanja Modal Pengadaan Hand Sprayer	Untuk mengalokasikan pengadaan Hand Sprayer..
5.2.3.09.09.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pertanian	Untuk mengalokasikan pengadaan Peralatan Pertanian.
5.2.3.09.10.	Belanja Modal Pengadaan Alat Pengolah Hasil Perkebunan	Untuk mengalokasikan pengadaan Alat Pengolah Hasil Perkebunan.
5.2.3.09.11.	Belanja modal pengadaan mesin diesel	Untuk mengalokasikan pengadaan Mesin diesel.
5.2.3.09.12.	Belanja Modal Pengadaan Sarana Pembuatan Pakan	Untuk mengalokasikan pengadaan Sarana Pembuatan Pakan
5.2.3.09.13.	Belanja Modal Pengadaan Sarana Pembenihan	Untuk mengalokasikan pengadaan Sarana Pembenihan
5.2.3.09.14.	Belanja Modal Pengadaan Karamba	Untuk mengalokasikan pengadaan Karamba.
5.2.3.09.15.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Gergaji	Untuk mengalokasikan pengadaan Mein Geigaji.
5.2.3.09.16.	Belanja Modal Sarana dan Prasarana Pertanian	Untuk mengalokasikan pengadaan Sarana dan Prasarana Pertanian.
5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	
5.2.3.10.01.	Belanja modal Pengadaan mesin tik	Untuk mengalokasikan pengadaan mesin ketik.
5.2.3.10.02.	Belanja modal Pengadaan mesin hitung	Untuk mengalokasikan pengadaan mesin hitung.
5.2.3.10.03.	Belanja modal Pengadaan mesin stensil	Untuk mengalokasikan pengadaan mesin stensil.
5.2.3.10.04.	Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy	Untuk mengalokasikan pengadaan mesin fotocopy
5.2.3.10.05.	Belanja modal Pengadaan mesin cetak	Untuk mengalokasikan pengadaan mesin cetak.
5.2.3.10.06.	Belanja modal Pengadaan mesin jilid	Untuk mengalokasikan pengadaan mesin jilid.
5.2.3.10.07.	Belanja modal Pengadaan mesin potong kertas	Untuk mengalokasikan pengadaan mesin potong kertas.
5.2.3.10.08.	Belanja modal Pengadaan mesin penghancur kertas	Untuk mengalokasikan pengadaan mesin penghancur kertas.
5.2.3.10.09.	Belanja modal Pengadaan papan tulis elektronik	Untuk mengalokasikan pengadaan papan tulis elektronik
5.2.3.10.10.	Belanja modal Pengadaan papan visual elektronik	Untuk mengalokasikan pengadaan papan visual elektronik.
5.2.3.10.11.	Belanja modal Pengadaan tabung pemadam	Untuk mengalokasikan pengadaan tabung pemadam kebakaran.

Paraf Hierarki		Paraf Koordinasi	
Sekda	<input checked="" type="checkbox"/>	Asisten	<input checked="" type="checkbox"/>
Asisten Pen & Kesa	<input checked="" type="checkbox"/>	PD Pemrakarsa	<input checked="" type="checkbox"/>
Kabag Hukum	<input checked="" type="checkbox"/>	PD Terkait	<input checked="" type="checkbox"/>

KODE	URAIAN	KETERANGAN
1	2	3
	kebakaran	
5.2.3.10.12.	Belanja modal Pengadaan Papan Baliho	Untuk mengalokasikan pengadaan Papan Baliho.
5.2.3.10.13.	Belanja modal Pengadaan Papan Non Elektrik	Untuk mengalokasikan pengadaan Papan Non Elektrik.
5.2.3.10.14.	Belanja Modal Papan Data	Untuk mengalokasikan pengadaan Papan Data.
5.2.3.10.15.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Laminating	Untuk mengalokasikan pengadaan Mesin Laminating.
5.2.3.10.16.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Diesel	Untuk mengalokasikan pengadaan Mesin Diesel.
5.2.3.10.17.	Belanja Modal Pengadaan Terpal	Untuk mengalokasikan pengadaan Terpal.
5.2.3.10.18.	Belanja Modal Pengadaan Card Reader	Untuk mengalokasikan Pengadaan Card Reader.
5.2.3.10.19.	Belanja Modal Pengadaan Alat Deteksi Uang	Untuk mengalokasikan Pengadaan Alat Pendeteksi Uang
5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	
5.2.3.11.01.	Belanja modal Pengadaan meja gambar	Untuk mengalokasikan Pengadaan meja gambar.
5.2.3.11.02.	Belanja modal Pengadaan almari	Untuk mengalokasikan Pengadaan almari.
5.2.3.11.03.	Belanja modal Pengadaan brankas	Untuk mengalokasikan Pengadaan brankas.
5.2.3.11.04.	Belanja modal Pengadaan filling kabinet	Untuk mengalokasikan Pengadaan filling kabinet.
5.2.3.11.05.	Belanja modal Pengadaan white board	Untuk mengalokasikan Pengadaan white board.
5.2.3.11.06.	Belanja modal Pengadaan penunjuk waktu	Untuk mengalokasikan Pengadaan penunjuk waktu.
5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan AC	Untuk mengalokasikan Pengadaan Air Condition (AC).
5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	Untuk mengalokasikan Pengadaan kipas angin.
5.2.3.11.09.	Belanja Modal Pengadaan Papan Pengumuman	Untuk mengalokasikan Pengadaan Papan Pengumuman.
5.2.3.11.10.	Belanja Modal Pengadaan Layar	Untuk mengalokasikan Pengadaan Layar.
5.2.3.11.11.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Absensi	Untuk mengalokasikan Pengadaan Mesin Absensi.
5.2.3.11.12.	Belanja modal pengadaan Tenda/Terop	Untuk mengalokasikan Pengadaan Tenda/Terop..
5.2.3.11.13.	Belanja Modal Pengadaan Lambang/ Logo	Untuk mengalokasikan Pengadaan Lambang/Logo.
5.2.3.11.14.	Belanja Modal Pengadaan Penyangga LCD.	Untuk mengalokasikan Pengadaan Penyangga LCD.
5.2.3.11.15.	Belanja Modal Pengadaan Tempat Sampah	Untuk mengalokasikan Pengadaan Tempat Sampah.
5.2.3.11.16.	Belanja Modal Pengadaan Tangga	Untuk mengalokasikan Pengadaan Tangga..
5.2.3.11.17.	Belanja Modal Pengadaan Rak Kaca/Etalase	Untuk mengalokasikan Pengadaan Rak Kaca/Etalase.
5.2.3.11.18.	Belanja Modal Pengadaan Tiang Antrian	Untuk mengalokasikan Pengadaan Tiang Antrian.
5.2.3.11.19.	Belanja Modal Pengadaan	Untuk mengalokasikan Pengadaan

Paraf Hierarki	
Sekda	<i>[Signature]</i>
Asisten Pen. & Kera	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>

Paraf Koordinasi	
Asisten _____	<i>[Signature]</i>
PD Pemrakarsa	<i>[Signature]</i>
PD Terkait	<i>[Signature]</i>

KODE	URAIAN	KETERANGAN
1	2	3
	Permainan Anak anak	Permainan Anak anak.
5.2.3.11.20.	Belanja Modal Pengadaan Kunei Elektronik	Untuk mengalokasikan Pengadaan Kunei Elektronik
5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	
5.2.3.12.01.	Belanja modal Pengadaan kouputer mainframe/server	Untuk mengalokasikan Pengadaan kouputer mainframe/server.
5.2.3.12.02.	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	Untuk mengalokasikan Pengadaan komputer/PC.
5.2.3.12.03.	Belanja modal Pengadaan komputer note book	Untuk mengalokasikan Pengadaan komputer note book.
5.2.3.12.04.	Belanja modal Pengadaan printer	Untuk mengalokasikan Pengadaan printer.
5.2.3.12.05.	Belanja modal Pengadaan seaner	Untuk mengalokasikan Pengadaan seaner.
5.2.3.12.06.	Belanja modal Pengadaan monitor/display	Untuk mengalokasikan Pengadaan monitor/display.
5.2.3.12.07.	Belanja modal Pengadaan CPU	Untuk mengalokasikan Pengadaan CPU.
5.2.3.12.08.	Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer	Untuk mengalokasikan Pengadaan UPS/Stabilizer.
5.2.3.12.09.	Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer (flash disk, mouse, keyboard, hardisk, speaker)	Untuk mengalokasikan Pengadaan Kelengkapan Komputer (flash disk, mouse, keyboard, hardisk, speaker).
5.2.3.12.10.	Belanja modal Pengadaan peralatan jaringan komputer	Untuk mengalokasikan Pengadaan peralatan jaringan komputer.
5.2.3.12.11.	Belanja Modal Software	Untuk mengalokasikan Pengadaan software
5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	
5.2.3.13.01.	Belanja modal Pengadaan meja kerja	Untuk mengalokasikan Pengadaan meja kerja.
5.2.3.13.02.	Belanja modal Pengadaan meja rapat	Untuk mengalokasikan Pengadaan meja rapat.
5.2.3.13.03.	Belanja modal Pengadaan meja makan	Untuk mengalokasikan Pengadaan meja makan.
5.2.3.13.04.	Belanja modal Pengadaan kursi kerja	Untuk mengalokasikan Pengadaan kursi kerja.
5.2.3.13.05.	Belanja modal Pengadaan kursi rapat.	Untuk mengalokasikan Pengadaan kursi rapat..
5.2.3.13.06.	Belanja modal Pengadaan kursi makan	Untuk mengalokasikan Pengadaan kursi makan.
5.2.3.13.07.	Belanja modal Pengadaan tempat tidur	Untuk mengalokasikan Pengadaan tempat tidur.
5.2.3.13.08.	Belanja modal Pengadaan sofa	Untuk mengalokasikan Pengadaan sofa.
5.2.3.13.09.	Belanja modal Pengadaan rak buku/tv/kembang	Untuk mengalokasikan Pengadaan rak buku/tv/kembang.
5.2.3.13.10.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kursi Siswa	Untuk mengalokasikan Pengadaan Meja Kursi Siswa..
5.2.3.13.11.	Belanja modal Pengadaan Meja Kursi Tamu	Untuk mengalokasikan Pengadaan Meja Kursi Tamu.

Paraf Hierarki	
Sekda	8
Asisten Sekda	1
Kabag Hukum	1

Paraf Koordinasi	
Asisten	h
PD Pemrakarsa	1
PD Terkait	

KODE	URAIAN	KETERANGAN
1	2	3
5.2.3.13.12.	Belanja Modal Mimbar Podium	Untuk mengalokasikan Pengadaan Mimbar Podium..
5.2.3.13.13.	Belanja modal Pengadaan Kursi Tunggu	Untuk mengalokasikan Pengadaan Kuri Tunggu.
5.2.3.13.14.	Belanja modal Pengadaan papan tulis/white board	Untuk mengalokasikan Pengadaan Papan Tulis/White board.
5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	
5.2.3.14.01.	Belanja modal Pengadaan tabung gas	Untuk mengalokasikan Pengadaan tabung gas..
5.2.3.14.02.	Belanja modal Pengadaan kompor gas	Untuk mengalokasikan Pengadaan kompor gas.
5.2.3.14.03.	Belanja modal Pengadaan lemari makan	Untuk mengalokasikan Pengadaan lemari makan.
5.2.3.14.04.	Belanja modal Pengadaan dispenser	Untuk mengalokasikan Pengadaan dispenser.
5.2.3.14.05.	Belanja modal Pengadaan kulkas	Untuk mengalokasikan Pengadaan kulkas.
5.2.3.14.06.	Belanja modal Pengadaan rak piring	Untuk mengalokasikan Pengadaan rak piring.
5.2.3.14.07.	Belanja modal Pengadaan piring/gelas/mangkok/cangkir/sendok/garpu/pisau	Untuk mengalokasikan Pengadaan piring/gelas/mangkok/cangkir/sendok/garpu/pisau.
5.2.3.14.08.	Belanja modal Pengadaan Majig Jar	Untuk mengalokasikan Pengadaan alat bantu memasak.
5.2.3.14.09.	Belanja Modal Mesin Cuci	Untuk mengalokasikan Pengadaan Mesin Cuci.
5.2.3.14.10.	Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	Untuk mengalokasikan Pengadaan Alat Rumah Tangga.
5.2.3.14.11.	Belanja Modal Trolley Food	Untuk mengalokasikan Pengadaan Trolley Food.
5.2.3.14.12.	Belanja Modal Kompor Mesin Pengering	Untuk mengalokasikan Pengadaan Kompor Mesin Pengering.
5.2.3.14.13.	Belanja Modal Pengadaan Wayer Furifer	Untuk mengalokasikan Pengadaan Wayer Furifer.
5.2.3.14.14.	Belanja Modal Penampung Air	Untuk mengalokasikan Pengadaan Penampung Air.
5.2.3.14.15.	Belanja Modal Water Heater	Untuk mengalokasikan Pengadaan Water Heater.
5.2.3.14.16.	Belanja Modal Kompor Biogas	Untuk mengalokasikan Pengadaan Kompor Biogas.
5.2.3.14.17.	Belanja Modal Pengadaan Prasmanan Set	Untuk mengalokasikan Pengadaan Prasmanan Set.
5.2.3.15.	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	
5.2.3.15.01.	Belanja modal Pengadaan lampu hias	Untuk mengalokasikan Pengadaan lampu hias.
5.2.3.15.02.	Belanja modal Pengadaan jam dinding/meja	Untuk mengalokasikan Pengadaan jam dinding/meja.
5.2.3.15.03.	Belanja Modal Kain Penghias Ruangan	Untuk mengalokasikan Pengadaan gorden.
5.2.3.15.04.	Belanja Modal TV dan kelengkapannya	Untuk mengalokasikan Pengadaan TV dan Kelengkapannya.
5.2.3.15.05.	Belanja Modal Mesin penyedot debu	Untuk mengalokasikan Pengadaan Mesin Penyedot Debu.

Paraf Hiera-ki		Paraf Koordinasi	
Sekda	<input checked="" type="checkbox"/>	Asisten	<input checked="" type="checkbox"/>
Asisten Pem. & Kera	<input checked="" type="checkbox"/>	PD Pemrakarsa	<input checked="" type="checkbox"/>
Kabag Hukum	<input checked="" type="checkbox"/>	PD Terkait	<input checked="" type="checkbox"/>

KODE	URAIAN	KETERANGAN
1	2	3
5.2.3.15.06.	Belanja Modal Pengadaan Karpet	Untuk mengalokasikan Pengadaan Karpet.
5.2.3.15.07.	Balanja Modal Pengadaan Jemuran	Untuk mengalokasikan Pengadaan Jemuran.
5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	
5.2.3.16.01.	Belanja modal Pengadaan kamera	Untnkn mengalokasikan Pengadaan kamera.
5.2.3.16.02.	Belanja modal Pengadaan handycam	Untuk mengalokasikan Pengadaan handycam.
5.2.3.16.03.	Belanja modal Pengadaan proyektor	Untuk mengalokasikan Pengadaan proyektor.
5.2.3.16.04.	Belanja modal Alat Kelengkapan Studio	Untuk mengalokasikan Pengadaan peralatan audio visual.
5.2.3.16.05.	Belanja modal Pengadaan Sound System	Untuk mengalokasikan Pengadaan Sound System.
5.2.3.16.06.	Belanja Modal pengadaan Wireles set	Untuk mengalokasikan Pengadaan Wireles Set.
5.2.3.16.07.	Belanja modal VCD/DVD palyer	Untuk mengalokasikan Pengadaan VCD/DVD Palyer.
5.2.3.16.08.	Belanja Modal Pengadaan CCTV	Untuk mengalokasikan Pengadaan CCTV.
5.2.3.16.09.	Belanja Modal Tape Mobil	Untuk mengalokasikan Pengadaan Tape Mobil.
5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	
5.2.3.17.01.	Belanja modal Pengadaan telepon	Untuk mengalokasikan Pengadaan telepon.
5.2.3.17.02.	Belanja modal Pengadaan faximili	Untuk mengalokasikan Pengadaan faximili.
5.2.3.17.03.	Belanja modal Pengadaan radio SSB	Untuk mengalokasikan Pengadaan radio SSB.
5.2.3.17.04.	Belanja modal Pengadaan radio HF/FM (Handy Talkie)	Untuk mengalokasikan Pengadaan radio HF/FM (Handy Talkie).
5.2.3.17.05.	Belanja modal Pengadaan radio VHF	Untuk mengalokasikan Pengadaan Radio VHF.
5.2.3.17.06.	Belanja modal Pengadaan radio UHF	Untuk mengalokasikan Pengadaan Radio UHF
5.2.3.17.07.	Belanja modal Pengadaan alat sandi	Untuk mengalokasikan Pengadaan alat sandi.
5.2.3.17.08.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Pemancar	Untuk mengalokasikan Pengadaan peralatan pemancar contoh : antena dan jaringan backbone wifi dll
5.2.3.17.09.	Belanja modal Pengadaan Perlengkapan Komunikasi	Untuk mengalokasikan Pengadaan Perlengkapan Komunikasi.
5.2.3.18.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	
5.2.3.18.01.	Belanja modal Pengadaan timbangan	Untuk mengalokasikan Pengadaan timbangan.
5.2.3.18.02.	Belanja modal Pengadaan teodolite	Untuk mengalokasikan Pengadaan teodolite.
5.2.3.18.03.	Belanja modal Pengadaan alat uji emisi	Untuk mengalokasikan Pengadaan alat uji emisi.
5.2.3.18.04.	Belanja modal Pengadaan nlat-GPS	Untuk mengalokasikan Pengadaan alat GPS.

Paraf Hierarki	
Sekda	<input checked="" type="checkbox"/>
Asisten Sekda	<input type="checkbox"/>
Ket. Bina	<input type="checkbox"/>

Paraf Koordinasi	
Asisten	<input checked="" type="checkbox"/>
PD Pemrakarsa	<input type="checkbox"/>
PD Terkait	<input type="checkbox"/>

KODE	URAIAN	KETERANGAN
1	2	3
5.2.3.18.05.	Belanja modal Pengadaan kompas/peralatan navigasi	Untuk mengalokasikan Pengadaan kompas/peralatan navigasi.
5.2.3.18.06.	Belanja modal Pengadaan bejana ukur	Untuk mengalokasikan Pengadaan bejana ukur.
5.2.3.18.07.	Belanja modal Pengadaan barometer	Untuk mengalokasikan Pengadaan barometer.
5.2.3.18.08.	Belanja modal Pengadaan seismograph	Untuk mengalokasikan Pengadaan seismograph.
5.2.3.18.09.	Belanja modal Pengadaan ultrasonograph	Untuk mengalokasikan Pengadaan ultrasonograph.
5.2.3.18.10.	Belanja modal Fisk Finder	Untuk mengalokasikan Pengadaan Fik Finder
5.2.3.18.11.	Belanja Modal Pengadaan Alat Pengukur Kecepatan	Untuk mengalokasikan Pengadaan Alat Pengukur Kecepatan.
5.2.3.18.12.	Belanja Modal Pengadaan Meteran	Untuk mengalokasikan Pengadaan Meteran.
5.2.3.T8.T3.	Belanja Modal Pengadaan Alat Centrifuge Extractor Test	Untuk mengalokasikan Pengadaan Alat Centrifuge Extractor Test.
5.2.3.18.14.	Belanja Modal Sound Lever Meter	Untuk mengalokasikan Pengadaan Sound Lever Meter.
5.2.3.18.15.	Belanja Modal Pengadaan Disto Meter	Untuk mengalokasikan Pengadaan Disto Meterr.
5.2.3.18.16.	Belanja Modal Pengadaan Altimeter	Untuk mengalokasikan Pengadaan Altimeter.
5.2.3.19.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	
5.2.3.19.01.	Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran umum	Untuk mengalokasikan Pengadaan alat-alat kedokteran umum.
5.2.3.19.02.	Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran gigi	Untuk mengalokasikan Pengadaan alat-alat kedokteran gigi.
5.2.3.19.03.	Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran THT	Untuk mengalokasikan Pengadaan alat-alat kedokteran THT.
5.2.3.19.04.	Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran mata	Untuk mengalokasikan Pengadaan alat-alat kedokteran mata.
5.2.3.19.05.	Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran bedah	Untuk mengalokasikan Pengadaan alat-alat kedokteran bedah.
5.2.3.19.06.	Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran anak	Untuk mengalokasikan Pengadaan alat-alat kedokteran anak.
5.2.3.19.07.	Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran kebidanan dan penyakit kandungan	Untuk mengalokasikan Pengadaan alat-alat kedokteran kebidanan dan penyakit kandungan.
5.2.3.19.08.	Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran kulit dan kelamin	Untuk mengalokasikan Pengadaan alat-alat kedokteran kulit dan kelamin.
5.2.3.19.09.	Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran kardiologi	Untuk mengalokasikan Pengadaan alat-alat kedokteran kardiologi.
5.2.3.19.10.	Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran neurologi	Untuk mengalokasikan Pengadaan alat-alat kedokteran neurologi.
5.2.3.19.11.	Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran orthopedi	Untuk mengalokasikan Pengadaan alat-alat kedokteran orthopedi.

Parat Hierarki	
Sekda	✓
Asisten Sekda	✓
Kabag Hukum	✓

Asisten	h
PD Pemrakarsa	y
PD Terkait	

KODE	URAIAN	KETERANGAN
1	2	3
5.2.3.19.12.	Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran hewan	Untuk mengalokasikan Pengadaan alat-alat kedokteran hewan.
5.2.3.19.13.	Belanja modal Pengadaan alat-alat farmasi	Untuk mengalokasikan Pengadaan alat-alat farmasi.
5.2.3.19.14.	Belanja modal Pengadaan alat-alat penyakit dalam/internis	Untuk mengalokasikan Pengadaan alat-alat penyakit dalam/internis.
5.2.3.19.15.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Roda	Untuk mengalokasikan Pengadaan Kursi Roda.
5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	
5.2.3.20.01.	Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium biologi	Untuk mengalokasikan Pengadaan alat-alat laboratorium biologi.
5.2.3.20.02.	Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium fisika/geologi/geodesi	Untuk mengalokasikan Pengadaan alat-alat laboratorium fisika/geologi/geodesi.
5.2.3.20.03.	Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium kimia	Untuk mengalokasikan Pengadaan alat-alat laboratorium kimia.
5.2.3.20.04.	Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium pertanian	Untuk mengalokasikan Pengadaan alat-alat laboratorium pertanian.
5.2.3.20.05.	Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium peternakan	Untuk mengalokasikan Pengadaan alat-alat laboratorium peternakan.
5.2.3.20.06.	Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium perkebunan	Untuk mengalokasikan Pengadaan alat-alat laboratorium perkebunan.
5.2.3.20.07.	Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium perikanan	Untuk mengalokasikan Pengadaan alat-alat laboratorium perikanan.
5.2.3.20.08.	Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium bahasa	Untuk mengalokasikan Pengadaan alat-alat laboratorium bahasa.
5.2.3.20.09.	Belanja modal Pengadaan alat-alat peraga / praktik sekolah	Untuk mengalokasikan Pengadaan alat-alat peraga/ praktik sekolah.
5.2.3.20.10.	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Lainnya	Untuk mengalokasikan Pengadaan alat-alat laboratorium kesehatan/ kedokteran.
5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	
5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	Untuk mengalokasikan Pengadaan konstruksi jalan.
5.2.3.21.02.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan fly over	Untuk mengalokasikan Pengadaan konstruksi jalan fly over.
5.2.3.21.03.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan under pass	Untuk mengalokasikan Pengadaan konstruksi jalan under pass.
5.2.3.21.04.	Belanja Modal pengadaan konstruksi jalan lingkungan	Untuk mengalokasikan Pengadaan konstruksi jalan Lingkungan.
5.2.3.22.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	
5.2.3.22.01.	Belanja modal Pengadaan	Untuk mengalokasikan Pengadaan

Paraf Hierarki		Asisten	
Sekda	✓	PD Pemrakarsa	
Asisten Pembantu Sekda	✓	PD Terkait	
Ket. Bidang Hukum	✓		

KODE	URAIAN	KETERANGAN
1	2	3
	konstruksi jembatan gantung	konstruksi jembatan gantung..
5.2.3.22.02.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan ponton	Untuk mengalokasikan Pengadaan konstruksi jembatan ponton.
5.2.3.22.03.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan penyebrangan jalan orang	Untuk mengalokasikan Pengadaan konstruksi jembatan penyebrangan orang.
5.2.3.22.04.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan penyebrangan diatas air	Untuk mengalokasikan Pengadaan konstruksi jembatan penyebrangan orang.
5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	
5.2.3.23.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi bendungan	Untuk mengalokasikan Pengadaan konstruksi bendungan.
5.2.3.23.02.	Belanja modal Pengadaan konstruksi waduk	Untuk mengalokasikan Pengadaan konstruksi waduk.
5.2.3.23.03.	Belanja modal Pengadaan konstruksi kanal permukaan	Untuk mengalokasikan Pengadaan konstruksi kanal permukaan.
5.2.3.23.04.	Belanja modal Pengadaan konstruksi kanal bawah tanah	Untuk mengalokasikan Pengadaan konstruksi kanal bawah tanah.
5.2.3.23.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	Untuk mengalokasikan Pengadaan konstruksi jaringan irigasi.
5.2.3.23.06.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan air bersih/air minum	Untuk mengalokasikan Pengadaan konstruksi jaringan air bersih/air minum.
5.2.3.23.07.	Belanja modal Pengadaan konstruksi reservoir	Untuk mengalokasikan Pengadaan konstruksi reservoir.
5.2.3.23.08.	Belanja modal Pengadaan konstruksi pintu air	Untuk mengalokasikan Pengadaan konstruksi pintu air.
5.2.3.23.09.	Belanja Modal Kontruksi Drainase	Untuk mengalokasikan Pengadaan konstruksi saluran air.
5.2.3.23.10.	Belanja Modal Kontruksi Pengaman Sungai	Untuk mengalokasikan Pengadaan konstruksi pengaman sungai.
5.2.3.23.11.	Belanja Modal Kontruksi Sumur Bor/Gas	Untuk mengalokasikan Pengadaan konstruksi Sumur Bur /Gas.
5.2.3.23.12.	Belanja Modal Konservasi	Untuk mengalokasikan Pengadaan Konervasi.
5.2.3.23.13.	Belanja Modal Pembuatan Jalur Labuh Perahu	Untuk mengalokasikan Pengadaan Pembuatan Jalur Labuh Perahu.
5.2.3.24.	Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	
5.2.3.24.01.	Belanja modal Pengadaan lampu hias jalan	Untuk mengalokasikan Pengadaan lampu hias jalan.
5.2.3.24.02.	Belanja modal Pengadaan lampu hias taman	Untuk mengalokasikan Pengadaan lampu hias taman.
5.2.3.24.03.	Belanja modal Pengadaan lampu penerang hutan kota	Untuk mengalokasikan Pengadaan lampu penerang hutan kota.
5.2.3.24.04.	Belanja Modal Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum	Untuk mengalokasikan Pengadaan lampu penerangan jalan umum.
5.2.3.25.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan	

Paraf Hierarki		Paraf Koordinasi	
Sekda	6	Asisten	h
Asisten Pen & Keco	t	PD Pemrakarsa	y
Kabag Hukum	λ	PD Terkait	l

KODE	URAIAN	KETERANGAN
1	2	3
	Telepon	
5.2.3.25.01.	Belanja modal Pengadaan instalasi listrik	Untuk mengalokasikan Pengadaan instalasi listrik.
5.2.3.25.02.	Belanja modal Pengadaan instalasi telepon	Untuk mengalokasikan Pengadaan instalasi telepon .
5.2.3.25.03.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Air	Untuk mengalokasikan Pengadaan instalasi air .
5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	
5.2.3.26.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	Untuk mengalokasikan Pengadaan konstruksi gedung kantor, baik yang dibangun dan/atau dibeli dalam bentuk jadi.
5.2.3.26.02.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian rumah jabatan	Untuk mengalokasikan Pengadaan konstruksi rumah jabatan, baik yang dibangun dan/atau dibeli dalam bentuk jadi.
5.2.3.26.03.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian rumah dinas	Untuk mengalokasikan Pengadaan konstruksi rumah dinas, baik yang dibangun dan/atau dibeli dalam bentuk jadi.
5.2.3.26.04.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/Pembelian gedung gudang	Untuk mengalokasikan Pengadaan konstruksi gedung gudang, baik yang dibangun dan/atau dibeli dalam bentuk jadi.
5.2.3.26.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian bangunan bersejarah	Untuk mengalokasikan Pengadaan konstruksi bangunan bersejarah, baik yang dibangun dan/atau dibeli dalam bentuk jadi.
5.2.3.26.06.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian bangunan monumen	Untuk mengalokasikan Pengadaan konstruksi bangunan monumen, baik yang dibangun dan/atau dibeli dalam bentuk jadi.
5.2.3.26.07.	Belanja modal Pengadaan konstruksi tugu batas Kabupaten	Untuk mengalokasikan Pengadaan konstruksi tugu peringatan, baik yang dibangun dan/atau dibeli dalam bentuk jadi.
5.2.3.26.08.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian Rambu-rambu	Untuk mengalokasikan Pengadaan konstruksi / pembelian Rambu-rambu.
5.2.3.26.09.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian Tempat Wisata	Untuk mengalokasikan Pengadaan konstruksi / pembelian Tempat Wisata.
5.2.3.26.10.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung tempat belajar	Untuk mengalokasikan Pengadaan konstruksi / pembelian gedung tempat belajar.
5.2.3.26.11.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian Fasilitas Sanitasi	Untuk mengalokasikan Pengadaan konstruksi / pembelian Fasilitas Sanitasi.
5.2.3.25.12.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian MCK	Untuk mengalokasikan Pengadaan konstruksi / pembelian MCK.
5.2.3.26.13.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian Kios Pedagang	Untuk mengalokasikan Pengadaan konstruksi / pembelian Kios Pedagang.

Paraf Hierarki	
Sekda	✓
Kepala Bidang	h
Kasubid	h

Paraf Koordinasi	
Asisten	h
PD Pemrakarsa	h
PD Terkait	h







KODE	URAIAN	KETERANGAN
1	2	3
5.2.3.26.14.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian Terminal	Untuk mengalokasikan Pengadaan konstruksi bangunan terminal, baik yang dibangun dan/atau dibeli dalam bentuk jadi.
5.2.3.26.15.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian Pasar	Untuk mengalokasikan Pengadaan konstruksi / pembelian Pasar.
5.2.3.26.16.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian Stadion Olah Raga	Untuk mengalokasikan Pengadaan konstruksi bangunan gelanggang olahraga, baik yang dibangun dan/atau dibeli dalam bentuk jadi.
5.2.3.26.17.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian Tempat Pengolah Sampah	Untuk mengalokasikan Pengadaan konstruksi /Pembelian Tempat Pengolah Sampah.
5.2.3.26.18.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian Menara	Untuk mengalokasikan Pengadaan konstruksi /Pembelian Menara.
5.2.3.26.19.	Belanja modal Pengadaan konstruksi / Pembelian Tempat Tanaman	Untuk mengalokasikan Pengadaan konstruksi /Pembelian Tempat Tanaman.
5.2.3.26.20.	Belanja Modal Pengadaan Landasan Pacu Bandar Udara	Untuk mengalokasikan Pengadaan Landasan Pacu Bandar Udara.
5.2.3.26.21.	Belanja modal Pengadaan konstruksi Unit Pembenihan Rakyat	Untuk mengalokasikan Pengadaan Konstruksi Unit Pembenihan Rakyat.
5.2.3.26.22.	Belanja modal Pengadaan konstruksi Penerangan Jalan dan Taman	Untuk mengalokasikan Pengadaan Konstruksi Penerangan Jalan dan Taman.
5.2.3.26.23.	Belanja modal Pengadaan konstruksi Kolam	Untuk mengalokasikan Pengadaan Konstruksi Kolam.
5.2.3.26.24.	Belanja modal Sarana dan Prasarana Persampahan	Untuk mengalokasikan Pengadaan Sarana dan Prasarana Persampahan.
5.2.3.26.25.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Taman	Untuk mengalokasikan Pengadaan Konstruksi Taman.
5.2.3.26.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sarana Kesehatan	Untuk mengalokasikan Pengadaan konstruksi bangunan gedung kesehatan/laboratorium, baik yang dibangun dan/atau dibeli dalam bentuk jadi.
5.2.3.26.27.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Tempat Parkir	Untuk mengalokasikan Pengadaan Konstruksi Tempat Parkir.
5.2.3.26.28.	Belanja modal konstruksi pagar/gapura	Untuk mengalokasikan Pengadaan Konstruksi pagar, baik yang dibangun dan/atau dibeli dalam bentuk jadi.
5.2.3.27.	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	
5.2.3.27.01.	Belanja modal Pengadaan buku matematika	Untuk mengalokasikan Pengadaan buku matematika.
5.2.3.27.02.	Belanja modal Pengadaan buku fisika	Untuk mengalokasikan Pengadaan buku fisika.
5.2.3.27.03.	Belanja modal Pengadaan buku kimia	Untuk mengalokasikan Pengadaan buku kimia.
5.2.3.27.04.	Belanja modal Pengadaan buku biologi	Untuk mengalokasikan Pengadaan buku biologi. Contoh : Buku Biologi Penunjang Kurikulum

Paraf Hierarki		Paraf Koordinasi	
Sekda	<input checked="" type="checkbox"/>	Asisten	<input checked="" type="checkbox"/>
Ket. Per. & Y. & D.	<input checked="" type="checkbox"/>	PD Pemrakarsa	<input checked="" type="checkbox"/>
Kabag Hukum	<input checked="" type="checkbox"/>	PD Terkait	<input checked="" type="checkbox"/>

KODE	URAIAN	KETERANGAN
1	2	3
5.2.3.27.05.	Belanja modal Pengadaan buku biografi	Untuk mengalokasikan Pengadaan buku biografi.
5.2.3.27.06.	Belanja modal Pengadaan buku geografi	Untuk mengalokasikan Pengadaan buku geografi.
5.2.3.27.07.	Belanja modal Pengadaan buku astronomi	Untuk mengalokasikan Pengadaan buku astronomi.
5.2.3.27.08.	Belanja modal Pengadaan buku arkeologi	Untuk mengalokasikan Pengadaan buku arkeologi.
5.2.3.27.09.	Belanja modal Pengadaan buku bahasa dan sastra	Untuk mengalokasikan Pengadaan buku bahasa dan sastra.
5.2.3.27.10.	Belanja modal Pengadaan buku keagamaan	Untuk mengalokasikan Pengadaan buku keagamaan.
5.2.3.27.11.	Belanja modal Pengadaan buku sejarah	Untuk mengalokasikan Pengadaan buku sejarah.
5.2.3.27.12.	Belanja modal Pengadaan buku seni dan budaya	Untuk mengalokasikan Pengadaan buku seni dan budaya.
5.2.3.27.13.	Belanja modal Pengadaan buku Perpustakaan	Untuk mengalokasikan Pengadaan buku Perpustakaan.
5.2.3.27.14.	Belanja modal Pengadaan buku ilmu pengetahuan sosial	Untuk mengalokasikan Pengadaan buku ilmu pengetahuan sosial.
5.2.3.27.15.	Belanja modal Pengadaan buku ilmu politik dan ketatanegaraan	Untuk mengalokasikan Pengadaan buku ilmu politik dan ketatanegaraan.
5.2.3.27.16.	Belanja modal Pengadaan buku ilmu pengetahuan dan teknologi	Untuk mengalokasikan Pengadaan buku ilmu pengetahuan dan teknologi.
5.2.3.27.17.	Belanja modal Pengadaan buku ensiklopedia	Untuk mengalokasikan Pengadaan buku ensiklopedia.
5.2.3.27.18.	Belanja modal Pengadaan buku kamus bahasa	Untuk mengalokasikan Pengadaan buku kamus bahasa.
5.2.3.27.19.	Belanja modal Pengadaan buku ekonomi dan keuangan	Untuk mengalokasikan Pengadaan buku ekonomi dan keuangan.
5.2.3.27.20.	Belanja modal Pengadaan buku industri dan perdagangan	Untuk mengalokasikan Pengadaan buku industri dan perdagangan.
5.2.3.27.21.	Belanja modal Pengadaan buku peraturan perundang-undangan	Untuk mengalokasikan Pengadaan buku peraturan perundang-undangan.
5.2.3.27.22.	Belanja modal Pengadaan buku naskah	Untuk mengalokasikan Pengadaan buku naskah.
5.2.3.27.23.	Belanja modal Pengadaan terbitan berkala (jurnal, Compact Disk)	Untuk mengalokasikan Pengadaan buku terbitan berkala (jurnal, Compact Disk).
5.2.3.27.24.	Belanja modal Pengadaan mikrofilm	Untuk mengalokasikan Pengadaan buku mikrofilm.
5.2.3.27.25.	Belanja modal Pengadaan peta/atlas/globe	Untuk mengalokasikan Pengadaan buku peta/atlas/globe.
5.2.3.27.26.	Belanja Modal Buku Pelajaran	Untuk mengalokasikan Pengadaan buku Pelajaran.
5.2.3.27.27.	Belanja Modal Peta Tematik	Untuk mengalokasikan Pengadaan buku Peta Tematik.
5.2.3.28.	Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian, Kebudayaan	
5.2.3.28.01.	Belanja modal Pengadaan	Untuk mengalokasikan Pengadaan

Paraf Hierarki		Paraf Koordinasi	
Sekda	✓	Asisten _____	h
Asisten Sekda	h	PD Pemrakarsa	h
Kabag	h	PD Terkait	h

KODE	URAIAN	KETERANGAN
1	2	3
	lukisan/foto	lukisan/foto.
5.2.3.28.02.	Belanja modal Pengadaan patung	Untuk mengalokasikan Pengadaan patung.
5.2.3.28.03.	Belanja modal Pengadaan ukiran	Untuk mengalokasikan Pengadaan ukiran.
5.2.3.28.04.	Belanja modal Pengadaan pahatan	Untuk mengalokasikan Pengadaan pahatan.
5.2.3.28.05.	Belanja modal Pengadaan batu alam	Untuk mengalokasikan Pengadaan batu alam.
5.2.3.28.06.	Belanja modal Pengadaan maket/miniatur/diorama	Untuk mengalokasikan Pengadaan maket/miniatur/diorama.
5.2.3.28.07.	Belanja Modal Gamelan	Untuk mengalokasikan Pengadaan pengadaan peralatan kesenian tradisional / gamelan
5.2.3.28.08.	Belanja Modal Alat Musik	Untuk mengalokasikan Pengadaan alat musik.
5.2.3.29.	Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak dan Tanaman	
5.2.3.29.01.	Belanja modal Pengadaan hewan kebun binatang	Untuk mengalokasikan Pengadaan hewan kebun binatang.
5.2.3.29.02.	Belanja modal Pengadaan ternak	Untuk mengalokasikan Pengadaan Ternak.
5.2.3.29.03.	Belanja modal Pengadaan tanaman	Untuk mengalokasikan Pengadaan tanaman.
5.2.3.30.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan	
5.2.3.30.01.	Belanja modal Pengadaan senjata api	Untuk mengalokasikan Pengadaan senjata api.
5.2.3.30.02.	Belanja modal Pengadaan radar	Untuk mengalokasikan Pengadaan radar.
5.2.3.30.03.	Belanja modal Pengadaan mobil water canon	Untuk mengalokasikan Pengadaan mobil water canon.
5.2.3.30.04.	Belanja modal Pengadaan boi gol	Untuk mengalokasikan Pengadaan borgol
5.2.3.30.05.	Belanja modal Pengadaan sangkur/bayonet	Untuk mengalokasikan Pengadaan sangkur/bayonet.
5.2.3.30.06.	Belanja modal Pengadaan penisai/tameng	Untuk mengalokasikan Pengadaan perisai/tameng.
5.2.3.30.07.	Belanja modal Pengadaan detektor logam	Untuk mengalokasikan Pengadaan detektor logam.
5.2.3.30.08.	Belanja modal Pengadaan rompi anti peluru	Untuk mengalokasikan Pengadaan rompi anti peluru
5.2.3.30.09.	Belanja modal Pengadaan pentungan	Untuk mengalokasikan Pengadaan pentungan.
5.2.3.30.10.	Belanja modal Pengadaan helm	Untuk mengalokasikan Pengadaan helm.
5.2.3.30.11.	Belanja Modal Pengadaan Alarm/Sirine	Untuk mengalokasikan Pengadaan alarm/sirene.
5.2.3.30.12.	Belanja modal Pengadaan sentolop/senter	Untuk mengalokasikan Pengadaan sentolop/senter.
5.2.3.30.13.	Belanja modal Pengadaan baju pelampung/pelampung	Untuk mengalokasikan Pengadaan Baju Pelampung/Pelampung.

Paraf Hierarki		Paraf Koordinasi	
Sekda		Asisten	
Asisten Sekda		PD Pemrakarsa	
Kabag Hukum		PD Terkait	

KODE	URAIAN	KETERANGAN
1	2	3
5.2.3.30.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Selam	Untuk mengalokasikan Pengadaan Peralatan selam.
5.2.3.30.15.	Belanja Modal Pengadaan Teropong	Untuk mengalokasikan Pengadaan Teropong.
5.2.3.30.16.	Belanja Modal Pengadaan Papan Selancar	Untuk mengalokasikan Pengadaan Papan Selancar.
5.2.3.30.17.	Belanja Modal Kelengkapan Evakuasi	Untuk mengalokasikan Pengadaan Kelengkapan Evakuasi.
5.2.3.31.	Belanja Modal Dana Bos	
5.2.3.31.01.	Belanja Modal Dana Bos.	Untuk mengalokasikan Pengadaan dari dana bos
5.2.3.32.	Belanja Modal Dana BLUD	
5.2.3.32.01.	Belanja Modal BLUD	Untuk mengalokasikan Pengadaan dari dana Blud
5.2.3.33.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	
5.2.3.33.01.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga.	Untuk mengalokasikan Pengadaan Kelengkapan /Peralatan Rumah Tangga.
5.2.3.34.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Praktek	
5.2.3.34.01.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Praktek.	Untuk mengalokasikan Pengadaan Kelengkapan /Peralatan Praktek.
5.2.3.35.	Belanja modal pengadaan alat pengolah limbah medis	
5.2.3.35.01.	Belanja Modal Pengadaan Alat Pengolah Limbah Medis	Untuk mengalokasikan Pengadaan Alat Pengolah Limbah Medis.
5.2.3.36.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Central Gas Medis	
5.2.3.36.01.	Belanja modal pengadaan instalasi central gas medis	Untuk mengalokasikan Pengadaan instalai central gas medis.
5.2.3.36.02.	Belanja modal pengadaan instalasi transporter /pneumatic tube	Untuk mengalokasikan Pengadaan instalai transporter/pneumatic tube
5.2.3.36.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya di BOS	
5.2.3.37.01.	Belanja modal Aset tetap lainnya di BOS	Belanja modal Aset tetap lainnya di BOS
5.2.3.38.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BOS	
5.2.3.38.01.	Belanja modal gedung dan bangunan BOS	Belanja modal gedung dan bangunan BOS

BUPATI PACITAN ✓


INDARTATO

Paraf Koordinasi	h
sten	
Pemrakarsa	Y
Terkait	

LAMPIRAN V

PERATURAN BUPATI PACITAN

NOMOR 50 Tahun 2019

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PACITAN NOMOR 66 TAHUN 2017

TENTANG KODE REKENING ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2019

KODE REKENING PEMBIAYAAN

KODE	URAIAN	KETERANGAN
1	2	3
6.	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1.	Penerimaan Pembiayaan Daerah	
6.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	
6.1.1.01.	Pelampauan penerimaan PAD	
6.1.1.01.01.	Pajak Daerah	Untuk menganggarkan pelampauan penerimaan PAD dari Pajak daerah
6.1.1.01.02.	Retribusi Daerah	Untuk menganggarkan pelampauan penerimaan PAD dari Retribusi Daerah
6.1.1.01.03.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Untuk menganggarkan pelampauan penerimaan PAD dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
6.1.1.01.04.	Lain lain PAD yang sah	Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan PAD dari Lain lain PAD yang sah
6.1.1.02.	Pelampauan penerimaan Dana Perimbangan	
6.1.1.02.03.	Dana Alokasi Umum	Untuk menganggarkan pelampauan penerimaan Dana Alokasi Umum. Yang diperoleh dari Dana Alokasi Umum.
6.1.1.02.04.	Dana Alokasi Khusus	Untuk menganggarkan pelampauan penerimaan Dana Alokasi Khusus. Yang diperoleh dari Dana Alokasi Khusus.
6.1.1.03.	Pelampauan penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	
6.1.1.03.01.	Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Untuk menganggarkan pelampauan penerimaan yang diperoleh dari penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
6.1.1.03.02.	Penerimaan Lain-lain	Untuk menganggarkan pelampauan penerimaan yang diperoleh dari penerimaan lain-lain.
6.1.1.03.03.	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	Untuk menganggarkan pelampauan penerimaan yang diperoleh dari Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya.
6.1.1.03.04.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	Untuk menganggarkan pelampauan penerimaan yang diperoleh dari Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus.
6.1.1.03.05.	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya	Untuk menganggarkan pelampauan penerimaan yang diperoleh dari Bantuan Keuangan dari Provinsi atau pemerintah Daerah Lainnya.
6.1.1.04.	Sisa Penghematan Belanja atau akibat lainnya	

<table border="1"> <tr> <td>Sekda</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>Asisten Sekda</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>Kabag Hukum</td> <td>✓</td> </tr> </table>	Sekda	✓	Asisten Sekda	✓	Kabag Hukum	✓	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Paraf Koordinasi</td> </tr> <tr> <td>Asisten</td> <td>h</td> </tr> <tr> <td>PD Pemrakarsa</td> <td>f</td> </tr> <tr> <td>PD Terkait</td> <td>f</td> </tr> </table>	Paraf Koordinasi		Asisten	h	PD Pemrakarsa	f	PD Terkait	f
Sekda	✓														
Asisten Sekda	✓														
Kabag Hukum	✓														
Paraf Koordinasi															
Asisten	h														
PD Pemrakarsa	f														
PD Terkait	f														

KODE	URAIAN	KETERANGAN
1	2	3
6.1.1.04.01.	Belanja Pegawai dari Belanja Tidak Langsung	Untuk menganggarkan sisa penghematan belanja atau akibat lainnya yang diperoleh dari belanja pegawai dari belanja tidak langsung.
6.1.1.04.02.	Belanja Pegawai dari Belanja Langsung	Untuk menganggarkan sisa penghematan belanja atau akibat lainnya yang diperoleh dari belanja pegawai dari belanja langsung.
6.1.1.04.03.	Belanja Barang dan Jasa	Untuk menganggarkan sisa penghematan belanja atau akibat lainnya yang diperoleh dari belanja barang dan jasa.
6.1.1.04.04.	Belanja Modal	Untuk menganggarkan sisa penghematan belanja atau akibat lainnya yang diperoleh dari belanja modal.
6.1.1.04.05.	Belanja Bunga	Untuk menganggarkan sisa penghematan belanja atau akibat lainnya yang diperoleh dari belanja bunga.
6.1.1.04.06.	Belanja Subsidi	Untuk menganggarkan sisa penghematan belanja atau akibat lainnya yang diperoleh dari belanja subsidi.
6.1.1.04.07.	Belanja Hibah	Untuk menganggarkan sisa penghematan belanja atau akibat lainnya yang diperoleh dari belanja hibah.
6.1.1.04.08.	Belanja Bantuan Sosial	Untuk menganggarkan sisa penghematan belanja atau akibat lainnya yang diperoleh dari belanja bantuan sosial.
6.1.1.04.09.	Belanja Belanja Bagi Hasil	Untuk menganggarkan sisa penghematan belanja atau akibat lainnya yang diperoleh dari belanja bagi hasil.
6.1.1.04.10.	Belanja Bantuan Keuangan	Untuk menganggarkan sisa penghematan belanja atau akibat lainnya yang diperoleh dari belanja bantuan keuangan.
6.1.1.04.11.	Belanja Belanja Tidak Terduga	Untuk menganggarkan sisa penghematan belanja atau akibat lainnya yang diperoleh dari belanja tidak terduga.
6.1.1.05.	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	
6.1.1.05.01.	Uang jaminan	Untuk menganggarkan kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan yang diperoleh dari uang jaminan.
6.1.1.05.02.	Potongan Taspen	Untuk menganggarkan kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan yang diperoleh dari potongan Taspen.
6.1.1.05.03.	Potongan Beras	Untuk menganggarkan kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan yang diperoleh dari potongan beras.
6.1.1.05.04.	Askes	Untuk menganggarkan kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan yang diperoleh dari Askes.
6.1.1.06.	Kegiatan lanjutan	
6.1.1.06.01.	Kegiatan lanjutan	Untuk menganggarkan penerimaan pembiayaan yang diperoleh dari kegiatan

Paraf Hierarki		Paraf Koordinasi	
Sekda	✓	Asisten	h
Asisten Sekda	h	PD Pemrakarsa	f
Asisten Ahli	x	PD Terkait	

KODE	URAIAN	KETERANGAN
1	2	3
		lanjutan.
6.1.1.07.	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan	
6.1.1.07.01.	Pelampauan Pencairan Dana Cadangan	Untuk menganggarkan pelampauan penerimaan pencairan dana cadangan yang diperoleh dari pelampauan dana cadangan.
6.1.1.07.02.	Pelampauan Penerimaan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	Untuk menganggarkan pelampauan penerimaan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan yang diperoleh dari pelampauan penerimaan Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.
6.1.1.07.03.	Pelampauan Penerimaan Pinjaman Daerah	Untuk menganggarkan pelampauan penerimaan pinjaman daerah yang diperoleh dari pelampauan pinjaman daerah.
6.1.1.07.04.	Pelampauan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	Untuk menganggarkan pelampauan penerimaan kembali pemberian pinjaman yang diperoleh dari pelampauan penerimaan kembali pemberian pinjaman.
6.1.1.07.05.	Pelampauan Penerimaan Piutang Daerah	Untuk menganggarkan pelampauan penerimaan piutang daerah yang diperoleh dari pelampauan penerimaan piutang daerah.
6.1.1.07.06.	Pelampauan Penerimaan Pengembalian Modal Investasi	Untuk menganggarkan pelampauan penerimaan pengembalian Modal Investasi yang diperoleh dari pelampauan penerimaan pengembalian Modal Investasi.
6.1.1.08.	Penghematan Pengeluaran Pembiayaan	
6.1.1.08.01.	Penghematan Pembentukan Dana Cadangan	Untuk menganggarkan penghematan pembentukan Dana Cadangan yang diperoleh dari penghematan pembentukan dana cadangan.
6.1.1.08.02.	Penghematan Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	Untuk menganggarkan penghematan penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah yang diperoleh dari penghematan penyertaan modal (Investasi) Pemerintah Daerah.
6.1.1.08.03.	Penghematan Pembayaran Pokok Utang	Untuk menganggarkan penghematan pembayaran pokok utang yang diperoleh dari penghematan pembayaran pokok utang.
6.1.1.08.04.	Penghematan Pemberian Pinjaman Daerah	Untuk menganggarkan penghematan pemberian pinjaman daerah yang diperoleh dari penghematan pemberian pinjaman daerah.
6.1.2.	Pencairan Dana Cadangan	
6.1.2.01.	Pencairan Dana Cadangan	
6.1.2.01.01.	Pencairan Dana Cadangan nomor	Untuk menganggarkan penerimaan pembiayaan yang diperoleh dari pencairan Dana Cadangan.
6.1.3.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	
6.1.3.01.	Hasil penjualan	

Paraf Hierarki		
Sekda	✓	Asisten _____
Nisw. Pemb. Kes	+	PD Pemrakarsa _____
Kecag Hukum	X	PD Terkait _____

KODE	URAIAN	KETERANGAN
1	2	3
	perusahaan milik daerah/BUMD	
6.1.3.01.01.	Hasil penjualan perusahaan milik daerah/BUMD	Untuk menganggarkan Hasil Penjualan Perusahaan milik Daerah/BUMD yang diperoleh dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan PDAU.
6.1.3.02..	Hasil penjualan aset milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga	
6.1.3.02.01.	Hasil penjualan aset milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga	Untuk menganggarkan Hasil Penjualan Aset Milik Pemerintah Daerah yang diperoleh dari kerjasama dengan pihak ketiga
6.1.4.	Penerimaan Pinjaman Daerah	
6.1.4.01.	Penerimaan Pinjaman Daerah dari Pemerintah	
6.1.4.01.01.	Penerusan pinjaman daerah dari pemerintah	Untuk menganggarkan Pinjaman Daerah Pemerintah yang diperoleh dari Penerusan Pinjaman.
6.1.4.02.	Penerimaan Pinjaman Daerah dari pemerintah daerah lain	
6.1.4.02.01.	Penerimaan Pinjaman Daerah dari pemerintah daerah lain	Untuk menganggarkan Penerimaan Pinjaman Daerah Pemerintah Daerah Lain yang diperoleh dari Pemerintah Daerah
6.1.4.03.	Penerimaan Pinjaman Daerah dari lembaga keuangan bank	
6.1.4.03.01.	Penerimaan Pinjaman Daerah dari lembaga keuangan bank	Untuk menganggarkan Penerimaan Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank yang di peroleh dari Bank
6.1.4.04.	Penerimaan Pinjaman Daerah dari lembaga keuangan bukan bank	
6.1.4.04.01.	Penerimaan Pinjaman Daerah dari lembaga keuangan bukan bank	Untuk menganggarkan Penerimaan Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank yang di peroleh dari Lembaga Keuangan bukan bank
6.1.4.05.	Penerimaan Hasil Penerbitan Obligasi Daerah	
6.1.4.05.01.	Obligasi atas nama pemerintah daerah	Untuk menganggarkan penerimaan pinjaman dari obligasi atas nama pemerintah daerah
6.1.4.05.02.	Obligasi atas nomor pemerintah daerah	Untuk menganggarkan penerimaan pinjaman dari obligasi atas nomor pemerintah daerah
6.1.5.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	
6.1.5.01.	Penerimaan Kembali Penerimaan Pinjaman Daerah	
6.1.5.01.01.	Penerimaan Kembali Penerimaan Pinjaman Daerah	Untuk menganggarkan penerimaan kembali penerimaan pinjaman daerah

Paraf Hierarki	
Sekda	✓
Asisten Sekda	✓
Kabag. Hukum	✓

Paraf Koordinasi	
Asisten _____	h
PD Pemrakarsa	✓
PD Terkait	✓

KODE	URAIAN	KETERANGAN
1	2	3
6.1.6.	Penerimaan Piutang Daerah	
6.1.6.01.	Penerimaan piutang daerah dari pendapatan daerah	
6.1.6.01.01.	Penerimaan piutang daerah dari pendapatan pajak daerah	Untuk menganggarkan Penerimaan Piutang daerah dari Pendapatan Daerah yang diperoleh dari Penerimaan piutang daerah dari pendapatan pajak daerah.
6.1.6.01.02.	Penerimaan piutang daerah dari pendapatan retribusi daerah	Untuk menganggarkan Penerimaan Piutang daerah dari Pendapatan Daerah yang diperoleh dari Penerimaan piutang daerah dari pendapatan retribusi daerah.
6.1.6.01.03.	Penerimaan piutang daerah dari lain lain pendapatan yang sah	Untuk menganggarkan Penerimaan Piutang daerah dari Pendapatan Daerah yang diperoleh dari Penerimaan piutang daerah dari lain lain pendapatan yang sah
6.1.6.02.	Penerimaan piutang daerah dari pemerintah	
6.1.6.02.01.	Penerimaan piutang daerah dari pemerintah	Untuk menganggarkan Penerimaan Piutang daerah dari Pendapatan Daerah yang diperoleh dari Penerimaan piutang daerah dari pemerintah
6.1.6.03.	Penerimaan piutang daerah dari pemerintah daerah lain	
6.1.6.03.01.	Pemerintah daerah	Untuk menganggarkan Penerimaan Piutang daerah dari Pendapatan Daerah yang diperoleh dari Penerimaan piutang daerah dari pemerintah daerah lain
6.1.6.04.	Penerimaan piutang daerah dari lembaga keuangan bank	
6.1.6.04.01.	Bank	Untuk menganggarkan Penerimaan Piutang daerah dari Pendapatan Daerah yang diperoleh dari Bank
6.1.6.05.	Penerimaan Piutang daerah dari lembaga Keuangan bukan bank	
6.1.6.05.01.	Lembaga keuangan bukan bank	Untuk menganggarkan Penerimaan yang diperoleh dari lembaga keuangan bukan bank yang diperoleh dari Penerimaan piutang daerah dari lembaga keuangan bukan bank.
6.1.6.06.	Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	
6.1.6.06.01.	Penerimaan Kembali investasi Dana Bergulir	Untuk menganggarkan Penerimaan investasi yang diperoleh dari Penerimaan Kembali investasi Dana Bergulir
6.1.6.06.02.	Penerimaan Kembali Dana Bergulir dari Kelompok Masyarakat	Untuk menganggarkan Penerimaan investasi yang diperoleh dari Penerimaan Kembali dana bergulir dari kelompok masyarakat.
6.1.6.07.	Penerimaan Piutang Revolving	
6.1.6.07.01.	Penerimaan piutang.	Untuk menganggarkan Penerimaan yang diperoleh dari Penerimaan Piutang.

Paraf Hierarki	
Sekda	6
Asisten Pen & Kesra	t
Kabag Hukum	λ

Paraf Koordinasi	
Asisten	h
PD Pemrakarsa	y
PD Terkait	

KODE	URAIAN	KETERANGAN
1	2	3
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	
6.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	
6.2.1.01.	Pembentukan Dana Cadangan	
6.2.1.01.01.	Pembentukan Dana Cadangan	Untuk menganggarkan pengeluaran pembiayaan yang diperoleh dari pembentukan dana cadangan.
6.2.2.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	
6.2.2.01.	Badan usaha milik pemerintah (BUMN)	
6.2.2.01.01.	BUMN	Untuk menganggarkan pengeluaran pembiayaan Daerah untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
6.2.2.02.	Badan usaha milik daerah (BUMD)	
6.2.2.02.01.	Bank Jatim	Untuk menganggarkan pengeluaran pembiayaan Daerah untuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang diperoleh dari Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur.
6.2.2.02.02.	Bank Perkreditan Rakyat	Untuk menganggarkan pengeluaran pembiayaan Daerah untuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang diperoleh dari Bank Perkreditan Rakyat.
6.2.2.02.03.	Perusahaan Daerah Air Minum	Untuk menganggarkan pengeluaran pembiayaan Daerah untuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang diperoleh dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).
6.2.2.02.06.	Perusahaan Daerah Aneka Usaha	Untuk menganggarkan pengeluaran pembiayaan Daerah untuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang diperoleh dari Perusahaan Daerah Aneka Usaha.
6.2.2.03.	Badan usaha milik swasta	
6.2.2.03.01.	Badan usaha milik swasta	Untuk menganggarkan pengeluaran pembiayaan Daerah untuk Badan Usaha Milik Swasta
6.2.2.04.	Dana Bergulir	
6.2.2.04.01.	Dana Bergulir Dinas Koperasi	Untuk menganggarkan pengeluaran Dana Bergulir Dinas Koperasi.
6.2.2.04.01.	Dana Bergulir Dinas Tanaman Pangan	Untuk menganggarkan pengeluaran Dana Bergulir Dinas Tanaman Pangan.
6.2.3.	Pembayaran Pokok Utang	
6.2.3.01.	Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada Pemerintah	
6.2.3.01.01.	Penerusan pinjaman	Untuk menganggarkan Pembayaran pokok utang yang jatuh tempo kepada Pemerintah dari penerusan pinjaman
6.2.3.01.02.	Rekening Dana Investasi	Untuk menganggarkan Pembayaran pokok utang yang jatuh tempo kepada Pemerintah yang diperoleh dari Rekening Dana Investasi
6.2.3.02.	Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada Pemerintah daerah lain	

Paraf Hierarki		Paraf Koordinasi	
Sekda	<i>[Signature]</i>	Asisten	<i>[Signature]</i>
Kep. Pen. & Yur.	<i>[Signature]</i>	PD Pemrakarsa	<i>[Signature]</i>
Kepag. Hum.	<i>[Signature]</i>	PD Terkait	<i>[Signature]</i>

KODE	URAIAN	KETERANGAN
1	2	3
6.2.3.02.01.	Pemerintah daerah	Untuk menganggarkan Pembayaran pokok utang yang jatuh tempo kepada Pemerintah Daerah lain yang diperoleh dari Pemerintah Daerah lain.
6.2.3.03.	Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada Lembaga Keuangan Bank	
6.2.3.03.01.	Bank	Untuk menganggarkan Pembayaran pokok utang yang jatuh tempo kepada Lembaga Keuangan Bank yang diperoleh dari Bank
6.2.3.04.	Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada Lembaga Keuangan bukan Bank	
6.2.3.04.01.	Lembaga keuangan bukan Bank	Untuk menganggarkan Pembayaran pokok utang yang jatuh tempo kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank yang diperoleh dari Lembaga Keuangan Bukan Bank.
6.2.3.05.	Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada Pemerintah	
6.2.3.05.01.	Penerusan pinjaman	Untuk menganggarkan Pembayaran pokok utang yang jatuh tempo kepada Pemerintah yang diperoleh dari penerusan pinjaman.
6.2.3.06.	Pembayaran Pokok Utang sebelum Jatuh Tempo kepada Pemerintah Daerah lain	
6.2.3.06.01.	Pemerintah Daerah	Untuk menganggarkan Pembayaran pokok utang sebelum jatuh tempo kepada Pemerintah Daerah lain yang diperoleh dari Pemerintah Daerah Lain.
6.2.3.07.	Pembayaran Pokok Utang Sebelum Jatuh Tempo kepada lembaga keuangan bank	
6.2.3.07.01.	Bank	Untuk menganggarkan Pembayaran pokok utang sebelum jatuh tempo kepada Lembaga Keuangan Bank yang diperoleh dari Bank
6.2.3.08.	Pembayaran Pokok Utang sebelum Jatuh Tempo kepada Lembaga keuangan bukan bank	
6.2.3.08.01.	Lembaga keuangan bukan bank	Untuk menganggarkan Pembayaran pokok utang sebelum jatuh tempo kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank yang diperoleh dari Lembaga Keuangan Bukan Bank.
6.2.3.09.	Pelunasan Obligasi daerah pada saat jatuh tempo	
6.2.3.09.01.	Pelunasan Obligasi daerah atas nama	Untuk menganggarkan Pelunasan Obligasi daerah pada saat jatuh tempo yang diperoleh dari Obligasi Daerah yang jatuh tempo.
6.2.3.09.02.	Pelunasan Obligasi daerah	Untuk menganggarkan Pelunasan Obligasi

Paraf Hicarki		Paraf Koordinasi	
Sekda	<input checked="" type="checkbox"/>	Asisten _____	h
Asisten Pem & Yasa	<input checked="" type="checkbox"/>	PD Pemrakarsa	f
Kabag Hukum	<input checked="" type="checkbox"/>	PD Terkait	

KODE	URAIAN	KETERANGAN
1	2	3
	atas nomor	daerah pada saat jatuh tempo yang diperoleh dari Obligasi nomor yang jatuh tempo.
6.2.3.10.	Pembelian kembali obligasi daerah sebelum jatuh tempo	
6.2.3.10.01.	Pembelian kembali obligasi atas nama	Untuk menganggarkan Pembelian kembali obligasi daerah sebelum jatuh tempo yang diperoleh dari Obligasi Daerah sebelum jatuh tempo.
6.2.3.10.02.	Pembelian kembali obligasi atas nomor	Untuk menganggarkan Pembelian kembali obligasi daerah sebelum jatuh tempo yang diperoleh dari Obligasi Nomor sebelum jatuh tempo.
6.2.4.	Pemberian Pinjaman Daerah	
6.2.4.01.	Pemberian Pinjaman daerah kepada Pemerintah	
6.2.4.01.01.	Pemerintah	Untuk menganggarkan Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah yang diperoleh dari Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah.
6.2.4.02.	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Daerah lain	
6.2.4.02.01.	Pemerintah Daerah	Untuk menganggarkan Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah daerah lain yang diperoleh dari Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah lain.
6.2.4.03.	Pemberian Pinjaman Revolving	
6.2.4.03.01.	Pemberian Pinjaman Revolving.	Untuk menganggarkan Pemberian Pinjaman Revolving yang diperoleh dari Pemberian Pinjaman Revolving .
6.2.4.03.02.	Pemberian Pinjaman.	Untuk menganggarkan Pemberian Pinjaman yang diperoleh dari Pemberian Pinjaman .
6.3.	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	

λ BUPATI PACITAN ✓

λ INDARTATO

Paraf Koordinasi	
istien _____	h
Pemrakarsa _____	y
Terkait _____	